

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTORAT  
PENGOLAHAN DAN  
BINA MUTU

## Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Pengolahan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP ada dua yaitu, Volume Produk Olahan (VPO) dan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP). Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan III Tahun 2024 sebesar 105,25% (kategori baik). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan

sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: [direktoratpbm@gmail.com](mailto:direktoratpbm@gmail.com). Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Oktober 2024  
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu



Widya Rusyanto

# Tim Penyusun

## PENGARAH

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

## PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

## KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (performance results) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan III Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 11 (sebelas) **Sasaran Kegiatan (SK)** sebagai berikut: (1) Utilitas UPI yang meningkat; (2) Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan; (3) Terlaksananya sertifikasi produk KP; (4) Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP; (5) Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan Pengolahan Produk KP; (6) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (7) Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan; (8) Tersedianya prasarana system rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan (9) Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan; (10) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan; (11) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 11 IKK bersifat tahunan, 10 IKK bersifat triwulan, 1 IKK bersifat semesteran, dan 2 IKK bersifat bulanan.

**Indikator Kinerja Kegiatan** yang bersifat tahunan yaitu Rancangan

Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil Kelautan dan Perikanan yang disediakan (produk), Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan *Utilitas*) (data), Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang dibangun (unit), Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (orang), Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%), Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Nilai penilaian mandiri sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%), Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase *Utilitas UPI yang Meningkatkan (%)*, Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk), Pabrik Es yang Dibangun (Unit), *Chest freezer* yang Disediakan (Unit), Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan (Unit), Sarana Pasca Panen yang Disediakan (Unit), Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit), UPI Skala Menengah dan Besar yang Dibina (industri), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%). Indikator yang bersifat semesteran adalah Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Indikator yang bersifat bulanan yaitu Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM), Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM).

**Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja** sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, sepuluh (10) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan

Bina Mutu mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan III adalah sebesar 105,25 (kategori baik). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetnya pada Triwulan III. Adapun rincian capaian periode Triwulan III yaitu sebagai berikut :

- IKK Perhitungan Utilitas UPI (%); target 68%; capaian 68,26% atau 100,38%.
- IKK Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP); target 478 Produk; capaian 478 Produk atau 100% dari target.
- IKK *Chest Freezer* Yang Disediakan (Unit); target 271 unit; capaian 311 unit atau 114,76% dari target.
- IKK Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang Disediakan (Unit); target 8 unit; capaian 8 unit atau 100%.
- IKK Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM); target 1.360 UMKM; capaian 1.430 UMKM atau 105,15% dari target.
- IKK Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM); target 600 UMKM; capaian 600 atau 100% dari target.
- IKK Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri); target 200 industri; capaian 200 industri atau 100%.
- IKK Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (IKU); target 19.080 orang; capaian 19.466 orang atau sebesar 102,02%.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%); target 80; capaian 100 atau sebesar 120%.
- IKK Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar; target 94; capaian 133,33% atau 120%.

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.9.178.309.000,- dari pagu semula Rp 69.198.100.000,- menjadi Rp 60.019.791.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp 16.780.637.237,- atau setara dengan 27,96% dari pagu setelah AA. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama Triwulan III Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2024 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan III Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

# Daftar Isi

## Table of Contents

.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Kata pengantar</b> .....	i
<b>Tim Penyusun</b> .....	iii
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Daftar Tabel</b> .....	x
<b>Daftar Gambar</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi .....	2
1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia .....	3
1.5. Permasalahan Utama .....	4
1.6. Sistematika Penyajian .....	5
<b>BAB II</b> .....	7
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
2.1. Rencana Strategis .....	7
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan .....	7
<b>BAB III</b> .....	11
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	11
<b>3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan</b> .....	11
<b>3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja</b> .....	16
Kegiatan 1. Utilitas UPI Yang Meningkatkan .....	16
Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNi Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan .....	31
Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan .....	43
Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Publik Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan .....	52
Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan .....	57
Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan .....	61

Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan .....	62
Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Sistem Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	66
Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	78
Kegiatan 10. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan.....	104
<b>BAB IV</b> .....	164
<b>PENUTUP</b> .....	164
4.1.Kesimpulan.....	164
4.2.Permasalahan.....	165
4.3.Rekomendasi Tindak Lanjut.....	166
4.4.Lampiran.....	168

## Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024 .....	8
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024	12
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%).....	16
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Disediakan (Produk).....	32
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk).....	44
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data) .....	53
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit) .....	58
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang) .....	61
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%).....	63
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pabrik Es Portable yang dibangun (unit).....	67
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Chest Freezer yang disediakan (unit).....	78
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit) .....	85
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit) .	91
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan (unit).....	99
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) .....	105
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM).....	122
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri).....	131
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai).....	151
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks) .....	153
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai).....	154
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	155
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) .....	157
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi).....	158
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%).....	159
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) .....	160
Tabel 26. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 .....	161

Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)..... 163

## Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.....	3
Gambar 2. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.....	6
Gambar 3. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW III Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada aplikasi kinerja.....	11
Gambar 4. Rapat Koordinasi Berkala Dalam rangka memantau pemanfaatan Integrated Cold Storage (ICS) yang dibangun oleh pemerintah .....	18
Gambar 5. Rapat Penghitungan Prognosa Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar Semester 1 Tahun 2024.....	20
Gambar 6. Rapat Rencana Pelaksanaan Validasi Terhadap Data Yang Telah Diinput oleh Enumerator Melalui Aplikasi Pendataan Sarana Prasarana dan VPO.....	23
Gambar 7. Rapat Koordinasi Berkala Pabrik Es yang dibangun oleh pemerintah .....	26
Gambar 8. Rapat Monitoring Kegiatan Pendataan dan Penginputan Sarana Prasarana dan Volume Produk Olahan UPI Skala Menengah Besar .....	31
Gambar 9. Rapat Teknis RSNi2 Produk Perikanan Pembahasan Defnisi Proses.....	36
Gambar 10. Rapat RSNi2 Produk Perikanan Non-pangan.....	37
Gambar 11. Rapat Teknis RSNi Produk Perikanan .....	39
Gambar 12. Rapat Teknis RSNi2 Produk Perikanan Non-pangan.....	40
Gambar 13. Rapat Konsensus RSNi3 Produk Perikanan.....	42
Gambar 14. Rapat Konsensus RSNi3 Produk Perikanan Non-pangan.....	43
Gambar 15. Bimbingan Teknis Penerapan <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> .....	47
Gambar 16. Refreshment HACCP untuk Pembina Mutu Ahli Muda dan Madya lingkup Direktorat Jendral PDSPKP .....	48
Gambar 17. Pembinaan Mutu menuju HACCP terhadap PT. Tilapia Nusantara Jaya, Semarang.....	49
Gambar 18. Persiapan Pembinaan HACCP bagi PT. Bintang Intan Gemilang .....	50
Gambar 19. Koordinasi Pembinaan SKP .....	51
Gambar 20. Kegiatan Refreshment ISO 9001 .....	52
Gambar 21. Keikutsertaan Pada Kegiatan valnas VPO Semester I Tahun 2024 .....	57
Gambar 22. Rapat Penandatanganan Kontrak Konstruksi UPI Bernilai Tambah .....	60
Gambar 23. Validasi Data dan Penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) 2024.....	66
Gambar 24. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es <i>Portable</i> .....	69
Gambar 25. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es <i>Portabel</i> di Kab. Situbondo .....	71
Gambar 26. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es <i>Portable</i> di Kab. Tulungagung.....	73
Gambar 27. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah <i>Chest Freezer</i> .....	81
Gambar 28. Rapat Koordinasi Probit Audit Pelaksanaan Bantuan Pemerintah <i>Chest Freezer</i> .....	82
Gambar 29. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP CF.....	84
Gambar 30. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan.....	88
Gambar 31. Rapat Koordinasi Probit Audit Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan.....	89
Gambar 32. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP Peralatan Pengolahan.....	90
Gambar 33. Rapat Koordinasi dengan Dinas KP penerima BP SPP .....	93
Gambar 34. Rapat Koordinasi Probit Audit Pelaksanaan BP Sarana Pasca Panen .....	95

Gambar 35. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP PP.....	98
Gambar 36. Rapat Koordinasi dengan Dinas KP penerima BP SPP MP Korporasi.....	101
Gambar 37. Rapat Koordinasi Probitas Audit Pelaksanaan BP Sarana Pasca Panen MP Korporasi.....	103
Gambar 38. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP PP.....	104
Gambar 39. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Sentra Pemindangan.....	109
Gambar 40. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Bogor.....	112
Gambar 41. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Purwakarta.....	114
Gambar 42. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Kendal.....	115
Gambar 43. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Karawang.....	116
Gambar 44. Webinar Cara Mudah Mendapatkan Legalitas Merek dan Ijin Edar MD.....	118
Gambar 45. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan di Pameran Seafood Skala International.....	120
Gambar 46. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan di Kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).....	121
Gambar 47. Mendukung kampanye protein ikan.....	125
Gambar 48. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan.....	127
Gambar 49. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan di berbagai daerah..	127
Gambar 50. Rapat Pendampingan UNDIP Dalam Rangka Fortifikasi Pangan Olahan Dengan HPI dan Perumusan <i>Draft</i> Kerja Sama.....	128
Gambar 51. Pembahasan Juknis Lomba Inovasi pada tanggal 20 Agustus 2024.....	129
Gambar 52. Bimbingan Teknis (Bimtek) ragam produk untuk UMKM naik kelas bekerja sama dengan BBP3KP.....	130



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024 yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Renstra 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Volume Produk Olahan (VPO) hasil perikanan bernilai tambah, namun pada Triwulan II tahun 2024 capaian tersebut belum terlihat karena bersifat tahunan. Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan. Laporan

Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan menyusun “Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu 2024”.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan publik;
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **1.3. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pembinaan mutu meliputi standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan. Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 7 Tim Kerja, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar;
- b. Tim Kerja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan;
- c. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah;
- e. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar;
- f. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil;
- g. Tim Kerja Dukungan Manajerial.



Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

#### 1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Tahun 2024 berjumlah 70 orang dengan komposisi 49 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 8 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari

Pria sebanyak 32 orang dan Wanita sebanyak 38 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan II/c sebanyak 2 orang, II/d sebanyak 1 orang, III/a sebanyak 2 orang, III/b sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 5 orang, III/d sebanyak 13 orang, IV/a sebanyak 10 orang, IV/b sebanyak 5 orang, IV/c sebanyak 2 orang, IV/d sebanyak 1 orang, IV/e sebanyak 1 orang. Non golongan ada 21 orang.



Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia

### 1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pengolahan dan pembinaan mutu produk perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap produk ikan, dan permasalahan sektor riil yang dihadapi stakeholders/pelaku usaha kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan hal itu, perlu dilakukan berbagai upaya seperti : penanganan pasca panen, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, diversifikasi produk, pengembangan sarana dan prasarana. Di saat yang sama, permasalahan berusaha yang dihadapi pelaku usaha mikro-kecil, usaha menengah besar kelautan dan perikanan, serta tantangan lingkungan sekitarnya harus menjadi perhatian dan diselesaikan. Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro-kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum

melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perijinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, masih minim pembinaan, padahal dari segi jumlah pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, traceability) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan. Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, Traceability), dan belum memiliki sertifikat lingkungan.

## **1.6.Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan III Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Tahun 2024. Pencapaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2024 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (Performance Gap) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan III Tahun 2024 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematis Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1.Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu:

**“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”**

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

### 2.2.Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input,

output, dan outcome). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2020-2024. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2024
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15
3	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product (GMP)</i> (Produk)	10.000
4	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3
5	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	1
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	38.159
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	11
9	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan	9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	311
		10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2024
	perikanan	11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9
		12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8
10	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800
		14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
		15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		17	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87
		18	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84
		19	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100
		20	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80
		21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2024
		23	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		24	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu memiliki 24 indikator kinerja yang terdiri dari 11 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, 10 indikator kinerja bersifat triwulanan, dan 2 indikator kinerja bersifat bulanan. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari Juli sampai dengan September 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebesar 105,25. Adanya penurunan 5,69 poin atau 5,13% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2024, dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 5,21 poin atau 4,72%.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW III Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada aplikasi kinerja

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu s.d. Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi	% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW III		TAHUN 2024	TW III
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68	68	68,26	100,38	100,38
2	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15	-	-	-	-
3	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP) (Produk)	10.000	478	478	24,87	100
4	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3	-	-	-	-
5	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	1	-	-	-	-
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	38.159	19.080	19.466	51,01	102,02

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi	% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW III		TAHUN 2024	TW III
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25	-	-	-	-
8	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	11	-	-	-	-
9	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	311	271	311	114,76	114,76
		10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270	-	-	-	-
		11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9	-	-	-	-
		12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8	8	8	100	100
10	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800	1.360	1.430	79,44	105,15
		14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka	875	375	375	42,86	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi	% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW III		TAHUN 2024	TW III
			peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)					
		15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500	180	220	44	122,22
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75	-	-	-	-
		17	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87	-	-	-	-
		18	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84	-	-	-	-
		19	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100	-	-	-	-
		20	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	80	80	100	120	120

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi	% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW III		TAHUN 2024	TW III
			dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)					
		21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1	-	-	-	-
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94	94	133,33	141,84	141,84
		23	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95	-	-	-	-
		24	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80	-	-	-	-

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

#### Kegiatan 1. Utilitas UPI Yang Meningkatkan

##### IK 1. Persentase Utilitas UPI yang Meningkatkan

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	68	68	-	68	68,26	68,12	-	68,26	100,38	100,38	0,21	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Utilitas UPI yang meningkat adalah 68,26%. Capaian indikator Persentase Utilitas UPI yang meningkat sampai dengan triwulan III adalah sebesar 68,26 atau meningkat sebesar 0,21% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 68,12%. Capaian ini setara dengan 100,38% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 68%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024

yaitu 68%, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 100,38%. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pada tahun sebelumnya indikator ini bersifat tahunan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka penghitungan utilitas sebesar Rp. 170.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 70.741.200,- atau sebesar 41,61% dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III, yaitu:

- a. Kendala yang dihadapi pada triwulan III, enumerator belum seluruhnya melakukan pendataan dan penginputan data.
- b. Raw Data Lalin Ekspor dan Domestik baru diperoleh pada bulan Oktober 2024, sehingga penghitungan VPO tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Adapun keberhasilan atau pencapaian adalah Kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah Meningkatkan monitoring terhadap kinerja enumerator dan meningkatkan koordinasi dengan Badan Mutu.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung penghitungan utilitas antara lain :

1. Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Berkala Dalam rangka memantau pemanfaatan *Integrated Cold Storage (ICS)* yang dibangun oleh pemerintah

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat dilaksanakan pada 25 Juli 2024 di ruang rapat investasi, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 15, Jl.Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta , rapat dilaksanakan secara luring dan daring.

- Peserta:

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja PUP2MB dan dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Jenderal, Direktorat Pengolahan , Dinas Kelautan dan Perikanan penerima bantuan dana DAK Tahun 2023 dan 2024.

- Tujuan Kegiatan:

Rapat bertujuan untuk memantau pemanfaatan ICS yang dibangun

pemerintah dan memantau rehab ICS melalui dana DAK 2024.

- Pembahasan:

Katimja PUP2MB dalam sesi pembukaan menyampaikan (1) terkait outcome DAK tahun 2023 yaitu berupa serapan tenaga kerja ataupun pelaku usaha perikanan yang merasakan manfaat dari adanya ICS. Selain itu juga untuk memastikan bahwa daerah yang menerima DAK sudah menyelesaikan rehab dan unit yang direhab beroperasi. (2) Perlu adanya rencana aksi setelah rehab ICS selesai, agar operasioanlisasinya optimal.

- a. Di filter dahulu untuk UPI yang akan dimasukkan dalam perhitungan
- b. Produksi kecil <1 kwintal per bulan di drop
- c. Koreksi untuk minyak, olahan lainnya, pengasapan, fermentasi, dan pengolahan kerupuk, keripik, peyek ikan (bulan 1-5 nilainya terlalu kecil (233 ; 97,5, dst) ) agar di drop
- d. Mengadjust minyak ikan yang tadinya non konsumsi menjadi konsumsi
- e. Minyak ikan untuk sementara akan dilakukan survey lebih lanjut ke perusahaannya untuk memastikan apakah minyak ikan tersebut untuk konsumsi atau bukan
- f. Untuk minyak ikan dan rumput laut tetap dimasukkan dalam perhitungan walaupun tidak dikonsumsi oleh manusia



Gambar 5. Rapat Koordinasi Berkala Dalam rangka memantau pemanfaatan *Integrated Cold Storage* (ICS) yang dibangun oleh pemerintah

## 2. Rapat Penghitungan Prognosa Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar Semester 1 Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat Penghitungan Prognosa Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besaar Semester 1 Tahun 2024 dilaksanakan di ruang kerja Katimja PUP2MB Lt. 12 A

- Peserta:

Rapat dipimpin oleh Katimja PUP2MB, dan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, bagian data dan layanan publik PDSPKP, dan Timja PUP2MB serta perwakilan dari Dukman Direktorat Pengolahan.

- Tujuan Kegiatan:

Rapat bertujuan untuk melakukan penghitungan prognosa VPO UPI MB , sebagai langkah awal pada rapat ini dilakukan cleansing data.

- Pembahasan:

Adapun beberapa yang dijadikan acuan melakukan cleansing data adalah :

- Data di filter dahulu untuk UPI yang akan dimasukkan dalam perhitungan
- Produksi kecil <1 kwintal per bulan di drop
- Koreksi untuk minyak, olahan lainnya, pengasapan, fermentasi, dan pengolahan kerupuk, keripik, peyek ikan (bulan 1-5 nilainya terlalu kecil (233 ; 97,5, dst) ) agar di drop
- Mengadjust minyak ikan yang tadinya non konsumsi menjadi konsumsi
- Minyak ikan untuk sementara akan dicari informasi lebih lanjut ke perusahaannya untuk memastikan apakah minyak ikan tersebut untuk konsumsi atau bukan
- Untuk minyak ikan dan rumput laut tetap dimasukkan dalam perhitungan walaupun tidak dikonsumsi oleh manusia

Berikut beberapa prognosa yang dihasilkan dari pertemuan ini.

Sum of netto_setaraBB	Column Labels						6 Grand Total
Row Labels	1	2	3	4	5	6	Grand Total
Pembekuan Ikan	157,233,148.60	117,069,484.68	111,893,888.82	110,343,230.66	134,511,252.69	124,688,317.87	755,739,323.32
Penanganan Ikan	6,103,530.80	5,387,421.47	4,080,658.70	3,866,700.83	4,857,009.28	4,089,455.04	28,384,776.11
Pendinginan/pengesan ikan	25,764,491.43	19,474,470.53	21,455,998.74	19,887,704.50	25,378,564.92	21,881,374.85	133,842,604.97
Pengalengan ikan	20,414,996.57	20,227,937.89	19,165,513.54	16,683,235.21	23,867,818.71	19,716,809.11	120,076,311.03
Pengasapan/pemangangan ikan	204,335.82	239,291.50	200,885.50	238,927.67	137,942.22	438,465.33	1,459,848.04
Pengaraman/Pengeringan Ikan	9,680,292.58	6,812,305.20	6,202,116.22	7,251,417.32	9,566,817.14	10,928,213.80	50,441,162.26
Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi	5,377,727.58	4,809,814.48	3,681,826.05	4,121,963.79	5,808,303.87	5,556,122.92	29,355,758.70
Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan	1,263,446.96	1,934,336.64	1,884,116.34	1,584,852.88	1,461,880.56	1,860,039.28	9,988,672.66
Pengolahan lainnya	156,417.64	12,992.56	78,280.21	32,850.91	149,334.50	45,271.28	475,147.10
Pengolahan rumput laut	50,310,869.91	48,588,090.02	41,380,962.33	40,959,506.93	53,737,798.26	44,836,735.38	279,813,962.83
Peragian/Fermentasi Ikan	52,115.57	28,199.11	54,623.21	24,870.00	110,069.91	151,474.29	421,352.09
<b>Grand Total</b>	<b>276,561,373.45</b>	<b>224,584,344.08</b>	<b>210,078,869.67</b>	<b>204,995,260.70</b>	<b>259,586,792.05</b>	<b>234,192,279.15</b>	<b>1,409,998,919.10</b>

Sum of netto	Column Labels						
Row Labels	1	2	3	4	5	6 Grand Total	
Pembekuan Ikan	118,902,150.48	88,529,763.65	84,615,897.63	83,443,265.83	101,719,499.68	94,291,243.71	571,501,820.99
Penanganan Ikan	5,981,460.18	5,279,673.04	3,999,045.53	3,789,366.81	4,759,869.09	4,007,665.94	27,817,080.59
Pendinginan/pengesan ikan	23,960,977.03	18,111,257.59	19,954,078.83	18,495,565.18	23,602,065.38	20,349,678.61	124,473,622.62
Pengalengan ikan	9,390,898.42	9,304,851.43	8,816,136.23	7,674,288.20	10,979,196.61	9,069,732.19	55,235,103.07
Pengasapan/pemanggangan ikan	122,601.49	143,574.90	120,531.30	143,356.60	82,765.33	263,079.20	875,908.82
Pengaraman/Pengeringan Ikan	4,356,131.66	3,065,537.34	2,790,952.30	3,263,137.80	4,305,067.71	4,917,696.21	22,698,523.02
Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi	3,226,636.55	2,885,888.69	2,209,095.63	2,473,178.27	3,484,982.33	3,333,673.75	17,613,455.22
Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan	631,723.48	967,168.32	942,058.17	792,426.44	730,940.28	930,019.64	4,994,336.33
Pengolahan lainnya	125,134.11	10,394.05	62,624.17	26,280.73	119,467.60	36,217.02	380,117.68
Pengolahan rumput laut	21,633,674.06	20,892,878.71	17,793,813.80	17,612,587.98	23,107,253.25	19,279,796.22	120,320,004.01
Peragian/Fermentasi ikan	29,184.72	15,791.50	30,589.00	13,927.20	61,639.15	84,825.60	235,957.17
<b>Grand Total</b>	<b>188,360,572.18</b>	<b>149,206,779.22</b>	<b>141,334,822.59</b>	<b>137,727,381.04</b>	<b>172,952,746.40</b>	<b>156,563,628.09</b>	<b>946,145,929.52</b>

Row Labels	Sum of netto	Ekspor	Sum of netto_setaraBB	Ekspor	Total Sum of netto	Total Sum of netto_setaraBB
Pembekuan Ikan	218,266,659.23	353,235,161.75	288,630,221.80	467,109,101.52	571,501,820.99	755,739,323.32
Penanganan Ikan	10,472,317.99	17,344,762.60	10,686,038.77	17,698,737.35	27,817,080.59	28,384,776.11
Pendinginan/pengesan ikan	90,692,755.70	33,780,866.92	97,519,092.15	36,323,512.82	124,473,622.62	133,842,604.97
Pengalengan ikan	7,791,397.58	47,443,705.49	16,937,820.83	103,138,490.20	55,235,103.07	120,076,311.03
Pengasapan/pemanggangan ikan	11,237.07	864,671.75	18,728.45	1,441,119.59	875,908.82	1,459,848.04
Pengaraman/Pengeringan Ikan	14,320,746.03	8,377,776.99	31,823,880.06	18,617,282.20	22,698,523.02	50,441,162.26
Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi	11,180,840.92	6,432,614.30	18,634,734.87	10,721,023.83	17,613,455.22	29,355,758.70
Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan	336.60	4,993,999.73	673.20	9,987,999.46	4,994,336.33	9,988,672.66
Pengolahan lainnya	158,116.08	222,001.60	197,645.10	277,502.00	380,117.68	475,147.10
Pengolahan rumput laut	33,003,787.68	87,316,216.33	76,752,994.60	203,060,968.22	120,320,004.01	279,813,962.83
Peragian/Fermentasi ikan	167,521.11	68,436.06	299,144.84	122,207.25	235,957.17	421,352.09
<b>Grand Total</b>	<b>386,065,716.00</b>	<b>560,080,213.53</b>	<b>541,500,974.68</b>	<b>868,497,944.42</b>	<b>946,145,929.52</b>	<b>1,409,998,919.10</b>

Berikut adalah rekap Prognosa Capaian VPO Semester 1 Tahun 2024

Sumber Data	Volume		
Dokel 1	193.844.915,73		
Dokel 2	192.591.915,97		
Ekspor TW 1	286.515.798,36		
Ekspor TW 2	274.915.489,33		
<b>Total</b>	<b>947.868.119,39</b>	<b>Kg</b>	<b>(Setara Produk)</b>
	947.868,12	ribu ton	<b>(Setara Produk)</b>
	0,9479	Juta ton	<b>(Setara Produk)</b>
<b>Estimasi Prognosa VPO Menengah Besar</b>	<b>1,232</b>	<b>Juta Ton</b>	<b>(Setara Bahan Baku )</b>



Gambar 6. Rapat Penghitungan Prognosa Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar Semester 1 Tahun 2024

### 3. Rapat Rencana Pelaksanaan Validasi Terhadap Data Yang Telah Diinput oleh Enumerator Melalui Aplikasi Pendataan Sarana Prasarana dan VPO

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 di Ruang Rapat Akses Pasar Lt. 15 GMB 3.

- Peserta:

Dihadiri Ketua Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar (PUP2MB), perwakilan Tim Kerja Data Statistik Pusdatin, Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, dan pelaksana Tim Kerja PUP2MB.

- Tujuan Kegiatan:

Rapat bertujuan untuk membahas rencana pelaksanaan validasi terhadap data yang telah diinput oleh enumerator melalui aplikasi pendataan sarana prasarana dan VPO.

- Pembahasan:

a. Data sarana prasarana UPI menengah besar yang masuk sampai dengan 7 Agustus 2024 adalah sebanyak 125 UPI dari target sampel 490 UPI. Data yang masuk terdiri dari data sarana prasana dan VPO UPI menengah besar mulai bulan Januari s.d Juli 2024, namun untuk data VPO masih belum terinput lengkap.

b. Dalam pertemuan ini dijelaskan tentang tata cara melakukan validasi data. Validasi akan dilakukan oleh 9 orang validator yang terdiri dari Tim PUP2MB dan perwakilan Tim Data SetDitjen PDSPKP.

c. Cara melakukan validasi data dan akun yang digunakan untuk melakukan validasi data UPI

d. Rule validasi data sebagai berikut :

- 1) Data Sarpras dan Kapasitas Terpasang

- Cek Data Sertifikat dan Tenaga Kerja harus terisi
- Jenis Penanganan dan pengolahan ikan sudah terisi sesuai kegiatan di UPI
- Sarpas dan Kapasitas Terpasang harus terisi sesuai jenis penanganan dan pengolahan ikan yang dilakukan UPI

- Cek Kewajaran Total Volume Sarana sesuai dengan jumlah unit yang diisi
- Jika Unit dan Kapasitas Total terisi maka seluruhnya wajib terisi
- Jumlah hari operasional maksimal 30 hari (setiap hari beroperasi)
- Jumlah shift/hari dan siklus/shift tidak lebih dari 2 atau menyesuaikan dengan kemampuan mesin
- Kapasitas terpasang = (Jumlah shift/hari) x (siklus/shift) x (Total kapasitas) x (Jumlah Hari operasional/bulan )
- Blok Pengesahan harus diisi
- Catatan kondisi UPI merupakan kendala yang dihadapi UPI selama 1 tahun terakhir sebelumnya

## 2) Data Volume Produk Olahan dan Kinerja UPI

- Validasi VPO dilakukan tiap bulan , cek bulan yang di validasi
- Blok Bahan baku harus terisi, cek rendemen yang masuk apakah sudah sesuai
- Jenis Ikan dan Produk akhir harus sesuai
- Bentuk produk akhir harus turunan dari bentuk bahan baku
- Cek kewajaran rendemen berdasarkan volume bahan baku dan volume produk
- VPO (Ekspor) + VPO (DN) + VPO (Dalam Pulau) + Stok akhir bulan yg divalidasi harus lebih dari sama dengan volume produk olahan bulan yang divalidasi
- Jika VPO (Ekspor) + VPO (DN) + VPO (Dalam Pulau) + Stok akhir bulan yg divalidasi lebih dari volume produksi bulan yang divalidasi, maka perlu di cek stok akhir bulan sebelumnya apakah ada dan sesuai dengan poin 3
- volume produk akhir bulan yang divalidasi bisa kurang dari kapasitas atau sama dengan kapasitas atau lebih dari kapasitas (dengan asumsi ada penambahan siklus atau shift)
- Blok pengesahan harus terisi dengan data enumerator
- Catatan kondisi UPI merupakan permasalahan UPI yang dihadapi pada bulan yang di validasi

- Untuk produk seperti kerupuk, bakso, pempek atau produk lumatan lainnya rendemen bisa lebih dari 100 %.

- Tindak Lanjut:

Tim PUP2MB dan perwakilan Tim Data SetDitjen PDSPKP akan melakukan validasi data secara mandiri dari tempat kerja masing masing, dan hasil validasi diharapkan dapat terkumpul pada 9 Agustus 2024.



Gambar 7. Rapat Rencana Pelaksanaan Validasi Terhadap Data Yang Telah Diinput oleh Enumerator Melalui Aplikasi Pendataan Sarana Prasarana dan VPO

#### 4. Rapat Koordinasi Berkala Pabrik Es yang dibangun oleh pemerintah

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat koordinasi berkala dilaksanakan pada 6 September 2024 di ruang rapat SKP, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 12A , Jl.Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta , rapat dilaksanakan secara hybrid.

- Peserta:

Rapat dipimpin oleh Katimja PUP2MB dan secara offline dihadiri oleh perwakilan Seditjen. PDSPKP, Dit. Pengolahan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun secara online di zoom meeting dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Sumbawa, Ketapang, Pohuwato, Parigi Moutong, Wakatobi, Buton, dan Sangihe.

- Tujuan Kegiatan:

Rapat bertujuan untuk memantau pemanfaatan pabrik es yang dibangun pemerintah dan memantau progress rehab melalui dana DAK 2024. Berikut

poin- poin yang dapat dilaporkan dalam rapat tersebut.

- Pembahasan:

Katimja PUP2MB dalam sesi pembukaan menyampaikan (1) terkait outcome DAK, yaitu berupa serapan tenaga kerja ataupun pelaku usaha perikanan yang merasakan manfaat dari adanya pabrik es. Selain itu juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama proses rehab, memastikan bahwa daerah yang menerima DAK sudah menyelesaikan rehab dan unit yang direhab beroperasi. (2) Perlu adanya rencana aksi setelah rehab pabrik es selesai, agar operasioanlisasinya optimal.

Pada kesempatan ini, masing-masing DKP menyampaikan update progres rehabilitasi pabrik es yang sudah dilakukan, permasalahan serta target penyelesaian:

1) DKP Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

- Pabrik es dilokasi ini berkapasitas 10 ton dan dikelola oleh dinas
- Harga es perkilo sebesar 500 rupiah
- Progres rehab yang sudah dilakukan menunjukkan kondisi yang baik, jalan dan mesin sudah diperbaiki.
- Kendala yang ada antara lain belum ada APBD untuk biaya pemeliharaan dan biaya listrik yang besar
- Target penyelesaian akhir Oktober 2024.

2) DKP Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara

- Pabrik es dilokasi ini dibangun 2017 melalui DAK dengan kapasitas 5 ton
- Dikelola oleh UPTD
- Pekerjaan rehabilitasi pabrik masih berjalan karena harus mendatangkan beberapa bahan peralatan dan panel listrik dari Makasar untuk perbaikan mesin.

3) DKP Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara

- Pabrik es dibangun tahun 2009 melalui DAK, beroperasi tahun 2010 sampai dengan 2016, kapasitas 10 ton.
- Pabrik es di lokasi ini sangat dibutuhkan mengingat besarnya hasil tangkapan ikan.

- Sudah ada beberapa calon pengelola yang siap untuk mengelola pabrik es ini
- Target penyelesaian rehabilitasi pabrik es sesuai kontrak sekitar november 2024.

#### 4) DKP Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara

- Pabrik es di lokasi ini dibangun tahun 2010 melalui DAK dengan kapasitas 10 ton.
- Belum beroperasi dengan maksimal karena mesin tidak mampu memproduksi es yang baik, butuh waktu lama agar es menjadi dingin dan beku/keras.
- Progres rehabilitasi pabrik es sudah berjalan 50,4%, ada keterlambatan karena sebagian besar pekerjaan untuk perbaikan mesin.
- Kendala saat ini adalah adanya perbedaan harga mesin sesuai spesifikasi yang dibutuhkan yang semula dianggarkan 800 juta menjadi 1,1 miliar yang disampaikan oleh pemenang tender, sebagai opsi akan diupayakan untuk menghubungi pemenang ke2 tender, jika cocok akan dilakukan pemutusan kontrak dengan pemenang1 dan membuat kontrak baru dengan pemenang 2 tender.

#### 5) DKP Kabupaten Katapang Kalimantan Barat

- Pabrik es ini berkapasitas 15 ton.
- Kapasitas produksi perhari sebesar 300 es balok.
- Saat ini pekerjaan masih berjalan dengan baik dan aman.
- Untuk saat ini capaian pekerjaan sudah mencapai 60%. ditargetkan oktober sudah tercapai 100%.

#### 6) DKP Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah

- Dibangun tahun 2007 melalui DAU, berkapasitas 3 ton.
- kapasitas produksi 152 es balok perhari. Harga es perbalok 18.000.
- lokasi bangunan dekat dengan kantor dinas sehingga mudah untuk dilakukan pemantauan.
- Saat ini rehab baru mencapai 10,31%, mesin masih dalam perakitan di Surabaya, diharapkan selesai di Oktober 2024.

#### 7) DKP Kabupaten Sumbawa NTB

- Tidak mendapat DAK rehab pabrik es 2024.
- mengharapkan ada fasilitasi dari KKP untuk dapat belajar dari lokasi yang pabrik esnya sudah berjalan dengan baik.

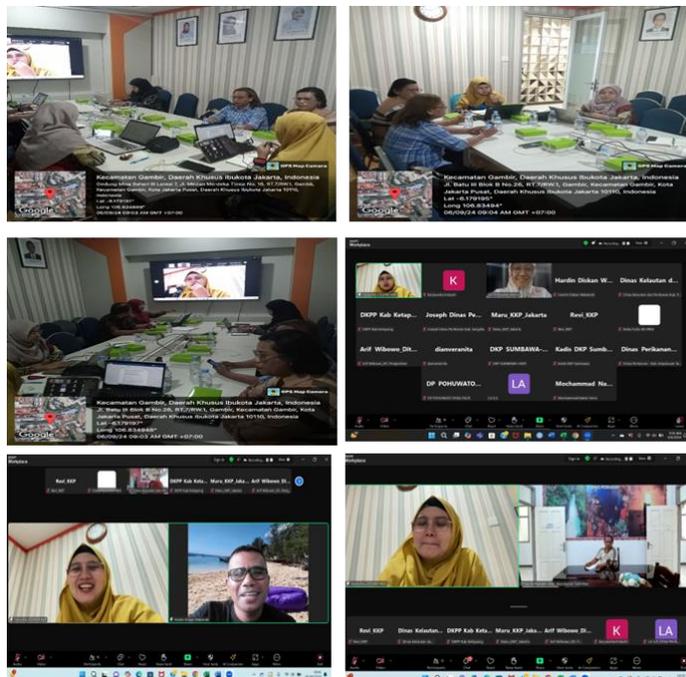
#### 8) DKP Kabupaten Tanimbar Maluku

- Pabrik es dibangun melalui dana TP tahun 2016
- Kapasitas 10 ton, produksi 320 es balok dalam 1 kali proses pencetakan
- Pekerjaan fisik sudah berjalan sekitar 70-80%, sudah dilakukan mulai dari pembongkaran sampai pengecatan. Ditargetkan selesai Oktober 2024.
- Kendala yang dihadapi adalah biaya listrik yang relatif besar.

#### 9) Kabupaten Lombok Timur NTB dan Kabupaten Donggala tidak hadir.

#### • Penutup:

Kegiatan ditutup oleh Katimja PUP2MB, diharapkan semua proses pekerjaan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai target, dimohon DKP lebih aktif dalam memantau dan mengawal proses rehab yang masih berjalan serta dapat melaporkannya secara tertulis ke pusat.



Gambar 8. Rapat Koordinasi Berkala Pabrik Es yang dibangun oleh pemerintah

## 5. Rapat Monitoring Kegiatan Pendataan dan Penginputan Sarana Prasarana dan

## Volume Produk Olahan UPI Skala Menengah Besar

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat Monitoring Kegiatan Pendataan dan Penginputan Sarana Prasarana dan Volume Produk Olahan UPI Skala Menengah Besar dilaksanakan pada 19 September 2024 di ruang rapat Karagenan, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 14, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta , rapat dilaksanakan secara hybrid.

- Peserta:

Rapat dipimpin oleh Katimja PUP2MB dan secara offline dihadiri oleh perwakilan Seditjen. PDSPKP, Dit. Pengolahan, dan Pusdatin KKP.

- Tujuan Kegiatan:

Rapat bertujuan untuk memonitor kegiatan pendataan dan penginputan sarana prasarana dan volume produk olahan UPI skala menengah besar yang dilakukan oleh enumerator.

- Pembahasan:

Berikut poin- poin yang dapat dilaporkan dalam rapat tersebut.

- a. Katimja PUP2MB dalam sesi pembukaan menyampaikan tujuan pelaksanaan rapat ini , yaitu untuk mengetahui progress kegiatan pendataan serta penginputan data, tidak hanya itu melalui pertemuan ini juga agar enumerator dapat menyampaikan kendala yang dihadapi.
- b. Pada kesempatan ini, masing-masing enumerator menyampaikan update pendataan serta penginputan yang sudah dilakukan, permasalahan serta rencana penyelesaian:
  - 1) Sulawesi Selatan (Satriani Saleh)
    - Data sudah ada sejak hingga bulan Juli, dan data diperoleh saat turun lapangan SKP, namun data belum diinput karena belum mengetahui cara menginput ke system.
    - Tim Direktorat Pengolahan telah menyampaikan buku panduan penginputan dan telah dilakukan uji coba mandiri penginputan data sarpras, dan akan dipantau progres atau permasalahan lebih lanjut.
  - 2) Sulawesi Selatan (Nurliana Arfah)
    - Enumerator belum melakukan penginputan, karena sebagian UPI yang pengajuan SKP baru selain itu enumerator bukan pembina mutu sehingga tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pendataan

di UPI, sehingga diperlukan SK atau Surat Tugas yang menguatkan enumerator agar bisa masuk kedalam UPI

- Tim Data PDS akan segera mengirimkan SK Tim Enumerator ke Grup untuk sebagai dasar melakukan pendataan ke UPI
- 3) Nusa Tenggara Barat (Lalu Very Satriyadiwangsy)
- Progres penginputan dari target 7 UPI, 5 diantaranya kooperatif dan sudah diinput, namun 2 diantaranya lokasi cukup jauh namun sudah komitmen untuk bersedia didata. 5 UPI sudah diinput data sarprasnya namun VPO belum seluruhnya diinput dan akan segera diinput.
  - Untuk 2 input yang belum apabila data masih belum didapatkan perlu ada alternatif solusi, sebab di sistem sudah ditetapkan populasinya, sehingga tidak bisa diubah jadi diharapkan kedua UPI tersebut tetap bisa memberikan datanya.
- 4) Lampung (Totok Bambang Ismanta)
- Sampel ada 7 dari populasi yang ditetapkan ada 9. untuk kunjungan baru sekali dilakukan jadi untuk pendataan melalui telpon saja dengan QC. Sampel sudah dilakukan penginputan sarpras dan volume produksi hingga bulan Juli, dan untuk CPB sudah sampai bulan Agustus.
  - Diusahakan dalam minggu ini enumerator akan melakukan komunikasi lagi untuk melanjutkan pendataan selanjutnya.
- 5) Kalimantan Barat (Rohemah)
- Belum dilakukan penginputan lagi, sampel yang diminta ada 7 tetapi yang diinput baru 4 dan untuk volume 3 diantaranya sudah diinput hingga bulan 8 dan 1 diantaranya baru 6 bulan
  - Untuk 3 UPI yang belum didata saat ini masih dilakukan komunikasi agar bersedia untuk didata, jika sudah mendapatkan data akan segera diinputkan.
- 6) Papua Barat (Fajar Kurniawan)
- Belum dilakukan penginputan sebab petugas merupakan petugas enumerator baru untuk pendataan UPI MB.

- Mayoritas UPI MB ada di Kota Sorong, sedangkan Kota tersebut sudah menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan UPI yang ada di Kabupaten Kaimana lokasi cukup jauh sehingga perlu membangun komunikasi dulu
- Terkait UPI MB yang lokasi di Kota Sorong, perlu pembahasan lanjut apakah UPI tersebut tetap bisa diinput oleh Dinas Papua Barat atau Dinas Provinsi yang baru, sebab UPI MB tersebut merupakan UPI lama yang pernah berkomunikasi dengan Dinas Papua Barat, namun dikarenakan sudah diwalayah yang beda maka tetap diperlukan komunikasi dengan Papua Barat Daya.

7) Nusa Tenggara Timur (Salma Baharuddin)

- Sudah melakukan penginputan jenis kegiatan pengolahan pembekuan 5 UPI sampai dengan Bulan Juni, untuk penggaraman/pengeringan belum dilakukan penginputan, dan untuk olahan rumput laut lokasinya cukup jauh dan belum pernah dicoba untuk pendataan melalui telpon.
- Penggaraman/Pengeringan tidak melakukan pengolahan, UPI hanya mengumpulkan/menerima yang kemudian dikirim ke Flores. dan UPI tersebut merupakan satu-satunya UPI Penggaraman/Pengeringan yang terdaftar di populasi, sehingga tidak ada alternatifnya.

8) Bali (Ni Ketut Wijasari)

- Petugas dari BPPMHKP dan belum pernah mengikuti workshop atau sosialisasi pendataan sebelumnya sehingga belum dilakukan penginputan sama sekali.
- target sampel untuk provinsi bali ada 18 Unit Pengolahan Ikan yang telah ditetapkan jumlahnya dari masing-masing jenis kegiatan pengolahan
- enumerator akan didampingi untuk segera melakukan pendataan dan penginputan pada sistem oleh tim data PDS dan tim data PBM

9) Maluku (Hilda Madubun)

- Target sampel terdapat 8 UPI dengan 7 diantaranya merupakan pembekuan dan 1 merupakan segar/dingin.

- telah dilakukan 4 UPI dengan diantaranya sudah ber HACCP, sedangkan sisanya belum dapat dihubungi dengan kendala jaringan hingga nomor tidak dapat dihubungi.
- dari 4 UPI yang sudah diinput sampai dengan semester 1
- untuk UPI yang belum bisa dihubungi dapat dikoordinasikan dengan dinas atau penyuluh untuk membantu komunikasi

10) Papua (Angganita H Rumakito)

- Belum dilakukan penginputan sama sekali, sebab bersamaan dengan persiapan akreditasi, karena enumerator juga merupakan petugas lab.
- Sempat dilakukan komunikasi dengan 1 UPI tetapi belum ada respon untuk data sarprasnya, tetapi untuk yang volume sudah diisi kuesionernya dan akan segera diinput

11) Kalimantan Timur (Heliana)

- Pendataan sarpras ada 3 UPI yang menjadi target sampel, namun ada UPI yang keberatan ketika diklasifikasikan sebagai UPI Menengah Besar sehingga tidak didapatkan datanya.
- Ada satu UPI di Balikpapan, memiliki pendataan yang bagus namun tidak masuk dalam populasi sehingga tidak dapat diinput datanya.
- Ada UPI yang mengirimkan data sesuai dengan model data standar perusahaan sendiri, tidak sesuai kuesioner yang PDS berikan

12) Aceh (Yuni Asriani)

- Belum dilakukan penginputan karena petugas dari BPPMHKP dan belum pernah mengikuti workshop atau sosialisasi pendataan sebelumnya sehingga belum dilakukan penginputan sama sekali.
- target sampel untuk provinsi Aceh ada 6 Unit Pengolahan Ikan yang telah ditetapkan jumlahnya dari masing-masing jenis kegiatan pengolahan
- enumerator akan didampingi untuk segera melakukan pendataan dan penginputan pada sistem oleh tim data PDS dan tim data PBM



Gambar 9. Rapat Monitoring Kegiatan Pendataan dan Penginputan Sarana Prasarana dan Volume Produk Olahan UPI Skala Menengah Besar

## Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan

### IK 2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)

Rekomendasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam International Classification for Standards (ICS). Komtek tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat. Instansi teknis tersebut salah satunya adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang membentuk dan mengelola Keanggotaan dan Kesekretariatan Komtek 65-05 Produk Perikanan dan Komtek 65-08 Produk Perikanan Nonpangan. Kedua Komtek tersebut memiliki tugas dalam perumusan dan penyusunan SNI produk perikanan dan produk perikanan nonpangan. Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan : 1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; 2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat; 3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan

RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (e-balloting) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di website SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan yang disediakan (produk)	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang disediakan (produk) pada Triwulan III Tahun 2024 belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan indikator tersebut bersifat tahunan sehingga capaian baru terlihat pada triwulan IV. Adanya persamaan jumlah target dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 15 produk hasil kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja rancangan RSNI produk hasil kelautan yang diimplementasikan dengan pagu Rp 1.198.191.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 1.080.433.260,- atau sebesar 90,17% dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III ini adalah:

- a. Kehadiran anggota komite teknis baik 65-05 dan 65-08 yang tidak bisa hadir seluruhnya;
- b. Belum tercapainya konsensus untuk RSNI Pengemasan ikan segar atau ikan hidup maupun yang sejenisnya dan metode pengemasannya melalui sarana transportasi udara karena didalam dokumen RSNI terdapat hak

paten, dimana setelah dilakukan pengecekan hak patennya sudah tidak berlaku;

- c. Belum tercapainya konsensus untuk RSNI Bubuk ekstrak albumin ikan gabus (*Channa striata*) sebagai sumber albumin - syarat mutu dan pengolahan karena perlu dilakukan validasi pengujian albumin.

Adapun faktor keberhasilan pada triwulan III adalah telah tercapainya konsensus untuk 9 RSNI Produk Perikanan dan 6 RSNI Produk Perikanan Nonpangan yang selanjutnya dapat dikirimkan ke BSN untuk tahap jajak pendapat.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah

- a. Untuk tercapainya kuorum anggota komite teknis saat pembahasan RSNI perlu dilakukan koordinasi intensif;
- b. Melakukan koordinasi dengan BSN terkait pencantuman hak paten yang sudah tidak berlaku didalam dokumen SNI;
- c. Melakukan koordinasi dengan laboratorium IPB untuk melaksanakan validasi pengujian albumin.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) :

#### 1. Rapat Definisi Proses dalam RSNI Produk Perikanan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat dilaksanakan secara telekonferensi melalui aplikasi zoom pada tanggal 8 Juli 2024.

- Peserta:

Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-06 Produk Perikanan, Perwakilan BSN dan Sekretariat Komtek 65-05 Produk Perikanan.

- Tujuan Kegiatan:

Rapat dilaksanakan terkait transformasi format “Definisi Proses” SNI Produk Perikanan dari tahun 2016 – 2023

- Pembahasan:

Dari tahun 2016-2023 definisi proses menggunakan urutan proses, mencakup proses utama. Pada standar Codex, definisi proses didefinisikan tersendiri (bukan urutan proses). Proses yang didefinisikan merupakan proses utama

yang dilakukan untuk membuat suatu produk. Anggota Komtek peserta rapat menyetujui sepakat “definisi proses” menggunakan format standar Codex, dengan alasan sebagai berikut:

- a. “Definisi proses” bukan merupakan urutan atau rangkaian proses. Untuk rangkaian proses telah diakomodir di lampiran dalam bentuk diagram alir yang sifatnya informatif.
- b. Penggunaan redaksi “dengan atau tanpa” dan “melalui sebagian atau seluruh tahapan” memberikan pengertian opsional pada tahapan proses yang digunakan, sedangkan dalam rangkaian tahapan proses terdapat proses utama (main process) yang wajib dilakukan (bukan opsional). Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikan standar.
- c. Penggunaan format Codex merupakan bentuk harmonisasi dengan standar Codex.
- d. Isi definisi produk yang akan dicakup dalam SNI adalah proses utama (main process) dari SNI produk tersebut.
- e. Proses yang didefinisikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami pelaku usaha dan dapat diterapkan.
- f. Definisi proses dapat menggunakan persyaratan yang fleksibel misalnya menggunakan “rentang” atau batasan minimum/maksimum. Dapat juga tidak menggunakan (fleksibel), disesuaikan dengan substansi.

- **Kesimpulan:**

Anggota Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan yang hadir pada rapat dimaksud, menyetujui bahwa “Definisi Proses” dalam RSNi Produk Perikanan mengadopsi format “Definisi Proses” dalam standar Codex. Untuk Anggota Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan yang tidak hadir dalam rapat, diputuskan untuk memberikan tanggapan tertulis.

## 2. Rapat Teknis RSNi2 Produk Perikanan Pembahasan Definisi Proses

- **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:**

Rapat dilaksanakan tanggal 22-23 Juli 2024, rapat dilaksanakan secara hybrid di RR SKP It 13, GMB 3 dan melalui zoom.

- **Peserta:**

Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-05, Konseptor, sekretariat komtek 65-05, editor RSNi produk perikanan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal – BSN.

- Tujuan Kegiatan:

Tujuan rapat membahas tentang deskripsi produk perumusan standar.

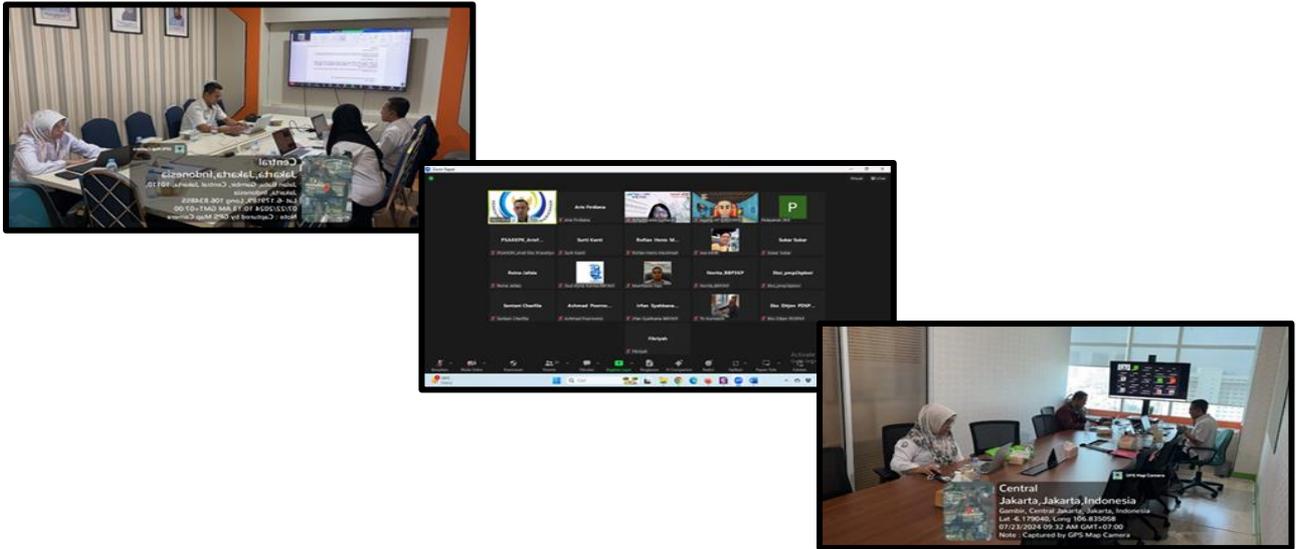
- Pembahasan

Rapat Teknis membahas deskripsi proses untuk 7 RSNi Produk Perikanan yaitu Ikan renyah, Bandeng duri lunak, Ikan asap dengan pengasapan dingin, Kerupuk ikan, udang dan moluska, Bandeng isi, Kukis ikan, Hidrolisat Protein Ikan. Beberapa pembahasan yang disepakati antara lain :

- a. Judul RSNi Ikan renyah perlu disesuaikan dengan deskripsi produk karena ikan renyah bukan nama ikan tetapi nama produk.
- b. Penyempurnaan Pasal 4 Deskripsi RSNi ikan renyah menjadi kata definisi diubah menjadi deskripsi. Subpasal 4.2 Deskripsi proses Ikan renyah diproses melalui pemberian bumbu dan penggorengan hingga renyah.
- c. Penyempurnaan Sub Pasal 4.2 Deskripsi proses Produk bandeng duri lunak diproses melalui penambahan bumbu, pemasakan pada suhu tinggi (menggunakan tekanan atau tidak) kemudian dilakukan pendinginan.
- d. Penyempurnaan Sub Pasal 4.2 Deskripsi proses kukis ikan diproses melalui pengadonana, pencetakan, dan pemanggangan
- e. Penyempurnaan Sub Pasal 4.1 Deskripsi produk dan 4.2 Deskripsi proses untuk RSNi ikan asap dengan pengasapan dingin, RSNi kerupuk ikan, Udang dan moluska, RSNi Bandeng isi dan RSNi Hidrolisat Protein Ikan

- Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pembahasan RSNi2 yang telah dilaksanakan secara online, selanjutnya konseptor melakukan perbaikan konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat konsensus RSNi3 65-05.



Gambar 10. Rapat Teknis RSNi2 Produk Perikanan Pembahasan Defnisi Proses

### 3. Rapat RSNi2 Produk Perikanan Non-pangan

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada hari Rabu - Jumat tanggal 31 Juli - 2 Agustus 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui pertemuan secara langsung dan telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

- Peserta

Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-08, konseptor, sekretariat komtek 65-08 sekaligus editor RSNi Produk Perikanan Nonpangan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal–BSN. Rapat dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu selaku Ketua Komtek 65-08.

- Tujuan Kegiatan

Tujuan rapat membahas teknis RSNi produk perikanan nonpangan

- Pembahasan

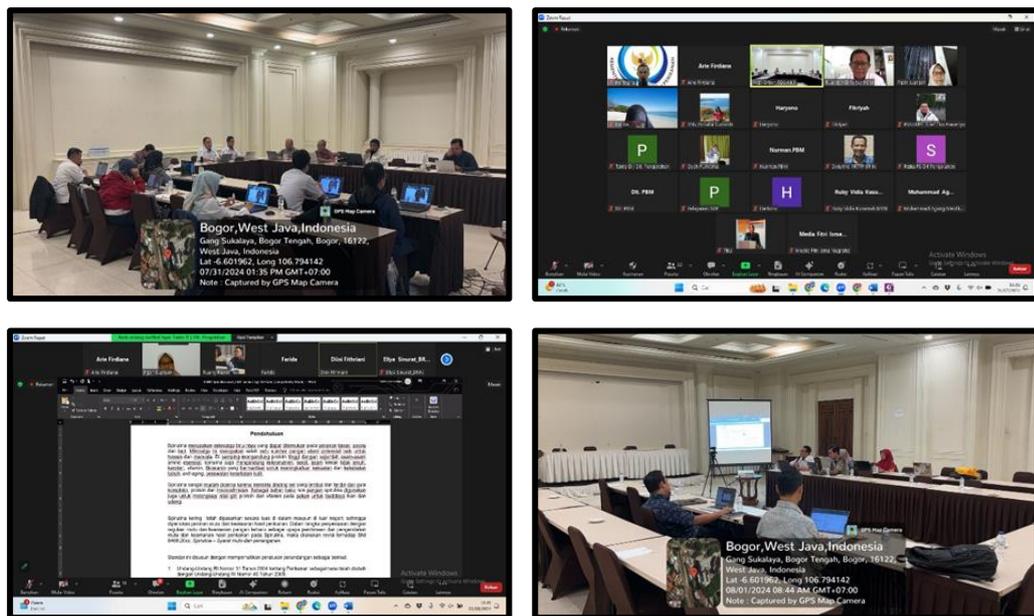
Rapat teknis membahas 7 RSNi Produk perikanan nonpangan yaitu Tanaman hias air mikrosorum (*Micosorum pteropus*) – Syarat mutu dan penanganan, Ikan hias cardinal – Syarat mutu dan penanganan, Ikan hias mas koki (*Carassius auratus*) – Syarat mutu dan penanganan, Ikan hias guppy (*Poecilia spp.*) – Syarat mutu dan penanganan, Ikan hias rainbow (*Melanotaenia sp.*) – Syarat mutu dan penanganan, Spirulina spp. kering – Syarat mutu dan

pengolahan, Bubuk ekstrak albumin ikan gabus (*Channa striata*) sebagai sumber albumin - syarat mutu dan pengolahan.

Pada rapat teknis RSNi2 65-08 ini membahas konsep yang telah disusun oleh konseptor berupa RSNi2 berdasarkan data dukung dan literatur. Kegiatan rapat teknis RSNi2 65-08 ini dilaksanakan selama 3 hari yang terbagi menjadi 3 sesi pada setiap harinya. Masing-masing sesi diberikan waktu kurang lebih 90 menit yang terdiri dari pembahasan konsep RSNi2 berupa presentasi konsep oleh masing-masing konseptor dan diskusi oleh seluruh peserta rapat.

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan RSNi2 yang telah dilaksanakan secara offline dan online, Komite Teknis menyepakati 7 dokumen RSNi2 yang telah dibahas. Selanjutnya konseptor melakukan perbaikan konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat konsensus RSNi3 65-08.



Gambar 11. Rapat RSNi2 Produk Perikanan Non-pangan

#### 4. Rapat Teknis RSNi Produk Perikanan

- **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:**

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, Jum'at tanggal 13,14,16 Agustus 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui pertemuan secara langsung dan telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom Meet.

- Peserta

Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-05, Konseptor, sekretariat komtek 65-05 sekaligus editor RSNi produk perikanan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal – BSN. Rapat dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu selaku Sekretaris Komtek 65-05.

- Tujuan Kegiatan:

Tujuan rapat membahas tentang pembahasan teknis RSNi2 pasal Istilah dan Definisi dan pasal Deskripsi untuk RSNi Kukis ikan, RSNi Hidrolisat Protein Ikan dan RSNi Pengemasan Ikan Hidup atau Ikan Segar untuk Transportasi Udara.

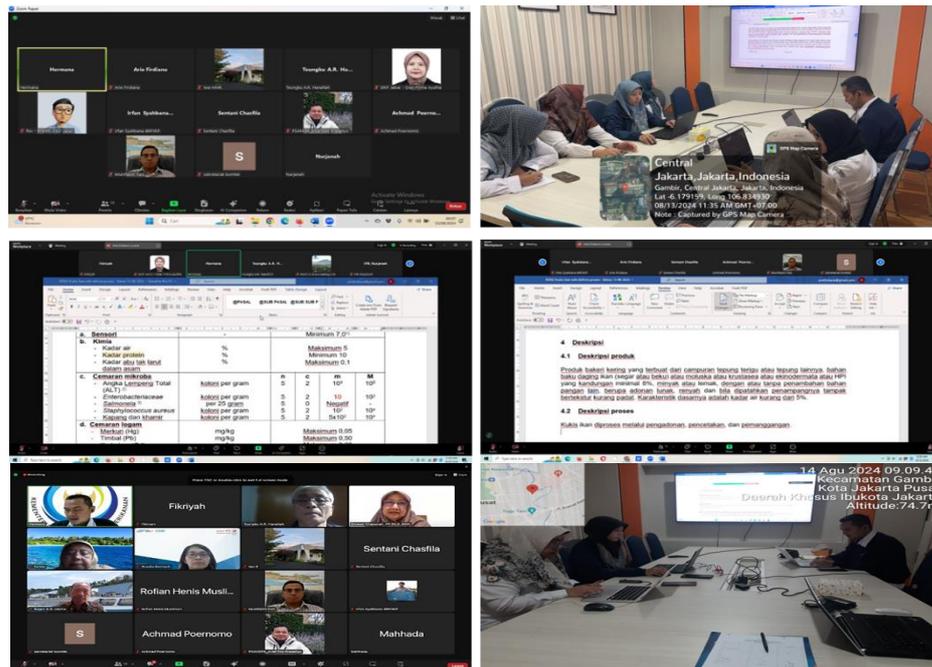
- Pembahasan

Beberapa hal yang disepakati antara lain :

- a. Pada RSNi Kukis ikan terdapat perbaikan pada subpasal 3.2 pengadonan dan 3.3 pencetakan, penyempurnaan pasal 4.1 deskripsi produk serta perubahan subpasal 5.4 bahan pangan lainnya dan pasal 6 Syarat mutu dan keamanan.
- b. Pada RSNi Hidrolisat Protein Ikan terdapat penyempurnaan pasal 1 ruang lingkup, subpasal 3.1 hidrolisis enzimatis, subpasal 3.6 peptida, subpasal 7 pengambilan contoh.
- c. Pada RSNi Pengemasan Ikan Hidup atau Ikan Segar untuk Transportasi Udara terdapat penyempurnaan pasal 1 ruang lingkup, subpasal 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 dan penghapusan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan ruang lingkup komtek 65-05.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan RSNi2 yang telah dilaksanakan secara online, selanjutnya konseptor melakukan perbaikan konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat konsensus RSNi3 65-05.



Gambar 12. Rapat Teknis RSNi Produk Perikanan

## 5. Rapat Teknis RSNi2 Produk Perikanan Non-pangan

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, melalui pertemuan secara langsung dan telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

- Peserta

Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-08, Konseptor, sekretariat komtek 65-08 sekaligus editor RSNi produk perikanan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal – BSN.

- Tujuan

Tujuan rapat membahas tentang rapat teknis RSNi2 Spirulina spp. kering – Syarat mutu dan pengolahan

- Pembahasan

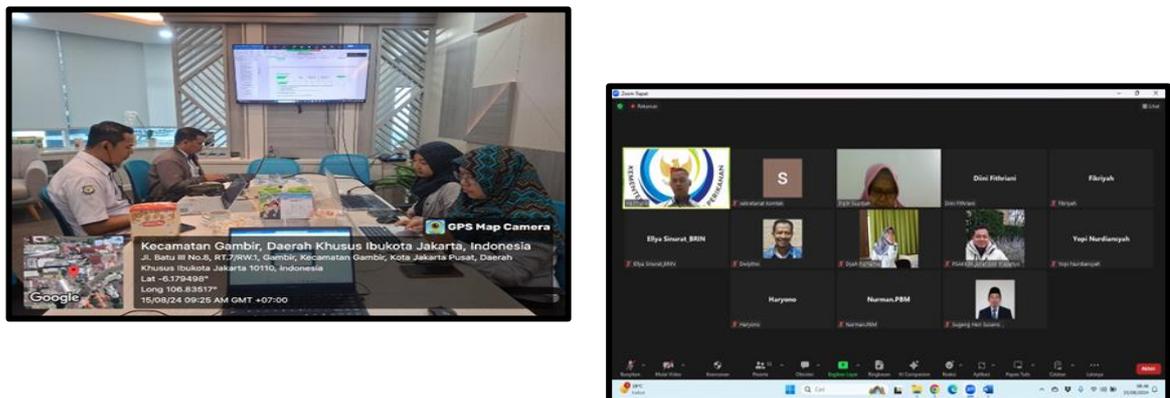
Pada rapat RSNi2 65-05 ini membahas teknis RSNi2 Spirulina kering antara lain disepakati beberapa hal berikut :

- a. Perubahan Judul menjadi Spirulina (*Arthrospira* spp.) kering – Syarat mutu dan pengolahan.

- b. Penyempurnaan Ruang lingkup menjadi Standar ini menetapkan syarat mutu, keamanan dan penanganan atau pengolahan spirulina sebagai bahan baku untuk industri, suplemen, kosmetik, dan pakan. Standar ini tidak berlaku untuk spirulina yang mengalami pengolahan lebih lanjut.
- c. Penyempurnaan subpasal 3.7 biomassa, subpasal 4.1 Deskripsi produk, subpasal 4.2 deskripsi proses, subpasal 3.6 panelis, subpasal 9 pemanenan.
- d. Perbaikan pasal 6 syarat mutu dan keamanan, perbaikan alur proses dan spesifikasi kenampakan.

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan RSNi2 Spirulina kering yang telah dilaksanakan secara hybrid, selanjutnya konseptor melakukan perbaikan konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat konsensus RSNi3 65-08.



Gambar 13. Rapat Teknis RSNi2 Produk Perikanan Non-pangan

## 6. Rapat Konsensus RSNi3 Produk Perikanan

- **Waktu dan tempat pelaksanaan**

Rapat dilaksanakan pada hari Senin - Jum'at Jum'at tanggal 9 - 13 September 2024, melalui pertemuan secara langsung dan telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

- **Peserta**

Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-05, Konseptor, sekretariat komtek 65-05 sekaligus editor RSNi produk perikanan serta perwakilan dari Direktorat

Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal – BSN dan petugas TPMS dari BSN. Rapat dibuka oleh Direktur Pengolahan selaku Sekretaris Komtek 65-05.

- Tujuan

Tujuan rapat melaksanakan pembahasan konsensus RSNI3 Produk Perikanan.

- Pembahasan

Rapat konsensus membahas 10 RSNI Produk Perikanan yaitu Ikan renyah, Bandeng duri lunak, Ikan asap dengan pengasapan dingin, Kerupuk ikan, udang dan moluska, Bandeng isi, Kukis ikan, Pegemasan ikan segar atau ikan hidup maupun yang sejenisnya dan metode pengemasannya melalui sarana transportasi udara, Cara uji fisika - Bagian 8 Penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan sterilisasi komersial, Cara uji kimia: penentuan kadar timah (Sn) pada produk perikanan dengan Hydride - spektroskopi serapan atom (HG-AAS), Hidrolisat Protein Ikan.

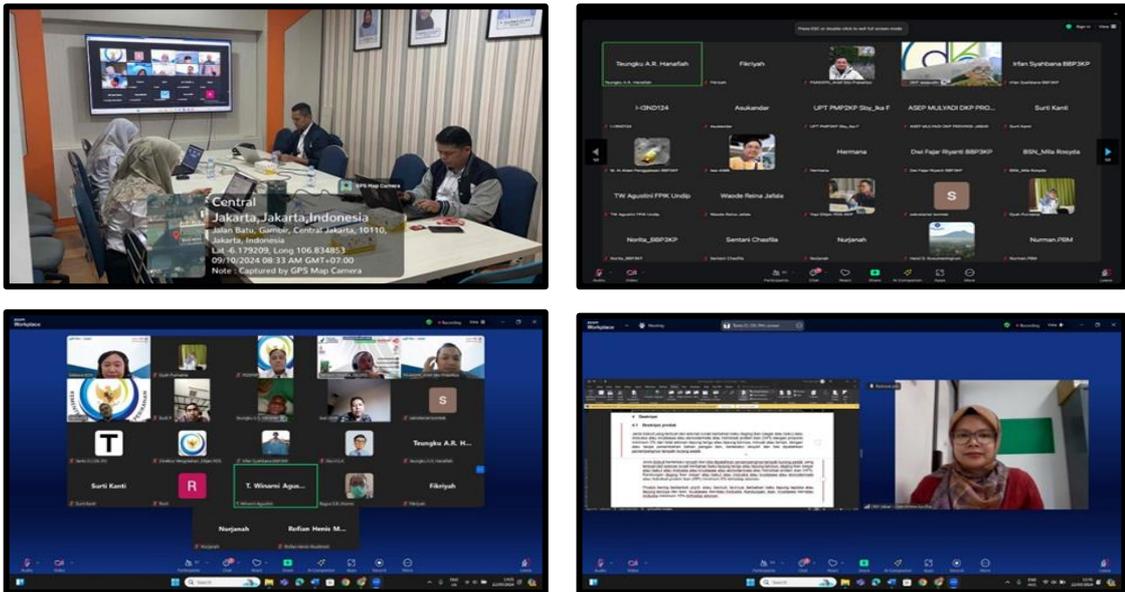
Pada rapat konsensus RSNI 65-05 ini dibahas untuk menyepakati substansi teknis dari dokumen RSNI2 yang telah disusun oleh konseptor. Dokumen telah mendapatkan perbaikan dari hasil pembahasan rapat teknis RSNI sebelumnya. Kegiatan konsensus 65-05 ini dilaksanakan selama 5 hari yang terbagi menjadi 2 sesi pada setiap harinya. Masing-masing sesi diberikan waktu kurang lebih 120 menit yang terdiri dari untuk presentasi dokumen RSNI2 oleh masing-masing konseptor dan diskusi oleh seluruh peserta rapat.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada rapat konsensus RSNI3 yang telah dilaksanakan secara virtual, Komite Teknis menyepakati 9 dokumen RSNI2 yang telah dibahas dalam konsensus untuk menjadi RSNI3. Selanjutnya konseptor melakukan perbaikan dokumen hasil pembahasan sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dikirimkan kepada BSNI dan dinaikkan dalam tahapan jajak pendapat.

RSNI Pegemasan ikan segar atau ikan hidup maupun yang sejenisnya dan metode pengemasannya melalui sarana transportasi udara tidak dapat dilanjutkan ke tahap rapat konsensus karena didalam dokumen RSNI terdapat hak paten, dimana setelah dicek hak patennya sudah tidak berlaku tetapi

konseptor tetap meminta untuk dicantumkan. Akan dikornidasikan dengan BSN dan pihak terkait sehubungan dengan penggunaan paten tersebut.



Gambar 14. Rapat Konsensus RSNi3 Produk Perikanan

## 7. Rapat Konsensus RSNi3 Produk Perikanan Non-pangan

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada hari Selasa - Jumat tanggal 17 - 20 dan 24 September 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui pertemuan secara langsung dan telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

- Peserta

Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-08, konseptor, sekretariat komtek 65-08 sekaligus editor RSNi Produk Perikanan Nonpangan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal – BSN dan petugas TPMS dari BSN. Rapat dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu selaku Ketua Komtek 65-08.

- Tujuan

Tujuan rapat melaksanakan pembahasan konsensus RSNi3 Produk Perikanan Nonpangan.

- Pembahasan

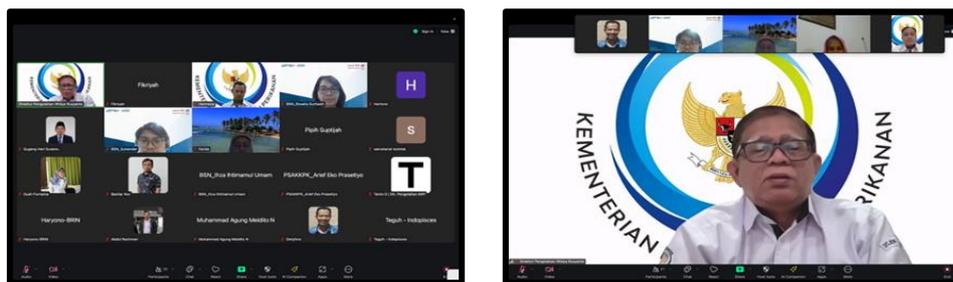
Rapat konsensus membahas 7 RSNi Produk Perikanan Nonpangan yaitu: Ikan hias mas koki (*Carassius auratus*) – Syarat mutu dan penanganan, Bubuk

ekstrak albumin ikan gabus (*Channa striata*) sebagai sumber albumin - syarat mutu dan pengolahan, Tanaman hias air mikrosorum (*Micosorum pteropus*) – Syarat mutu dan penanganan, Ikan hias rainbow (*Melanotaenia sp.*) – Syarat mutu dan penanganan, Ikan hias guppy (*Poecilia spp.*) – Syarat mutu dan penanganan, Ikan hias cardinal – Syarat mutu dan penanganan, Spirulina spp. kering – Syarat mutu dan pengolahan.

Pada rapat konsensus RSNi 65-08 ini dibahas untuk menyepakati substansi teknis dari dokumen RSNi2 yang telah disusun oleh konseptor. Dokumen telah mendapatkan perbaikan dari hasil pembahasan rapat teknis RSNi sebelumnya. Kegiatan rapat konsensus RSNi3 65-08 ini dilaksanakan selama 4 hari yang terbagi menjadi 2-3 sesi pada setiap harinya. Masing-masing sesi diberikan waktu kurang lebih 90 menit yang terdiri dari pembahasan konsep RSNi3 berupa presentasi konsep oleh masing-masing konseptor dan diskusi oleh seluruh peserta rapat.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan RSNi3 yang telah dilaksanakan secara offline dan online, Komite Teknis menyepakati 6 dokumen RSNi3 yang telah dibahas, dan 1 dokumen RSNi3 perlu dilakukan rapat konsensus kembali. Selanjutnya konseptor melakukan perbaikan editorial konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan jajak pendapat.



Gambar 15. Rapat Konsensus RSNi3 Produk Perikanan Non-pangan

### Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan

## IK 3. Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)

### Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat

Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) Sesuai amanah UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh SKP. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, dinyatakan bahwa SKP merupakan salah satu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yaitu perizinan yang diperlukan.

Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) / Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)	478	840	1590	10.000	478	962	1771	2.487	100,00	24,87	-50,31	-73,01

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan III tahun 2024 capaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) adalah 478 produk. Capaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) sampai dengan triwulan

III adalah sebesar 2.487 produk atau menurun sebesar 50,31% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 2.009 produk. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 478 produk atau setara 73,01% terhadap capaian triwulan III tahun 2023 yakni 1.771 produk, yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 10.000 produk, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 24,87%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) sebesar Rp 1.500.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 1.039.236.824,- atau sebesar 69,28% dari pagu anggaran.

Beberapa kendala dalam penerbitan SKP di Triwulan III adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat perubahan organisasi serta tugas dan fungsi direktorat pengolahan dan bina mutu menjadi direktorat pengolahan. Oleh karena itu, sejak tanggal 30 Juli 2023, penerbitan SKP tidak dilakukan oleh direktorat pengolahan melainkan oleh BPPMHKP sehingga capaian penerbitan SKP di TW III hanya ada di bulan Juli 2024
- b. Terdapat perizinan berusaha yang dimiliki oleh pelaku usaha terverifikasi atau belum memenuhi kaidah perizinan berusaha yang dipersyaratkan dalam penerbitan SKP.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) adalah

- a. Pelaksanaan gerai SKP di beberapa wilayah mempercepat capaian penerbitan SKP, khususnya untuk pelaku usaha skala mikro kecil.
- b. Partisipasi aktif penyuluh perikanan dalam membantu pembina mutu di daerah pada saat pelaksanaan gerai SKP.

Rekomendasi yang akan dilaksanakan untuk kegiatan kedepannya :

- a. Melakukan koordinasi dengan BPPMHKP dalam proses pembinaan dan sertifikasi SKP

- b. Melakukan koordinasi dengan pembina mutu di daerah dalam hal pembinaan dan penerbitan SKP sehubungan dengan perubahan organisasi KKP.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk).

#### 1. Bimbingan Teknis Penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point*

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 21 - 23 Agustus 2024. Kegiatan dilaksanakan secara offline di Wisma Glacilaria di Jl. Pulo Mas Utara I No.68, RT.7/RW.14, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Peserta

Dihadiri oleh 35 orang Pembina Mutu lingkup Direktorat Pengolahan. Dengan narasumber Drh. Novia Priyana, Tenaga Ahli Mutu (UNIDO, GQSP Indonesia).

- Tujuan

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan personil Pembina Mutu untuk mendukung sistem pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, maka perlu dilakukan peningkatan *capacity building* dan refreshment bagi para Pembina Mutu.

- Pembahasan

Materi bimtek meliputi pemahaman dan penerapan HACCP berbasis Prinsip Umum Higiene Pangan (CXC 1-1969 2020, 2022), Identifikasi Bahaya Pangan pada Produk Perikanan (CXC 52-2—3 Code of Practice for Fish and Fishery Products) dan Lima Langkah Preliminary HACCP dan 7 Prinsip HACCP. Untuk membantu peserta melaksanakan pembinaan UPI menuju HACCP dilaksanakan observasi ke UKM Siomai Chipsy yang saat ini tengah mengajukan Sertifikasi HACCP ke BP2MHKP.

- Kesimpulan

Peserta Bimtek ini diharapkan dapat memberikan pelatihan serupa kepada para Pembina Mutu di Daerah.



Gambar 16. Bimbingan Teknis Penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point*

## 2. Refreshment HACCP untuk Pembina Mutu Ahli Muda dan Madya lingkup Direktorat Jendral PDSPKP

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Kegiatan dilaksanakan secara offline di Ruang Rapat Arwana, Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Peserta

Dihadiri oleh 35 orang Pembina Mutu Ahli Muda dan Madya. Pemateri Refreshment HACCP disampaikan oleh Tenaga Ahli Mutu (UNIDO, GQSP Indonesia) Drh. Novia Priyana.

- Tujuan

Kegiatan bertujuan untuk peningkatan *capacity building* dan refreshment para Pembina Lingkup Dirjen PDSPKP.

- Pembahasan

Hadir narasumber dari BP2MHKP yang menyampaikan proses bisnis SKP dan HACCP. Disepakati bahwa Ditjen PDSPKP dan BP2MHKP akan menyelaraskan kegiatan pembinaan yang merupakan tugas Ditjen PDSPKP dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang merupakan tugas BP2MHKP.



Gambar 17. Refreshment HACCP untuk Pembina Mutu Ahli Muda dan Madya lingkup Direktorat Jendral PDSPKP

### 3. Pembinaan Mutu menuju HACCP terhadap PT. Tilapia Nusantara Jaya, Semarang

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024, di PT. Tilapia Nusantara Jaya berlokasi di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang, Jawa Tengah.

- Peserta

Tim PT. Tilapia Nusantara Jaya dan Tim Pembina Mutu yang terdiri dari Pembina Mutu Pusat, Pembina Mutu Daerah, Tenaga Ahli dari FPIK UNDIP (Prof. Tri Winarni).

- Tujuan

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendampingi UPI meningkatkan daya saing Dit. Pengolahan melaksanakan pembinaan mutu yang diarahkan untuk meningkatkan grade SKP dan Persiapan Menuju Sertifikat HACCP.

- Pembahasan

PT. Tilapia Nusantara Jaya (TNJ) menghasilkan fillet beku. PT. TNJ diharapkan dapat memperkuat program hilirisasi ikan tilapia serta dapat meningkatkan ekspor tujuan Amerika. Untuk mendampingi UPI agar dapat meningkatkan daya saing, Dit. Pengolahan melakukan pembinaan mutu yang bertujuan untuk meningkatkan grade SKP dan persiapan dalam menuju sertifikat HACCP.

Pembinaan mutu di PT. TNJ dilaksanakan oleh Tim Pembina Mutu yang terdiri dari Pembina Mutu Pusat, Pembina Mutu Daerah, Tenaga Ahli dari FPIK UNDIP (Prof. Tri Winarni), dan Tim PT. TNJ. Tim Pembina Mutu memberikan

sejumlah saran perbaikan dan memberikan pendampingan penyusunan Manual HACCP.



Gambar 18. Pembinaan Mutu menuju HACCP terhadap PT. Tilapia Nusantara Jaya, Semarang

#### 4. Persiapan Pembinaan HACCP bagi PT. Bintang Intan Gemilang

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada hari Selasa, 17 September 2024 di Ruang Direktur Pengolahan, GMB 3, Lt 13 KKP.

- Peserta

Rapat dilaksanakan secara hibrid yang dihadiri oleh Pimpinan PT. Bintang Intan Gemilang (PT. BIG), Pakar Mutu (Drh. Novia Priyana), perwakilan Katimja dan Pembina Mutu lingkup Dit. Pengolahan.

- Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk mendukung PT. BIG menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mengupgrade HACCP Rapat memberikan saran dan alternatif kepada pihak UPI terkait layout dan penambahan ruangan UPI.

- Pembahasan

Dilaksanakannya rapat Persiapan Pembinaan HACCP bagi PT. Bintang Intan Gemilang di Prov. Kep Riau yang dilaksanakan hari Selasa, 17 September 2024 di Ruang Direktur Pengolahan, GMB 3, Lt 13 KKP. Rapat dilaksanakan secara hibrid yang dihadiri oleh Pimpinan PT. Bintang Intan Gemilang (PT. BIG), Pakar Mutu (Drh. Novia Priyana), perwakilan Katimja dan Pembina Mutu lingkup Dit. Pengolahan.

PT. BIG memproduksi fillet ikan beku dan segar (komoditas : kakap, kerapu, demersal, pelagis, cephalopode). Perusahaan telah memiliki HACCP dengan grade B. Perusahaan selama ini memasarkan produk ke USA, China dan Australia. UPI bermaksud melakukan perluasan pasar ke Uni Eropa yang mempersyaratkan HACCP Grade A. Selain persyaratan HACCP, USA juga meminta agar PT. BIG untuk audit BRC dan Australia meminta pemberian CO terhadap tuna segar.



Gambar 19. Persiapan Pembinaan HACCP bagi PT. Bintang Intan Gemilang

## 5. Koordinasi Pembinaan SKP

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada tanggal 24-27 Juli 2024, kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Batam , Jl. Engku Putri No.9, Tlk. Tering, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau.

- Peserta

Kegiatan di hadiri oleh 50 orang perwakilan dari Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) se Indonesia.

- Tujuan

Kegiatan bertujuan untuk melaksanakan koordinasi pembinaan dengan laboratorium pemerintah daerah untuk turut melakukan pembinaan mutu terkait Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Kelayakan Pengolahan Ikan) dan Penerapan PMMT/HACCP untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

- Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan peran laboratorium pemerintah daerah untuk mendukung pembinaan mutu dan implementasi SNI Kelautan dan Perikanan,

pada tanggal 24-27 Juli 2024 Direktorat Pengolahan melaksanakan Temu Teknis Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Batam , Jl. Engku Putri No.9, Tlk. Tering, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Hadir 50 orang perwakilan dari Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) se Indonesia.

Kegiatan bertujuan untuk melaksanakan koordinasi pembinaan dengan laboratorium pemerintah daerah untuk turut melakukan pembinaan mutu terkait Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Kelayakan Pengolahan Ikan) dan Penerapan PMMT/HACCP untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Laboratorium dapat berperan dengan melakukan pengujian sederhana diantaranya sensori bahan baku, pengujian penggunaan bahan kimia berbahaya dan lainnya.



Gambar 20. Koordinasi Pembinaan SKP

## 6. Kegiatan Refreshment ISO 9001

- Waktu dan tempat pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 di Ruang Rapat Karagenan Lt. 14 Gedung Mina Bahari III.

- Peserta

Kegiatan di ikuti oleh 27 orang Pembina Mutu Pusat Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

- Tujuan

Kegiatan bertujuan untuk mempersiapkan Sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pasca terbitnya Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja KKP.

- Pembahasan

Refreshment ISO 9001 dilaksanakan tanggal 5 September 2024 di Ruang Rapat Karagenan Lt. 14 Gedung Mina Bahari Lt III. Kegiatan diikuti oleh 27 orang Pembina Mutu Pusat Direktorat Pengolahan – Ditjen PDSPKP.

Kegiatan bertujuan untuk mempersiapkan Sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pasca terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja KKP.

Narasumber Refreshment ISO 9001 berasal dari PT. QAI Indonesia Management System Certification. Materi kegiatan mengacu pada ISO 1900:2018 Panduan Audit Sistem Manajemen dan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan. Tim Narasumber akan menyampaikan pemahaman tentang ISO 1900:2018 dan memberikan pendampingan penyusunan dokumen dan implementasi setiap tahapan yang diperlukan dalam rangka sertifikasi ISO 9001.



Gambar 21. Kegiatan Refreshment ISO 9001

#### Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Publik Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

### IK 4. Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)

Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan merupakan jumlah data informasi industri pengolahan hasil perikanan yang berupa data losses dan utilitas

yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam satu periode waktu.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (data)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa indikator kinerja Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan bersifat tahunan sehingga pada Triwulan III 2024 belum terdapat capaian dan baru akan terlihat di Triwulan IV. Hal tersebut sama pada tahun 2023, dimana indikator kinerja tersebut pada Triwulan III belum memiliki capaian. Adanya peningkatan jumlah target, pada tahun 2023 sebanyak 2 data dan pada tahun 2024 terdapat peningkatan menjadi 3 data.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan sebesar Rp. 510.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 286.484.910,- atau sebesar 56,17 % dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III ini, adalah:

- a. Jumlah populasi Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang cukup banyak, yaitu sebanyak 68.577 unit dan lokasi tersebar di seluruh daerah.
- b. Terdapat pergantian petugas pengambilan data di provinsi/Kab/Kota sebagai sumber data profiling (validator, enumerator) yang berdampak pada pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, verifikasi dan validasi data.
- c. Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil sudah tidak aktif
- d. Padatnya jadwal kegiatan Direktorat Pengolahan khususnya tenaga ahli yang terlibat dalam penyusunan profiling

Faktor yang menjadi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III, adalah :

- a. Pelaksanaan pembinaan , monitoring dan updating pendataan dilaksanakan secara online;
- b. Pembagian wilayah pendataan menjadi 4 (empat) zonasi wilayah Provinsi/Kab/Kota yaitu wilayah Sumatera, wilayah Jawa-Bali, wilayah NTB-NTT-Sulawesi dan wilayah Kalimantan Maluku-Papua;
- c. Partisipasi aktif petugas enumerator daerah;
- d. Pelaksanaan webinar terkait data profiling sebaran usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil.

Rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya, adalah:

- a. Koordinasi intensif dengan unit kerja terkait penyusunan profiling;
- b. Pembahasan finalisasi profiling sebaran usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja profiling industri pengolahan hasil perikanan yaitu:

#### 1. Monitoring dan updating pendataan VPO Semester I Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Monitoring dan updating pendataan VPO MK (Semester I tahun 2024) secara online pada tanggal 6-9 Agustus 2024

- Peserta:

Pusdatin, Setditjen PDSPKP, Tim Data PDSPKP, Tim Validator Pusat/Daerah, Petugas Enumerator Kab/Kota

- Tujuan Kegiatan:

- a. Melakukan monitoring dan updating pendataan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan periode Semester I tahun 2024.
- b. Sinkronisasi dan integrasi data Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan periode Semester I tahun 2024.

- Pembahasan:

- a. Volume produk olahan hasil kelautan dan perikanan berdaya saing merupakan salah satu Indikator kinerja Ditjen PDSKP dengan target

sebesar 7,50 juta ton pada tahun 2024. Perhitungan volume produk olahan setara utuh segar dilakukan terhadap UPI skala Mikro Kecil (MK) dan skala Menengah Besar (MB).

- b. Pengumpulan data volume produk olahan unit pengolahan ikan tahun 2024 dilaksanakan di 38 Provinsi di Indonesia. Pendataan dilakukan terhadap 13 (tiga belas) jenis kegiatan UPI meliputi: 1) pendinginan/pengesan ikan, 2) pembekuan ikan, 3) penggaraman/pengeringan ikan, 4) pemindangan ikan, 5) pengasapan/pemanggangan ikan, 6) peragian/fermentasi ikan, 7) pengalengan ikan, 8) pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi, 9) pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, 10) pembuatan minyak ikan, 11) pengolahan rumput laut, 12) penanganan ikan, 13) pengolahan lainnya
- c. Pendataan VPO dilaksanakan oleh petugas enumerator Kabupaten/Kota berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengumpulan Data Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan

- **Kesimpulan:**

Melalui kegiatan monitoring ini maka kendala dan potensi permasalahan dalam pelaksanaan pendataan yang dihadapi oleh petugas pengolah data dapat diselesaikan.

## 2. Keikutsertaan Pada Kegiatan valnas VPO Semester I Tahun 2024

- **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:**

Hotel Royal Padjajaran – Bogor pada tanggal 11-13 September 2024. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid.

- **Peserta:**

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta offline sebanyak 28 validator provinsi, 12 validator pusat, 3 validator kab/kota, dan 11 fasilitator dan narasumber dari pusdatin. Dan peserta online terdiri dari beberapa validator provinsi, validator kab/kota, dan enumerator.

- **Tujuan Kegiatan:**

Melakukan validasi data yang telah diinput pada aplikasi oleh petugas enumerator serta hasil validasi dari petugas validator Kab.Kota.

- Pembahasan

- a. Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang keanekaragaman pangan berbasis kearifan lokal menjadi landasan hukum penting. KKP akan mendukung program ini dengan fokus pada pengembangan sumber daya perikanan, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan potensi perikanan seperti Indonesia Timur. Melalui pemanfaatan ikan lokal, diharapkan masyarakat dapat mengakses pangan bergizi dengan harga yang terjangkau, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan setempat.
- b. Provinsi yang mencatat pencapaian terbaik dalam validasi Lembar Kerja adalah Bali, Kalimantan Barat, dan Lampung, di mana semua Lembar Kerja dari provinsi-provinsi tersebut telah dinyatakan valid. Ini menunjukkan bahwa data yang diunggah dari wilayah-wilayah tersebut telah memenuhi semua standar yang diperlukan, sehingga dapat langsung digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, terdapat beberapa provinsi yang belum ada satu pun Lembar Kerjanya yang dinyatakan valid. Provinsi-provinsi tersebut adalah Gorontalo, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Hal ini menjadi perhatian khusus, karena menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan perbaikan dan validasi ulang pada Lembar Kerja dari provinsi-provinsi tersebut.

- Kesimpulan:

Pada Semester I – 2024, sebanyak 403 Lembar Kerja telah diunggah ke dalam aplikasi. Dari jumlah tersebut, tercatat bahwa 58,3% telah melalui proses validasi oleh tim yang validator. Proses validasi ini melibatkan pengecekan terhadap keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data yang disajikan dalam Lembar Kerja. Hasil validasi ini menjadi indikasi bahwa lebih dari setengah data yang diunggah telah mendapatkan perhatian dan tinjauan secara menyeluruh oleh tim validasi. Dari total Lembar Kerja yang telah divalidasi, hanya 34,7% yang dinyatakan valid sepenuhnya.

STATUS	JML LK
Open	34
Submit	11
Invalid	95
Valid	263
<b>TOTAL</b>	<b>403</b>



Gambar 22. Keikutsertaan Pada Kegiatan valnas VPO Semester I Tahun 2024

## Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

### IK 5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)

Jumlah bangunan Unit Pengolahan Ikan beserta paket peralatan pengolahan yang diberikan kepada penerima bantuan untuk melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah hasil perikanan.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan

pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH). UPI bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Konsep pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah adalah bentuk Hilirisasi produk perikanan melalui pengolahan berbasis bioteknologi, menggunakan peralatan, tenaga kerja dan standar yang benar untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Teknologi metode hidrolisis atau dengan ekstraksi digunakan untuk mengambil protein ikan, untuk mengambil protein sebagai kandungan penting pada ikan sebagai bahan pangan fungsional yang juga bernilai tinggi.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang dibangun bersifat tahunan sehingga pada Triwulan III 2024 belum terdapat capaian dan baru akan terlihat di Triwulan IV. Hal tersebut sama pada tahun 2023, dimana indikator kinerja tersebut pada Triwulan III belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Pada triwulan III 2024, indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang dibangun sudah pada tahap penandatanganan kontrak untuk konstruksi bangunan dan telah diterbitkan surat pesanan untuk mesin.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit) sebesar Rp 10.700.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 959.897.060,- atau sebesar 8,97% dari pagu anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit), yaitu:

1. Rapat Penandatanganan Kontrak Konstruksi UPI Bernilai Tambah

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada hari Jumat 20 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Hotel Zest Bogor

- Peserta:

Pertemuan dipimpin oleh Direktur Pengolahan. Rapat dihadiri Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan para pihak yang melakukan perikatan (PT. Ciremai Putra Tekindo dan PT. Bayu Berlian Mandiri), serta pelaksana Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, lingkup Dit. Pengolahan

- Tujuan Kegiatan:

Perikatan kontrak pelaksanaan pekerjaan UPI NT dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

- Pembahasan :

a. Kegiatan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan tahun 2024 merupakan Rencana Output yang penting dan menjadi sorotan, seiring dengan kampanye Protein untuk Generasi Emas dengan sumber protein dalam bentuk Hidrolisat Protein Ikan yang merupakan output hasil olahan dari UPI Bernilai Tambah yang akan dibangun.

b. Berdasarkan hasil seleksi dari UKPBJ KKP dinyatakan bahwa pemenang pertama adalah PT. Ciremai Putra Tekindo. dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPBJ PPK pada tanggal 4 september 2024.

c. Jaminan Pelaksanaan telah disampaikan oleh PT. Ciremai Putra Tekindo kepada PPK, pada tanggal 18 September 2024, dengan masa berlaku 17 September sampai dengan 25 Desember 2025, dan telah dilakukan Verifikasi kepada Bank Nasional Penerbit Jaminan Pelaksanaan, pada tanggal 19 September 2024.

d. Surat perjanjian/ Surat Kontrak telah ditandatangani 2 belah pihak dari PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi UPI.



Gambar 23. Rapat Penandatanganan Kontrak Konstruksi UPI Bernilai Tambah

## 2. Rapat Koordinasi dengan Kejaksaan Agung

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa 24 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Kejaksaan Agung.

- Peserta:

Pertemuan dipimpin oleh Kasubdit Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan dihadiri Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, PJ Prasarana, serta Tim dari Direktorat D, Kejaksaan Agung.

- Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah koordinasi pengamanan pembangunan strategis kegiatan pada Direktorat Pengolahan, DJ-PDSPKP

- Pembahasan :

a. Kegiatan PN TA. 2024 yang dimohonkan pendampingan diantaranya adalah Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah.

b. Rencana Output ini saat ini tengah menjadi sorotan, seiring dengan kampanye Protein untuk Generasi Emas dengan sumber protein dalam bentuk Hidrolisat Protein Ikan yang merupakan output hasil olahan dari UPI Bernilai Tambah yang akan dibangun.

c. UPI NT akan memproduksi Hidrolisat Protein Ikan yang menjadi bahan baku untuk pemenuhan gizi untuk masyarakat.

- Kesimpulan:

a. Melakukan koordinasi dengan kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan terkait pembangunan UPI NT

b. Melengkapi data terkait potensi Hambatan Tantangan Ancaman dan

- Gangguan (HTAG) di lokasi, serta Manajemen Risiko yang komprehensif.
- c. Melaksanakan proses konstruksi di lapangan dan membuat monitoring dan dokumentasi yang baik.

### Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

#### IK 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)	19.080	9.540	-	38.159	19.466	10.239	-	19.466	102,02	51,01	90,12	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang) adalah 19.466 Orang. Capaian indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang) sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 19.466 Orang atau meningkat sebesar 90,12% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 10.239 Orang. Capaian ini setara dengan 102,02% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 19.080. Pada triwulan III tahun 2023 indikator kinerja

tersebut belum memiliki capaian, karena indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 di laporkan dengan periode tahunan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 38.159 Orang, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 51,01%.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Tenaga Kerja yang teribat bidang Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan, yaitu, capaian tenaga kerja pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terlibat dalam kegiatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang berasal dari 246 UPI yang tersebar di 10 Provinsi.

## Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan

### IK 7. Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga usaha pengolahan ikan. NTPHP digunakan sebagai salah satu proxy untuk melihat daya tukar produk olahan terhadap komoditas biaya produksi dan rumah tangga secara cepat dan near real time, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Peningkatan Nilai Tukar Pengolahan dilihat dari selisih NTPHP tahun ke-t dengan tahun ke-(t-1).

$NTPHP > 100$ , berarti pengolah mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pengolah naik lebih besar dari pengeluarannya.  $NTPHP = 100$ , berarti pengolah mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh PHP, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan pengolah sama dengan pengeluarannya.  $NTPHP < 100$ , berarti pengolah mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan pengolah turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan III Tahun 2024 capaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan III Tahun 2023, dimana pada Triwulan III tahun 2023 belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Periode pelaporan indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) sebesar Rp 170.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 114.633.700,- atau sebesar 67,43% dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III ini, adalah:

- Terdapat Enumerator dari beberapa daerah yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan data monitoring harga produsen dan harga konsumen;
- Data diagram timbang yang tersedia untuk penghitungan NTHP saat ini merupakan data hasil survei tahun 2015.

Faktor yang menjadi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III, adalah dukungan dan komitmen anggota tim NTPHP pusat dalam proses penghitungan NTPHP tahun 2024.

Rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya, adalah:

- Pemutakhiran data diagram timbang NTPHP;
- Perlu dilakukan penambahan lokasi sampling Monitoring data harga produsen dan harga konsumen.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%), yaitu:

1. Validasi Data dan Penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) 2024

• Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Kegiatan Validasi Data dan Penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan dilaksanakan tanggal 18-20 Juli 2024 di Bogor.

• Peserta:

Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, serta dihadiri oleh perwakilan BBRSEKP, Pusdatin, BRIN, Tim Kerja Data dan Layanan Publik Ditjen PDSPKP, dan Timja Pengembangan dan Penerapan Standar Direktorat PBM.

• Tujuan Kegiatan:

- a. Melakukan validasi data monitoring harga produsen dan harga konsumen yang disampaikan oleh Enumerator Daerah.
- b. Melakukan pengolahan dan analisis Data NTPHP.

• Pembahasan

Salah satu sasaran strategis pembangunan Ditjen PDSKP tahun 2020-2024 adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024. Berdasarkan hasil validasi dan analisis data, capaian NTPHP periode Semester 1 tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Realiasi NTPHP rata-rata periode Semester 1 tahun 2024 sebesar 104,90 atau 100,14% dari angka target sebesar 104,75%.
- b. Naik 0,22% dibanding realisasi NTPHP tahun sebelumnya.
- c. Laju kenaikan NTPHP periode Semester 1 2024 sebesar 0,03.
- d. Laju kenaikan rata-rata bulanan Indeks yang Dibayarkan (IB): 0,28.
- e. Laju kenaikan rata-rata bulanan Indeks yang diterima (IT): 0,31.
- f. Fenomena peningkatan IT periode semester 1:

- g. Peningkatan IT disebabkan adanya kenaikan harga jual produk olahan yang didominasi oleh kelompok olahan pengeringan/penggaraman.
  - h. Kenaikan IT terjadi signifikan pada bulan Jan-April, hal ini disebabkan karena: 1). Langkanya supply produk akibat musim hujan Yang terjadi pada bulan Januari-April; dan 2). Karakteristik usaha penggaraman/pengeringan yang masih mengandalkan panas matahari dalam proses pengolahan mengakibatkan harga jual produk meningkat dan mendorong peningkatan jumlah pendapatan pengolahan dari sisi nilai
  - i. Kelompok penggaraman/pengeringan memberikan share terhadap IT terbesar sebesar 40% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 46%.
  - j. Untuk kelompok pengolahan lainnya memiliki pertumbuhan rata-rata Semester 1 tertinggi (88%) dengan share terhadap IT sebesar 11%.
  - k. Fenomena Harga Ikan (IB):
  - l. Pada kelompok ikan jenis pelagis, bahan baku utama untuk penggaraman/pengeringan dan pemindangan terjadi penurunan harga di bulan Januari – Februari 2024 dibandingkan pada bulan Des 2023.
  - m. Hal ini mendorong penurunan IB sehingga memperkuat peningkatan IT secara keseluruhan.
  - n. Sebagai contoh pada bulan Januari dan Februari harga ikan tongkol turun 0,29% dan 0,90%; ikan kembung turun 0,29% dan 0,67%; Bandeng 0,15% dan 0,86%.
- Kesimpulan:  
Dukungan Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan memberikan dampak positif dalam meningkatkan produktivitas sehingga mempengaruhi peningkatan NTPHP.



Gambar 24. Validasi Data dan Penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) 2024

## Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Sistem Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

### IK 8. Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit)

Pabrik Es Portable yang dibangun adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es portable yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya. Pada tahun 2024, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 11 Unit Pabrik Es portable yang dibangun dalam mendukung Program Kampung Nelayan Modern. Pabrik Es Portable yang dibangun merupakan Bantuan Pemerintah yang berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi factor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pabrik Es Portable yang dibangun (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit)	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan III Tahun 2024 capaian indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023. Periode pelaporan indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) adalah triwulanan yang dimulai pada triwulan III.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) sebesar Rp 20.200.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 952.069.155,- atau sebesar 4,71% dari pagu anggaran.

Indikator kinerja kegiatan pabrik es *portable* yang dibangun pada triwulan III 2024 terdapat 4 paket (Situbondo, Belitung, Baubau, dan Trenggalek) yang sudah dalam tahap tanda tangan surat pesanan. Pabrik es *portable* di Situbondo sudah pada proses penyelesaian pekerjaan (fisik 100%) di akhir bulan September. Sementara untuk 3 pabrik es lainnya, yaitu di Kab. Belitung, Kota Bau Bau, dan Kab. Trenggalek saat ini sedang proses pelaksanaan pekerjaan, baik di workshop maupun di lapangan. Dan untuk 6 paket lainnya sedang dalam persiapan proses pemilihan penyedia, yaitu untuk pabrik es di Kab. Aceh Jaya, Kab. Lampung Selatan, DI. Yogyakarta, Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung, dan Kota Gorontalo.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pabrik Es *Portable* Yang Dibangun (unit), yaitu:

1. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es *Portable*

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada Senin, 1 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat SKP,

Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13 dan aplikasi Zoom.

- Peserta:

Pertemuan dipimpin Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Dinas Kab/Kota calon penerima BP Pabrik Es *Portable* (Dinas KP Trenggalek, Dinas KP Belitung, Dinas KP Kota Bau-Bau, Dinas KP Kota Gorontalo, Dinas KP Banyumas, Dinas KP Gunung Kidul, Kab. Mimika, Kab. Pandeglang, Kab. Sukabumi), Auditor Itjen 4 KKP, konsultan perencana serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM.

- Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari rapat tersebut adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan pengadaan pabrik es *portable* dengan daerah calon lokasi penerima.

- Pembahasan :

- a. Kab. Mimika : Daerah Mimika sangat membutuhkan Pabrik Es *Portable* untuk membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkap. Untuk suply listrik tersedia. Terkait rencana Pabrik Es *Portable* ini, Dinas KP Kab. Mimika akan mendiskusikannya dengan calon penerima.
- b. Kota Gorontalo : Dinas KP Kota Gorontalo telah mengirimkan proposal Pabrik Es *Portable* ke Ditjen PDSPKP. Sudah menyertakan persyaratan di dalam proposal dan sanggup untuk penyambungan listrik. Rencananya Pabrik Es *Portable* akan dibangun di lahan milik koperasi. tanah Lokasi calon dalam proses balik nama. Berdasarkan data dari Dinas KP Kota Gorontalo, jumlah nelayan ada 800 KK, dimana 60% nelayan berada di daerah Kalamo.
- c. Kab. Belitung : Rencana lokasi untuk Pabrik Es *Portable* ada di Suagual. Pada tahun 2023 Dinas KP Kab. Belitung telah menyusun proposal Pabrik Es *Portable* Suagual, dan telah dikirimkan ke Ditjen PDS dan DJPT. Dinas KP Kab. Belitung akan segera memperbaiki proposal, menyesuaikan dengan Juknis Pabrik Es *Portable* dari Ditjen PDSPKP. Saat ini calon lokasi Pabrik Es *Portable* hanya ada Pabrik Es *Portable* kapasitas 500 Kg. Calon penerima sudah siap dan calon lokasi lahan Pabrik Es *Portable* siap untuk disertifikatkan.
- d. Kota Bau-Bau : Pabrik Es *Portable* sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan di Kota Bau-Bau. Saat ini di Kota bau-Bau terdapat PE milik

swasta.

- e. Kab.Gunung Kidul : Kebutuhan es di Kab. Gunung Kidul masih banyak, sehingga jika dimungkinkan Kab. Gunung Kidul mendapatkan pabrik es dengan kapasitas 10 ton. Ada Pabrik Es *Portable* yang dibangun tahun 2009 dari dana TP yang masih operasional. Apakah Pabrik Es *Portable* dapat diletakkan di lahan Pelabuhan Sadang. Calon Penerima (Koperasi Perikanan) masih dalam proses NIK/Nomor Induk Koperasi)
  - f. Kab.Sukabumi : Pabrik Es *Portable* rencananya akan berada di lokasi Kalamo Ciwaru, dimana lahannya adalah milik Dinas Perikanan Kab. Sukabumi. Calon operator adalah Koperasi Berdaulat Ciwaru. Untuk operasional, sebaiknya disampaikan juga perhitungan bisnis dari Pabrik Es *Portable*.
  - g. Kab.Banyumas : Dinas KP Banyumas awalnya mengusulkan CS. Terkait dengan Pabrik Es *Portable*, saat ini masih dilakukan monitoring di lapangan.
  - h. Kab.Trenggalek : Proposal Pabrik Es *Portable* sudah diajukan ke Dit. Pengolahan dan Bina Mutu. Untuk kesiapan listrik, di calon lokasi sudah tersedia listrik dengan kapasitas 23 KVA .
- Kesimpulan:
    - a. Dinas KP Kab/Kota agar segera menyiapkan dan melengkapi persyaratan proposal pabrik es portabel dan mengirimkannya ke Dit. Pengolahan dan Bina Mutu.
    - b. Pada minggu ke 2 Juli 2024, direncanakan Tim Dit. Pengolahan dan Bina Mutu akan melakukan identifikasi dan verifikasi lapang.



Gambar 25. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es *Portable*

## 2. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es *Portable* di Kab. Situbondo

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada Jumat, 5 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat SKP, Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13 dan aplikasi Zoom.

- Peserta:

Pertemuan dipimpin Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Situbondo, Auditor Itjen 4 KKP, konsultan perencana serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM

- Tujuan Kegiatan:

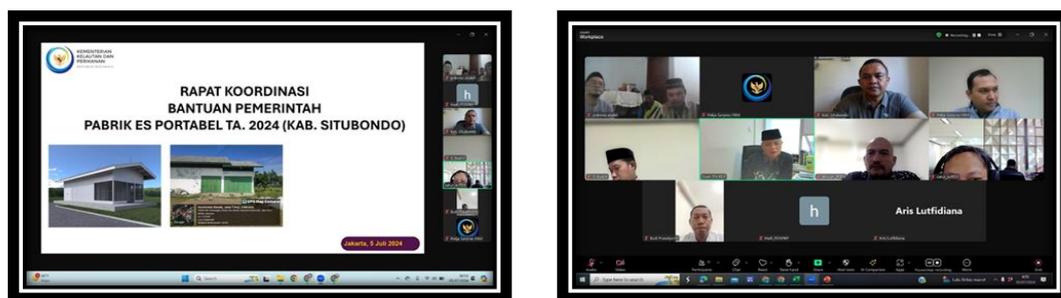
Tujuan dari kegiatan tersebut untuk melakukan koordinasi membahas persiapan kegiatan pengadaan pabrik es *portable* di Kab. Situbondo

- Pembahasan :

- a. Perlunya segera dilakukan percepatan pelaksanaan. Saat ini pabrik es *portable* sudah tersedia di e-katalog, lalu di klik jika sudah siap.
- b. Pada tahun 2024, rencananya Dit. PBM akan mengadakan 5 unit pabrik es *portable*. Kab. Situbondo menjadi pionir untuk pengadaan pabrik es ini. Diharapkan bisa menjadi role model bagi pelaksanaan pengadaan pabrik es *portable* di tempat lain.
- c. Berdasarkan pengalaman, jika dikelola dengan baik dan benar, pabrik es *portable* merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan bagi pengelolanya
- d. Agar operasional pabrik es berjalan baik, salah satu syaratnya adalah pengelola harus akuntabel
- e. Berdasarkan catatan hasil rapat tanggal 13 Juli 2024 tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Situbondo serta calon pengelola (Pokmas Ababil) telah melakukan upaya sebagai berikut:
  - 1) Koordinasi dengan BKAD telah ditemukan sertifikat kepemilikan Pemkab Situbondo atas calon lokasi BP Pabrik Es *Portable*
  - 2) Telah Terbit Surat Dukungan dari PLN untuk kegiatan Pabrik Es *Portable* di Kab. Situbondo
- f. Mengingat bahwa lahan lokasi pabrik es portabel adalah milik Pemda, perlu ada surat keterangan / dukungan dari Pemda bahwa tanah tersebut

akan disewakan / digunakan oleh Pokmas untuk pabrik es *portable* selama 10 tahun

- g. Sesuai dengan Juknis, *readiness criteria* harus dipenuhi oleh calon penerima
  - h. Kegiatan pemilihan penyedia pengadaan Pabrik es portabel dilaksanakan melalui sistem e-katalog, sehingga waktunya lebih cepat dibandingkan dengan lelang umum.
  - i. Perkiraan waktu pemilihan s.d. penyelesaian pekerjaan sekitar 60 hari kalender.
  - j. Listrik dan air sudah harus tersedia sebelum proses pelaksanaan kegiatan karena dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk commissioning test.
  - k. Pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Situbondo ataupun Pokmas Ababil agar segera melengkapi data dukung, utamanya listrik dan air.
  - l. Perlu dilakukan uji laboratorium untuk air di sekitar lokasi rencana pengadaan pabrik es *portable*, baik air dari PDAM ataupun air sumur bor.
- Kesimpulan:
    - a. Pemkab Situbondo dan Kelompok segera menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang belum ada / lengkap
    - b. Dijadwalkan dapat dilaksanakan kegiatan land clearing pada tanggal 12 Juli 2024.



Gambar 26. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es *Portabel* di Kab. Situbondo

### 3. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es *Portable* di Kab. Tulungagung

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada Jumat, 26 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat SKP,

Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13 dan aplikasi Zoom.

- Peserta:

Pertemuan dipimpin Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Dinas Perikanan Kab. Tulungagung, Kepala Desa Besuki – Kab. Tulungagung, Ketua Kelompok Sumber Abadi Desa Besuki Kab. Tulungagung serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM

- Tujuan Kegiatan:

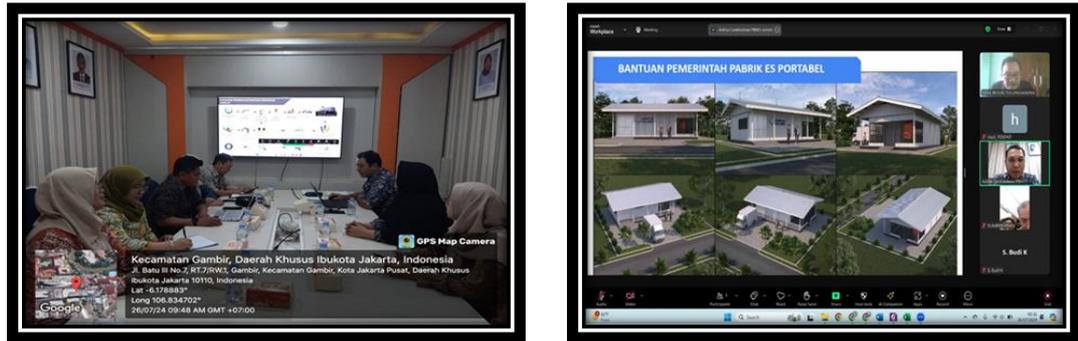
Dalam rangka monitor progress kesiapan calon pengelola serta kesiapan lokasi pabrik es portabel di Kab. Tulungagung.

- Pembahasan :

- a. Dinas Perikanan Kab. Tulungagung siap mendukung kegiatan pabrik es portabel di Kab. Tulungagung.
- b. Calon operator adalah kelompok masyarakat (BUMDES) Sumber Abadi Desa Besuki Kab. Tulungagung.
- c. Listrik dan air sudah harus tersedia sebelum proses pelaksanaan kegiatan karena dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Pihak Dinas Perikanan Kab. Tulungagung ataupun Kelompok Sumber Abadi agar segera melengkapi data dukung, utamanya listrik dan air.
- e. Perlu dicek hasil laboratorium atas uji air di sekitar lokasi rencana pengadaan pabrik es *portable*.
- f. Lahan sudah siap, bersertifikat atas nama milik Desa. Jika sudah pasti, akan dibuatkan perjanjian dengan kelompok untuk sewa.
- g. Calon operator akan bekerjasama dengan GISLI untuk operasional pabrik es, termasuk kebutuhan anggaran untuk penyambungan listrik.

- Kesimpulan:

- a. Dinas Perikanan Tulungagung dan calon kelompok agar menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang belum ada / lengkap paling lambat pada tanggal 31 Juli 2024.
- b. Dit. PBM akan segera menyiapkan dokumen untuk pemilihan penyedia pabrik es di Kab. Tulungagung.



Gambar 27. Rapat Koordinasi Rencana BP Pabrik Es *Portable* di Kab. Tulungagung

#### 4. Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Pemerintah Pabrik Es *Portable* (Tahap II)

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada Selasa, 17 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Dit. Pengolahan, GMB III Lt. 13 dan aplikasi Zoom.

- Peserta:

Pertemuan dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh serta perwakilan dari Auditor dari Inspektorat IV, Itjen KKP, Setditjen PDSPKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi D.I. Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gorontalo, dan Timja lingkup Dit. Pengolahan

- Tujuan Kegiatan:

Sosialisasi dan Koordinasi kegiatan Bantuan Pemerintah Pabrik Es *Portable*.

- Pembahasan :

- a. Kota Gorontalo

- Menyatakan siap untuk menerima bantuan pabrik es *portabel*.
- Dokumen telah diserahkan langsung ke Dit. Pengolahan pada saat audiensi di bulan Juni 2024. Kelengkapan sudah terpenuhi, seperti kesiapan Penyambungan Listrik, Air Bersih dari PDAM, dan kesanggupan kelompok untuk menanggung pondasi pada saat pembangunan
- Bantuan pabrik es sangat dibutuhkan di Kota Gorontalo, hal ini mengingat potensi armada di Gorontalo, baik KM Tempel maupun KM yang melakukan

usaha perikanan tangkap, tetapi belum didukung dengan ketersediaan es yang mencukupi.

- Saat ini untuk Pabrik Es balok yang sudah ada di Kota Gorontalo adalah dari swasta, tetapi kapasitasnya masih minim, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan nelayan di Kota Gorontalo.
- Bantuan Pabrik Es ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya, Dinas siap melakukan monitoring dan pendampingan.
- Rencana Penerima adalah Koperasi Karya Putra Gorontalo, dimana Koperasi ini sudah lama melakukan usaha penangkapan, tetapi belum pernah menerima bantuan sejenis baik dari Pemda maupun Pusat
- Koperasi Karya Putra Gorontalo mempunyai kemampuan dalam manajemen penangkapan, dan pengelolaan keuangan, dan siap melakukan pendampingan dalam operasionalisasi pabrik es ini.
- Dit. Pengolahan meminta agar Dinas KP Kota Gorontalo dapat mendampingi sejak running test sampai dengan operasional pabrik es.
- Tim dari KKP akan memastikan kembali lokasi, dan juga Tim FS untuk menganalisa bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

b. Kab. Pangkep :

- Sudah ada pabrik es di Kalibone kapasitas 10 ton tetapi dalam kondisi rusak.
- Pabrik es ini selama ini melayani kebutuhan nelayan pesisir dan sekitar pangkep
- Pabrik es Kalibone ada rencana untuk dilakukan perbaikan, dan masih dalam proses pengusulan. Selama ini para nelayan menyediakan es balok dari pasokan dari luar pangkep menggunakan mobil.
- Dit. Pengolahan meminta agar Dinas KP Pangkep segera mengirimkan informasi yang lengkap terkait calon penerima pabrik es di Pangkep, beserta proposal dan kelengkapannya.

c. Kab. Pacitan

- Dinas Perikanan sangat berterimakasih sekali, pada tahun 2024 terpilih sebagai salah satu calon penerima bantuan dari KKP.

- Saat ini, untuk kebutuhan pabrik es di kabupaten pacitan dipenuhi dari 2 pabrik es, yaitu satu pemerintah satu swasta, serta dari daerah lain (Kabupaten Ponorogo).
- Semua persyaratan yang diajukan untuk calon penerima pabrik es sudah dilakukan kordinasi dengan pihak penerima, dan instansi terkait seperti PDAM dan Listrik.
- Lahan sudah siap dan milik Poklahsar Peni sebagai calon penerima.
- Poklahsar Peni sebagai calon penerima pabrik es telah melakukan koordinasi dengan dinas untuk mempersiapkan persyaratan.
- Poklahsar Peni juga sudah mencoba mempelajari kemungkinan pasar. Berdasarkan data dari dinas perikanan, kebutuhan es di kab. Pacitan mencapai 100 ton/hari. Kapasitas PE Pemerintah 12 ton/hari Swasta 50 ton/hari, sehingga masih ada kekurangan es, dimana hal ini biasanya ditutupi dari luar kabupaten.
- Melakukan wawancara di usaha tambak udang dari mana es diperoleh ternyata diperoleh dari luar daerah pacitan. Banyak tambak udang dan TPI (12 unit), Harga pabrikan 26 ribu, curah.
- Saat ini belum dihitung nilai ekonomis untuk calon bantuan Pabrik es ini. Para Pedagang ikan di Trenggalek mencari es di Pacitan, sehingga kebutuhan es masih kurang, dan memenuhi kebutuhan es dari pabrik es rumahan (freezer) plastikan.
- Usaha Poklahsar Peni : memproduksi olahan ikan frozen. Dalam proses produksi membutuhkan es. Kebutuhan es dipenuhi juga dari es rumahan.
- Sudah siap Listrik 23 kVA, dan biaya pemasangan 25-30 juta. PLN Pacitan sangat proaktif dalam menyiapkan penyambungan.

#### d. DIY

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY menyampaikan terima kasih karena menjadi salah satu calon penerima Pabrik Es *portable* tahun 2024
- Dinas sudah melakukan tinjauan lapangan.
- Kegiatan pembangunan / pengadaan pabrik es *portabel* akan didukung karena sesuai dengan visi misi Gubernur, yaitu pengembangan kawasan pelabuan pantai.
- Mendorong terbentuknya koperasi di Kawasan Gesing.

- Pabrik es *Portable* dapat melengkapi sarana di Kawasan tersebut.
- Tim Daerah memastikan kembali ke Kawasan calon pabrik es, karena untuk pemasangan listrik di Pelabuhan lokasi awal tidak memungkinkan.
- Di lokasi baru, salah satu keuntungannya adalah pangsa pasar yang lebih terbuka di pantai gesing
- Ada 60 nelayan di TPI Gesing.

e. Lampung Selatan

- Dinas KP Kab. Lampung Selatan mengucapkan terimakasih kepada Ditjen PDS c.q. Dit. Pengolahan dan Bina Mutu karena menjadi calon penerima Pabrik es *Portabel*.
- Rencana calon penerima adalah Pokdakan Anugerah Tani Tambak
- Pada tanggal 5 September 2024 sudah dilakukan identifikasi awal oleh tim KKP, secara umum lokasi dan calon penerima dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan.
- Proposal akan perbaiki dan lengkapi.
- Kebutuhan Pabrik es di Lampung Selatan sangat dibutuhkan, di calon lokasi penerima ada kebutuhan es untuk pokdakan per hari 3 ton, sementara mendapatkan es agak susah dari kabupaten lain. Terkadang kebutuhan es diperoleh dari Jakarta. Terdapat 1.100 ha.
- Pokdakan Anugerah Tani Tambak menyampaikan bahwa dari tahun 2022 sudah mengajukan pabrik es dengan kapasitas per hari 10 – 20 ton, namun belum direalisasi.
- Kebutuhan es di Lampung Selatan sangat besar sekali. Untuk Kec. Pasir Sakiti, terdapat 17 Desa, Kec. Sragi, 15 Desa, Kec Penengahan, 27 Desa budidaya air tawar dan udang, dan hasil tangkap, Kec. Bakauheni 7 Desa , ada 3 pelelangan dan Kec. Palas, 16 Desa Budidaya air tawar
- Untuk Persyaratan : Tanah/lahan siap, Listrik siap, dan sumur bor siap.
- Proposal agar segera dilengkapi.

f. Aceh Jaya

- Aceh Jaya tidak memiliki Pabrik Es
- Di Aceh Jaya kebutuhan es untuk di Aceh Jaya mencapai 725.000 kg/bulan
- Kebutuhan es disamping untuk kapal/perikanan tangkap juga untuk produksi dari budidaya untuk tambak.

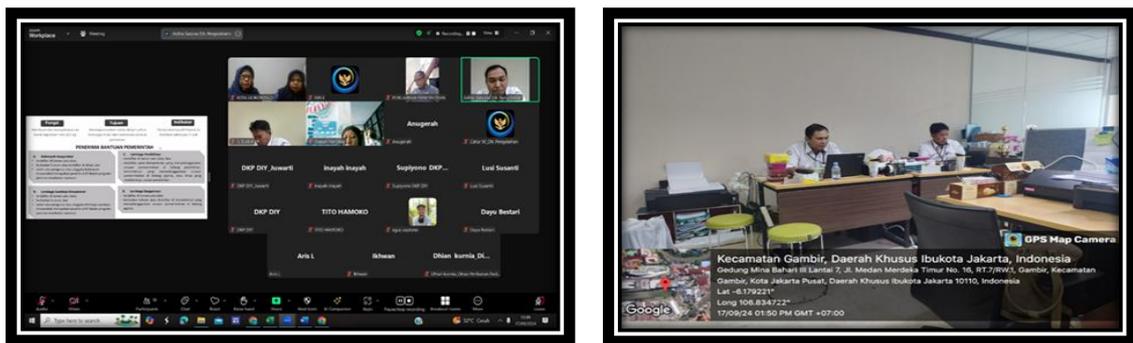
- Saat ini kebutuhan es dicukupi dari dari kabupaten Banda Aceh, dan Aceh Barat
- Kelompok yang diusulkan sebagai calon penerima, bergerak di bidang budidaya udang vaname.
- Lokasi sudah siap, listrik siap, sumber air siap dekat jalan besar
- Es di Banda aceh 20-30 rb/60 Kg
- Dit. Pengolahan meminta agar proposal segera dilengkapi dengan lengkap dan segera dikirimkan.

g. Itjen

Hasil pendampingan maupun verifikasi sebelum dilakukan pengusulan ke Dit. Pengolahan, agar dibuat form checklist terkait dengan pengusulan yang ditujukan ke PPK dan dicermati oleh Dinas.

•Kesimpulan:

- Dit. Pengolahan akan segera melakukan verifikasi lapang dan feasibility studies untuk lokasi di Kab. Lampung Selatan, Kab. Pacitan, Provinsi DI Yogyakarta, Kab. Pangkep, dan Kota Gorontalo.
- Dit. Pengolahan akan segera menyiapkan proses administrasi pemilihan pabrik es portable di 5 lokasi tersebut.
- Dinas Kab/Kota akan segera mengirimkan proposal beserta kelengkapannya ke Dit. Pengolahan.



Gambar 28. Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel

## Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

### IK 9. Chest Freezer yang Disediakan (Unit)

Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (*chest freezer*) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Anggota DPR, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Kegiatan *chest freezer* yang disalurkan ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan sistem rantai dingin (*chest freezer*). Dengan demikian, diharapkan UMK dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMK. Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (*chest freezer*) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Pada tahun 2024, target tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan sebanyak 311 unit *chest freezer* yang tersalurkan.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian *Chest Freezer* yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
<i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan (Unit)	271	91	-	311	311	159	-	311	114,76	100,00	95,60	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan (Unit) adalah 152 unit. Capaian indikator *Chest Freezer* Yang Disediakan (Unit) sampai dengan triwulan III adalah sebesar 311 unit atau meningkat sebesar 51,13% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 159 unit. Capaian ini setara dengan 114,76% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 271 unit. Pada triwulan III tahun 2023 indikator kinerja tersebut belum memiliki capaian, karena indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 di laporkan dengan periode tahunan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 311 unit, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 100%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es *Portable* yang dibangun (unit) sebesar Rp 2.890.100.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 1.485.462.027,- atau sebesar 51,40% dari pagu anggaran.

Secara umum faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah karena terlambatnya beberapa usulan yang diajukan oleh mitra KKP, sehingga menyebabkan terlambatnya identifikasi dan verifikasi ke kelompok penerima. Faktor Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah, koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, penyuluh, dan tentunya Tim Teknis Pusat maupun daerah. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya : Pengajuan proposal kelompok dapat ditepati sesuai jadwal yang sudah disepakati.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja *Chest Freezer* yang disediakan (unit), yaitu:

1. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*

• Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat SKP, Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13 dan zoom

• Peserta:

Pertemuan dipimpin Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh Auditor Itjen 4 KKP, TA Komisi IV DPR RI, serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM dan pelaksana di lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, Direktorat PBM.

- Tujuan Kegiatan:

Dalam rangka koordinasi untuk percepatan penyaluran *Chest Freezer* dengan mitra

- Pembahasan :

- a. Berdasarkan surat pesanan *Chest Freezer* pada bulan Maret 2024, kontrak akan berakhir pada bulan September 2024.
- b. Berdasarkan data di Dit. PBM dari 311 unit *Chest Freezer*, sebanyak 182 unit sudah proses pengiriman. Sedangkan sebanyak 129 unit *Chest Freezer* masih menunggu lokasi pengiriman.
- c. Dari 182 unit yang sudah dilakukan proses pengiriman, per tanggal 5 Juli 2024 sudah ada sebanyak 107 unit tiba di lokasi. Sebanyak 75 unit *Chest Freezer* masih Proses Pengiriman dan konfirmasi ke lokasi.
- d. Dari rencana usulan mitra DPR sebanyak 220 unit *Chest Freezer*, usulan proposal yang diterima dari Dit. PBM adalah sebanyak 147 proposal. Tercatat ada 30 anggota komisi IV DPR telah memasukan usulan proposal dan lengkap, 10 anggota telah mengajukan usulan tetapi belum lengkap, dan sebanyak 14 anggota yang belum sama sekali mengajukan usulan proposal.
- e. Kegiatan pengadaan *Chest Freezer* termasuk dalam kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
- f. Adanya permintaan dari Tenaga Ahli DPR perubahan lokasi penerima *Chest Freezer*. Dari semula ke Kab. Dharmasraya dialihkan ke Kota Padang, dikarenakan UPI yang diusulkan di awal sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- g. Diharapkan semua usulan *Chest Freezer* sudah diterima oleh Dit. PBM pada tanggal 12 Juli 2024

- Kesimpulan:

- c. Bahan paparan dan juknis akan dikirimkan melalui WA grup.
- d. Untuk kelengkapan proposal yang kurang akan dkomunikasikan langsung ke TA bersangkutan.
- e. Dit. PBM siap membantu para TA jika ada kesulitan.



Gambar 29. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*

## 2. Rapat Koordinasi Probity Audit Pelaksanaan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Perikanan Kab. Maros
- Peserta: Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Maros dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya Dit. Pengolahan. Rapat dihadiri antara lain oleh : Tim Probity Audit Itjen KKP, Dinas Perikanan Kab. Maros, Penyuluh Perikanan , dan kelompok Penerima BP CF di Kab. Maros
- Tujuan Kegiatan: Untuk memastikan kegiatan pengadaan BP *Chest Freezer* berjalan sesuai dengan mekanisme, maka dilakukan kegiatan Probity Audit oleh Auditor Itjen KKP terhadap kegiatan tersebut, dimana salah satu lokasi sampling adalah di Kab. Maros.
- Pembahasan :
  - a. Pihak Dinas Perikanan Kab. Maros menyampaikan terima kasih atas BP CF di Kab. Maros, dan siap untuk mendukung kegiatan BP tersebut. Untuk BP CF, alokasinya ada 4 unit dan sudah diserahkan kepada kelompok, sedangkan 3 unit peralatan pengolahan belum sampai di Kab. Maros. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan Upaya yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya maupun pengolahan dan pemasaran di Kab. Maros.
  - b. Dalam rapat tersebut, Tim Itjen KKP menyampaikan maksud dan harapan dari kegiatan probity audit pelaksanaan kegiatan BP CF di Kab. Maros. Tim

Itjen juga minta bantuan dan Kerjasama dari kelompok penerima CF/PP di Kab. Maros untuk mengisi kuesioner probity audit BP CF/PP.

- c. Berikut adalah data penerima BP CF di Kab. Maros, yaitu : 1). Kelompok Matana dengan Ketua Bpk. Muh. Ilham yang beralamat di Ds. Tellompoccoe Kec. Marusu; 2). Kelompok Leangge dengan Ketua Bpk. Ali Rahmat yang beralamat di Kel. Kalibirang Kec. Maros Baru; 3). Kelompok Mangai Jaya dengan Ketua Bpk. Mustafa yang beralamat di Ds. Damai Kec. Tanralili; dan 4). Kelompok Mangallekana Jaya dengan Ketua Bpk. Kahar dengan Alamat di Ds. Baji Pamai Kec. Maros Baru.

•Kesimpulan:

Dari hasil wawancara dan diskusi, secara umum para kelompok penerima BP CF sudah mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan mekanisme yang dan melengkapi persyaratannya. Untuk kelompok Leangge, kartu BPJS sudah ada tetapi belum diupload. Untuk Kelompok Mangallekana Jaya diminta untuk memperbaiki kartu BPJS nya karena nama yang tertera berbeda dengan nama di KTP.



Gambar 30. Rapat Koordinasi Probitry Audit Pelaksanaan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*

### 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP CF

•Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Monitoring kegiatan dilaksanakan di beberapa daerah, diantaranya di Kab. Maros, dan Kota Makassar pada tanggal 28 – 30 Agustus 2024 .

- Peserta:

Monitoring dilaksanakan oleh Tim dari Dit. Pengolahan didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat dan penyuluh perikanan.

- Tujuan Kegiatan:

Untuk memastikan kegiatan pengadaan BP Chest Freezer berjalan baik dan melakukan verifikasi lapang ke kelompok penerima bantuan CF.

- Pembahasan :

- a. Kegiatan monitoring BP CF di Kab. Maros dilakukan melalui peninjauan langsung ke Lokasi BP CF di kelompok Mangallekana Jaya dan Kelompok Matana. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lokasi terhadap BP CF, diperoleh hasil bahwa BP CF sudah diterima oleh kelompok dan dimanfaatkan secara baik oleh kelompok.

- b. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2024, dilakukan probity audit BP CF di Kota Makassar. Di kota Makassar, alokasi BP yang ada hanya 2 unit, yaitu untuk kelompok : Kelompok Mangga Tiga dengan Ketua Ibu Ratna Sari Dewi dengan Alamat di Jln. Gontang Raya, Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate; dan Kelompok Sinar Bambu dengan Ketua Bpk Salasa dengan Alamat di jln. Perjanjian Bongaya Kel. Barombong Kec. Tamalate.

- c. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa CF masih ada di Dinas, belum didistribusikan ke kelompok karena CF baru sampai dinas pada tanggal 26 Agustus 2024.

- d. Perwakilan Dit. Pengolahan pada kesempatan tersebut juga melakukan pembinaan kepada terkait mutu dan nilai tambah produk pengolahan, maupun GMP SSOP ke kelompok penerima bantuan CF.

- Kesimpulan:

Kegiatan pengadaan CF secara umum telah berjalan dengan baik. Para kelompok penerima telah melengkapi persyaratan yang diminta. Dinas dan penyuluh juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para kelompok penerima CF.



Gambar 31. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP *Chest Freezer*

## IK 10. Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)

Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumutan daging (bakso dan value added)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan (termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reuiu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Peralatan pengolahan ikan yang disediakan bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir, baik itu untuk produk pangan maupun nonpangan, terutama bagi Unit Pengolahan Ikan serta Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Dengan demikian, diharapkan UPI Skala Mikro dan Kecil dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah produknya.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, periode pelaporan indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan diukur dengan periode tahunan yang targetnya ada pada triwulan IV, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan IV. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan III Tahun 2023 dimana pada Triwulan III juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Pada capaian Triwulan IV Tahun 2023 tercapai 316 unit, atau setara 100,32%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit) sebesar Rp 5.032.500.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 1.275.553.000,- atau sebesar 25,27% dari pagu anggaran.

Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah, karena terlambatnya beberapa usulan yang diajukan oleh mitra KKP, sehingga menyebabkan terlambatnya identifikasi dan verifikasi ke kelompok penerima. Kompleksitas jenis peralatan pengolahan yang harus disediakan memerlukan waktu yang cukup buat penyedia.

Faktor Keberhasilan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah, koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, penyuluh, dan tentunya Tim Teknis Pusat maupun daerah.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya yaitu, Pengajuan proposal kelompok dapat ditepati sesuai jadwal yang sudah disepakati

Pada triwulan III 2024, indikator kegiatan peralatan pengolahan sudah dilakukan penadatangan surat pesanan pada tgl 5 Agustus 2024 untuk 165 paket peralatan pengolahan. Pada minggu ke-2 September 2024 telah dilakukan proses pengiriman sebanyak 54 paket untuk jenis peralatan *Value Added*, Ikan Asin dan Ikan Asap.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit), yaitu:

1. Rapat Koordinasi Rencana Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah PP

• Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13.

• Peserta:

Pertemuan dipimpin Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh Auditor Itjen 4 KKP, serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM dan pelaksana di lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, Direktorat PBM.

• Tujuan Kegiatan:

Dalam rangka koordinasi untuk percepatan penyaluran BP PP dengan mitra

• Pembahasan :

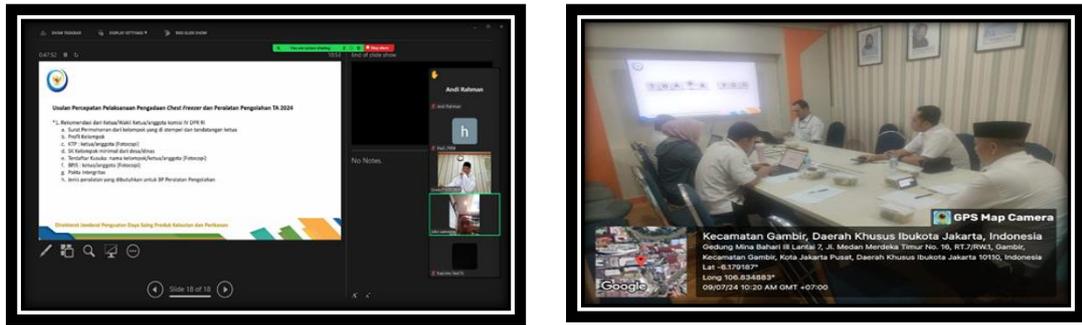
- a. Beberapa calon lokasi pengiriman berada di daerah yang jauh dan terpencil sehingga membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama. Untuk itu perlu percepatan agar semua usulan proposal PP dapat segera diterima. Contoh adalah rencana pengiriman PP ke lokasi Kab. Merauke, diperkirakan butuh waktu  $\pm$  45 hari. Belum lagi kompleksitas terkait penyediaan peralatan pengolahan untuk lebih dari 8 jenis paket,
- b. Memperhatikan kondisi yang ada
- c. Meminta pihak mitra Komisi IV DPR untuk segera mengajukan proposal dan melengkapi persyaratannya.

• Kesimpulan:

- a. Rapat koordinasi dengan TA DPR Komisi IV akan dilaksanakan sebagai upaya percepatan penyaluran BP CF.
- b. Dit. PBM akan melakukan koordinasi lebih intens kepada para TA, khususnya ke TA anggota komisi IV DPR yang belum mengajukan usulan proposal.

2. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :  
Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat SKP, Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13 dan zoom
- Peserta:  
Pertemuan dipimpin Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh Auditor Itjen 4 KKP, TA Komisi IV DPR RI, serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM dan pelaksana di lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, Direktorat PBM.
- Tujuan Kegiatan:  
Dalam rangka koordinasi untuk percepatan penyaluran BP CF dengan mitra
- Pembahasan :
  - a. Kontrak untuk peralatan pengolahan sebanyak 165 paket belum dilakukan. Salah satu alasan utamanya adalah belum semua usulan proposal dari mitra masuk, dan banyak yang belum ditentukan jenis peralatan pengolahannya.
  - b. Semua BP peralatan pengolahan dialokasikan untuk mitra DPR, alokasi masing – masing anggota sebanyak 3 paket.
  - c. Dari rencana usulan mitra DPR sebanyak 165 paket PP, usulan proposal yang diterima dari Dit. PBM per tanggal 8 Juli 2024 adalah sebanyak 102 proposal. Tercatat ada 31 anggota komisi IV DPR telah memasukkan usulan proposal dan lengkap, 5 anggota telah mengajukan usulan tetapi belum lengkap, dan sebanyak 18 anggota yang belum sama sekali mengajukan usulan proposal.
  - d. Bahan paparan dan juknis agar dapat dikirimkan ke setiap TA untuk dipelajari dan mempermudah TA mencari calon penerima.
  - e. Kelengkapan proposal yang kurang agar disampaikan ke TA.
  - f. Diharapkan semua usulan BP PP sudah diterima oleh Dit. PBM pada tanggal 17 Juli 2024.
- Kesimpulan:
  - a. Bahan paparan dan juknis akan dikirimkan melalui WA grup.
  - b. Untuk kelengkapan proposal yang kurang akan dikomunikasikan langsung ke TA bersangkutan.
  - c. Dit. PBM siap membantu para TA jika ada kesulitan.



Gambar 32. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan

### 3. Rapat Koordinasi Probity Audit Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Perikanan Kab. Maros

- Peserta:

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Maros dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya Dit. Pengolahan. Rapat dihadiri antara lain oleh : Tim Probity Audit Itjen KKP, Dinas Perikanan Kab. Maros, Penyuluh Perikanan , dan kelompok Penerima BP PP di Kab. Maros

- Tujuan Kegiatan:

Untuk memastikan kegiatan pengadaan BP Peralatan Pengolahan berjalan sesuai dengan mekanisme, maka dilakukan kegiatan Probity Audit oleh Auditor Itjen KKP terhadap kegiatan tersebut, dimana salah satu lokasi sampling adalah di Kab. Maros.

- Pembahasan :

- Pihak Dinas Perikanan Kab. Maros menyampaikan terima kasih atas BP PP di Kab. Maros, dan siap untuk mendukung kegiatan BP tersebut. Untuk BP PP, alokasinya ada 3 unit, tetapi ke 3 unit peralatan pengolahan tersebut belum sampai di Kab. Maros. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan Upaya yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya maupun pengolahan dan pemasaran di Kab. Maros.
- Dalam rapat tersebut, Tim Itjen KKP menyampaikan maksud dan harapan

dari kegiatan probity audit pelaksanaan kegiatan BP PP di Kab. Maros. Tim Itjen juga minta bantuan dan Kerjasama dari kelompok penerima PP di Kab. Maros untuk mengisi kuesioner probity audit BP PP.

- c. Berikut adalah data penerima BP PP di Kab. Maros, yaitu : 1). Mom Keren dengan Ketua Ibu Fitriani Aziz dengan Alamat di Kel. Raya Kec. Turikale; 2). Kelompok Marannu Maju dengan Ketua Ibu Kamisa dengan Alamat di Ds. Bonto Maruntu Kec. Lau; dan 3). Kelompok Padaidi dengan Ketua Bpk. Ilyas dengan Alamat di Ds. Maccini Baji Kec. Lau

•Kesimpulan:

Dari hasil wawancara dan diskusi, secara umum para kelompok penerima BP PP sudah mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan mekanisme yang dan melengkapi persyaratannya.



Gambar 33. Rapat Koordinasi Probitiy Audit Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan

#### 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP Peralatan Pengolahan

•Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Monitoring kegiatan dilaksanakan di beberapa daerah, diantaranya di Kab. Tabanan, dan Kab. Klungkung pada tanggal 28 – 30 Agustus 2024 .

•Peserta:

Monitoring dilaksanakan oleh Tim dari Dit. Pengolahan didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat dan penyuluh perikanan.

- Tujuan Kegiatan:

Untuk memastikan kegiatan pengadaan BP *Chest Freezer* berjalan baik dan melakukan verifikasi lapang ke kelompok penerima bantuan *Chest Freezer*.

- Pembahasan :

a. Kegiatan monitoring BP dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Klungkung, serta dengan melakukan kunjungan lapang ke kelompok.

b. Kegiatan dilakukan dengan uji substansi dan wawancara terhadap semua penerima bantuan, penyuluh dan tim teknis daerah. Pada kesempatan ini Ditjen PDSPKP menyampaikan hak dan kewajiban penerima bantuan pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan. Setelah barang diterima kelompok yang menerima bantuan agar dan memamfaatkan dengan baik dan melaporkannya melalui tim teknis daerah setiap bulan. Diharapkan bantuan yang ada dapat memberi stimulus yang baik bagi peningkatan usaha kelompok.

c. Penerima Peralatan Pengolahan Ikan di Kab. Tabanan adalah kelompok :  
1). Boga Sari; 2). Sari Nadi; dan 3). Selera Rasa. Sedangkan di Kab. Klungkung adalah kelompok Abon Ikan Kusamba

- Kesimpulan:

Kegiatan pengadaan PP secara umum telah berjalan dengan baik. Para kelompok penerima telah melengkapai persyaratan yang diminta. Dinas dan penyuluh juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para kelompok penerima PP.



Gambar 34. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP Peralatan Pengolahan

## IK 11. Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)

Indikator Kegiatan Sarana Pasca Panen yang Disediakan (unit) merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan portable yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Sarana Pasca Panen yang disediakan (Unit)	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, periode pelaporan indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit) diukur dengan periode tahunan yang targetnya ada pada triwulan IV, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan IV. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan III Tahun 2023 dimana pada Triwulan III juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Pada capaian Triwulan IV Tahun 2023 tercapai 9 unit, atau setara 100%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit) sebesar Rp 7.105.102.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 1.112.591.959,- atau sebesar 15,66% dari pagu anggaran.

Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah karena untuk beberapa Sarana Peralatan Pengolahan (SPP) memiliki

karakteristik khusus yang perlu pencermatan lebih di lapangan dan penentuan lokasi terkait dengan pihak lain.

Faktor Keberhasilan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, penyuluh, dan tentunya Tim Teknis Pusat maupun daerah.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah, pihak Dinas ataupun kelompok dapat memberikan info yang lebih detil terkait kondisi lokasi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit), yaitu:

#### 1. Rapat Koordinasi dengan Dinas KP penerima BP SPP

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Akses Pasar – Ditjen PDSPKP, GMB III Lt. 15 dan aplikasi Zoom

- Peserta:

Rapat dipimpin oleh Kepala Tim Kerja Sarpras Direktorat Pengolahan dengan peserta antara lain dari Auditor Itjen KKP, Timja PBJ dan BMN Ditjen PDSPKP, Timja di lingkup Dit. Pengolahan, serta wakil dari Dinas KP Kabupaten penerima bantuan pemerintah Sarana Pasca Panen, yaitu 1); Provinsi Aceh; 2). Kab. Lampung Selatan; 3). Kota Serang; 4). Kab. Ciamis; 5). Kab. Banyumas; 6). Kab. Jepara; 7). Kab. Maluku Tenggara; 8). Kab. Seram Bagian Barat; dan 9). Kab. Rote Ndao.

- Tujuan Kegiatan:

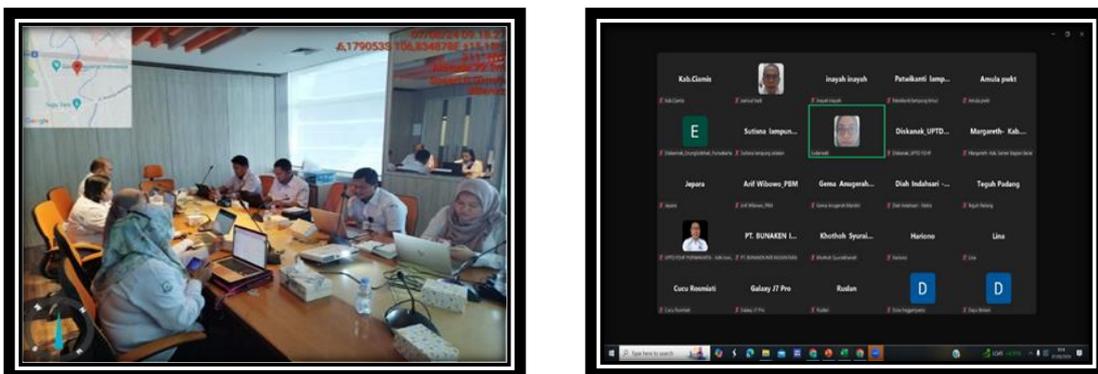
Dalam rangka koordinasi untuk penyaluran BP SPP

- Pembahasan :

- a. Dit. Pengolahan mengingatkan kembali administrasi yang terkait dengan proposal, dengan penekanan pada hasil verifikasi dan langkah selanjutnya untuk persiapan lokasi SPP.
- b. Beberapa hal yang perlu dicermati adalah sumber air dan informasi catu daya.
- c. Tantangan Proyek Rumput Laut dan Tuna, perlu dicermati khusus. Tantangan logistik seperti mengangkut rumput laut basah, yang membutuhkan kendaraan lebih lama dan menimbulkan risiko tinggi.

Kebutuhan listrik untuk penerangan, kipas angin, dan mesin pengepres manual tertutup. Tim menekankan perlunya menghormati adat istiadat lokal, seperti menggunakan para – para daripada menggantung rak untuk mengeringkan rumput laut.

- d. Lokasi alternatif dievaluasi berdasarkan kriteria seperti akses listrik dan kemudahan transportasi.
  - e. Itjen menguraikan rencana untuk kegiatan fasilitas pasca panen, termasuk pengujian mutu produk dan inspeksi bersama di beberapa lokasi.
  - f. Disamping juga dibahas alokasi sumber daya kepada penerima berdasarkan persyaratan khusus, seperti penyediaan air bersih dan listrik.
  - g. Pentingnya memanfaatkan bantuan oleh penerima dan pengembangan fasilitas pasca panen.
  - h. Perlunya dokumentasi yang tepat dan pemanfaatan kegiatan bantuan pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan, dan pentingnya laporan pemanfaatan rutin.
  - i. Tim Itjen juga merencanakan audit dari 13 hingga 15 Agustus 2024.
- Kesimpulan:
    - a. Semua lokasi BP SPP Reguler diminta melengkapi semua data administrasi.
    - b. Jika ada perubahan lokasi setelah hasil verifikasi lapang, agar segera menyampaikan kembali proposalnya dilengkapi data dukung untuk lokasi baru.
    - c. Akan dilakukan sampling probity audit BP SPP.



Gambar 35. Rapat Koordinasi dengan Dinas KP penerima BP SPP

## 2. Rapat Koordinasi Probitiy Audit Pelaksanaan BP Sarana Pasca Panen

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :  
Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 12 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat SKP - Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13.
- Peserta:  
Pertemuan dipimpin PJ Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Auditor Itjen 4 KKP, serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM dan pelaksana di lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, Direktorat PBM.
- Tujuan Kegiatan:  
Dalam rangka koordinasi untuk percepatan penyaluran BP SPP
- Pembahasan :
  - a. Dalam rangka. Untuk memastikan kegiatan pengadaan BP SPP berjalan sesuai dengan mekanisme, maka dilakukan kegiatan Probity Audit oleh Auditor Itjen KKP terhadap kegiatan tersebut. Probity audit adalah audit yang memastikan bahwa semua proses dan keputusan yang dibuat dalam suatu proyek mematuhi prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan keadilan. Probity audit penting terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan dana publik atau kepentingan publik seperti BP SPP.
  - b. Terkait dengan rencana probity audit tersebut, Itjen KKP telah menerbitkan Surat tugas Inspektur Jenderal KKP.
  - c. Disamping penelaahan di Pusat, untuk probity audit ini Pihak Itjen juga merencanakan kunjungan lapang ke beberapa lokasi. Terkait hal ini, pihak Itjen meminta agar ada pendamping dari Dit. Pengolahan dan Bina Mutu.
  - d. Dalam rangka mendukung kegiatan probity Audit dimaksud, Itjen juga meminta dilakukan peminjaman dokumen.
  - e. Probity audit SPP mencakup 17 lokasi SPP, saat ini data dukung yang tersedia baru sebatas SPP ikan Air Tawar/Bandeng. Untuk SPP Tuna, RL dan Rajungan belum diupload
  - f. Perlu ada informasi mengenai prosedur pemilihan penyedia barang dan cara mengetahui spek barang dari penyedia dengan Dok Spek PPK.
  - g. Perlu klarifikasi terkait data bahwa dalam Surat Pesanan Kab. Ciamis dan Serang terdapat ongkir, sementara Penyedia tidak menampilkan referensi ongkir.

- Kesimpulan:

- a. Dit. Pengolahan akan melengkapi dokumen untuk semua lokasi BP SPP
- b. Terkait dengan Sounding market di ecatalog dan chating melalui ecatalog, akan diberikan bukti – bukti, karena pada saat rapat website e katalog sedang error. Bukti akan diupload ke dokumen data dukung
- c. Demikian juga bukti penawaran dan negosiasi dari penyedia di ecatalog belum bisa ditampilkan karena tidak bisa masuk akun PPK. Bukti akan diupload ke dokumen data dukung.



Gambar 36. Rapat Koordinasi Probity Audit Pelaksanaan BP Sarana Pasca Panen

### 3. Rapat Koordinasi dan Uji Coba BP SPP Tepung Ikan di Lampulo - Aceh

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat Koordinasi dilaksanakan di UPI Tepung Ikan Lampulo Aceh pada Kamis tanggal 26 September 2024.

- Peserta:

Kepala UPTD PPS Kutaraja Lampulo, Ketua Koperasi Sabena (calon pengelola), Bp Dwi Budiyanto (TA dari BRIN) dan perwakilan Dit. Pengolahan

- Tujuan Kegiatan:

Koordinasi pemanfaatan UPI Tepung Ikan sekaligus uji coba peralatan

- Pembahasan :

- a. Bahan baku yang digunakan untuk produk tepung dan minyak berupa ikan dencis dengan berat 45,16 kg dan ikan tongkol 48,62 kg
- b. Pada tahap ini dilakukan simulasi dan praktek penanaman mulai dari penerimaan bahan baku, penimbangan, pencucian, pengukusan/perebusan,

pengepresan, pengeringan dan penepungan

- c. Pada proses pemasakan, sarana yang ada adalah panci perebusan dengan kapasitas 75 liter air setara dengan 40 – 50 kg ikan, proses pemasakan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan kompor yang digunakan jenis low pressure. Menurut literature proses pemasakan dengan model perebusan membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan pengukusan membutuhkan waktu 1,5 jam. Dalam uji coba, cara pengukusan membutuhkan waktu diatas 2,5 jam, sedangkan dengan perebusan membutuhkan waktu 2 jam. Dengan waktu yang lama terjadi pemborosan bahan bakar.
- d. Perpindahan antar pengukusan dan pengepresan menggunakan crane. Rendemen pengepresan 64,66 %, tingginya rendemen dikarenakan alat pengepress tidak optimal dalam pengepresan (tidak sampai habis menekan produk). Dengan demikian produk masih mengandung air dan minyak. Hal ini berpengaruh kepada proses pengeringan selanjutnya
- e. Pada pengeringan, dengan ukuran ruang pengering 3 x 3 x 2 meter maka volume 18 m<sup>3</sup> atau setara dengan 10,8 ton ikan. Sedangkan sumber panas mesin (dari informasi) hanya dapat memanaskan ikan sebesar 1 ton atau dengan ruang pengering berukuran maks dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 2 meter maka volume 4,5 m<sup>3</sup> setara dengan 2,7 ton. Oleh karena itu diperlukan partisi (pembatas untuk memperkecil ruangan), disamping itu juga diperlukan penutupan lubang lubang yang (dibawah pintu pengering) untuk mencegah kebocoran udara panas
- f. Akibat dari pengering yang tidak konstan, menyebabkan ikan yang dikeringkan mengalami kemunduran mutu (kebusukan) serta pemborosan bahan bakar (membutuhkan lebih dari 4 tabung gas)
- g. Pada kesempatan ini disampaikan kepada Koperasi bahwa dalam setiap proses pengolahan harus dilakukan pembersihan alat dan tempat sebelum dan sesudah proses yang ditujukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah terjadinya kontaminasi. Disamping itu, disarankan kepada Koperasi untuk segera menunjuk PIC Rumah Tepung Ikan sehingga sarana yang telah diadakan dapat dijaga, dirawat dan dimanfaatkan. Ditjen PDSPKP akan senantiasa melakukan pendampingan sehingga Rumah Tepung Ikan

dapat beroperasi dan bermanfaat baik pembuatan tepung ikan maupun dengan diversifikasi produk olahan hasil perikanan lainnya.

- Kesimpulan:

- a. Penyediaan panci kukus kapasitas 200 L sebanyak 5 unit, mesin pencacah daging, modifikasi alat pengepresan, alat pengaduk pada tangka minyak netralisasi, test kit FFA, ruangan pengeringan ikan termasuk rak dan tempat penjemuran ikan atau sarana penjemuran ikan (solar dryer),
- b. Penyediaan bahan baku dengan harga yang murah
- c. Pembinaan SKP
- d. Pembinaan Diversifikasi Produk
- e. Pembinaan Permodalan dan Kelembagaan
- f. Promosi dan analisa pasar
- g. Pengujian proksimat tepung ikan

#### 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP PP

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Monitoring kegiatan dilaksanakan di beberapa daerah, diantaranya di Kab. Purwakarta, Kab. Banyumas, Kota Serang, dan Kab. Ciamis pada bulan September 2024.

- Peserta:

Monitoring dilaksanakan oleh Tim dari Dit. Pengolahan didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat dan penyuluh perikanan.

- Tujuan Kegiatan:

Untuk memastikan kegiatan pengadaan BP SPP berjalan baik dan melakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan BP SPP di lapang dan pembinaan ke kelompok penerima bantuan BP SPP.

- Pembahasan :

- e. Kegiatan monitoring BP SPP dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten /Kota dan melakukan kunjungan lapang ke kelompok.
- f. Koordinasi dengan Dinas, penyuluh dan kelompok terkait kelengkapan administrasi dan verifikasi.
- g. Pada saat kunjungan ke lapangan, Tim Dit. Pengolahan juga melakukan

pemeriksaan fisik terhadap BP SPP yang sudah dikerjakan oleh penyedia.

h. Selanjutnya Tim Dit. Pengolahan melakukan pembinaan kepada kelompok mengenai GMP SSOP dan nilai tambah.

•Kesimpulan:

- a. Kegiatan pengadaan BP SPP secara umum telah berjalan dengan baik. Para kelompok penerima telah melengkapi persyaratan yang diminta. Dinas dan penyuluh juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para kelompok penerima SPP.
- b. Penyedia telah melakukan kegiatan pengadaan sesuai dengan surat pesanan (Kab. Lampung Selatan, Kota Serang, Kab. Ciamis, Kab. Banyumas, Kab. Jepara).



Gambar 37. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP PP

## IK 12. Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (Unit)

Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan merupakan jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan portable yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pascapanen sehingga mutu tetap terjaga dan selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan di lokasi Kampung Perikanan Budidaya (MP Korporasi). Adapun paket Sarana Pascapanen yang disediakan antara lain : Sarana Pascapanen Ikan Air Tawar dan Rumput Laut. Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reviu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima

bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi)	8	-	-	8	8			8	100,00	100,00	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit) adalah 8 Unit. Capaian indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit) sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 8 Unit atau meningkat sebesar 100% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 0 Unit. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 8 Unit. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 8 Unit, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 100%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan sebesar Rp1.500.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 1.077.512.100,- atau sebesar 71,83 % dari pagu anggaran.

Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III relatif tidak ada. Faktor Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah, koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, penyuluh, dan tentunya Tim Teknis Pusat maupun daerah.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya yaitu, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

Indikator kinerja sarana pasca panen MP Koorporasi yang disediakan sudah selesai 8 unit (fisik 100 %). Lokasi BP SPP Korporasi yaitu di : Kab. Situbondo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Purwakarta, Kab. Tasikmalaya, Kab. Lombok Tengah, Kota Padang, Kab.Lampung Timur, dan Kab.Pangkep. Selanjutnya akan dilakukan proses BAST dari KKP ke kelompok.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit), yaitu:

1. Rapat Koordinasi dengan Dinas KP penerima BP SPP MP Korporasi

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Akses Pasar – Ditjen PDSPKP, GMB III Lt. 15 dan aplikasi Zoom

- Peserta:

Rapat dipimpin oleh PJ TimJa Sarpras Direktorat Pengolahan dengan peserta antara lain dari Auditor Itjen KKP, Timja PBJ dan BMN Ditjen PDSPKP, Timja di lingkup Dit. Pengolahan, serta wakil dari Dinas KP Kabupaten penerima bantuan pemerintah Sarana Pasca Panen, yaitu : 1) Lombok Tengah (Lele); 2) Gunungkidul (Lele); 3) Situbondo (Lele); 4) Pangkep (Bandeng); 5) Tasikmalaya (Nila); 6) Kota Padang (Lele); 7) Purwakarta (Lele); dan 8) Lampung Timur

- Tujuan Kegiatan:

Dalam rangka koordinasi untuk penyaluran BP SPP MP Korporasi.

- Pembahasan :

- a. Dinas KP Kab. Lombok Tengah menanyakan terkait proses pembangunan dilakukan swakelola atau terima jadi serta apakah di bulan September 2024 kegiatan sudah siap. Mengusulkan untuk pelatihan untuk produk perikanan yang lainnya.
- b. Dinas KP Kab. Pangkep meminta agar dapat dishare gambar/disain pondasi, untuk disesuaikan. Disamping juga mengkonfirmasi kebutuhan Listrik minimal 1.300 Watt.
- c. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Situbondo menanyakan Tugas Tim Teknis di daerah. Tim Teknis menerima, mengawal dan mengawasi sejak

proses pemasangan sampai dengan ujicoba.

- d. Dari Dinas KP Kab. Gunung Kidul menginformasikan bahwa lahan telah disiapkan, dan Kartu Kusuka dalam proses.
  - e. Dinas KP Kab. Tasikmalaya meminta agar dapat dikirim gambar yang lebih detail serta mohon waktu untuk kesiapan Kartu Kusuka, dikarenakan mengalami kesulitan dalam penginputan data.
  - f. Dinas KP Kab. Purwakarta menanyakan terkait penempatan septic tank, kapan pondasi harus siap serta meminta agar gambar detail dapat dishare. Purwakarta menjadi calon lokasi pertama pemasangan Sarana Pasca Panen tahun 2024 sehingga pada minggu ke2 bulan Juli 2024 pondasi sudah selesai/siap. Produksi lele saat ini 30-50 Kg/Minggu.
  - g. Dinas KP Lampung Timur menanyakan apakah peralatan/sarana dapat dimanfaatkan untuk produk selain produk yang selama ini dilakukan.
  - h. Dinas KP Kota Padang menanyakan terkait bahan untuk rumah produksi yang akan diterima, yaitu terbuat dari bahan panel seperti dinding pada Cold storage dengan ketebalan 5cm yang didalamnya terdapat steroform, dengan lapisan luar dari bahan aluminium.
- Kesimpulan:
    - a. Semua lokasi BP SPP diminta melengkapi semua data administrasi.
    - b. Melakukan pendampingan dan monitoring ke kelompok penerima BP SPP MP Korporasi.
    - c. Akan dilakukan sampling probity audit BP SPP.



Gambar 38. Rapat Koordinasi dengan Dinas KP penerima BP SPP MP Korporasi

## 2. Rapat Koordinasi Probity Audit Pelaksanaan BP Sarana Pasca Panen MP Korporasi

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 12 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat SKP - Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13.

- Peserta:

Pertemuan dipimpin PJ Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Auditor Itjen 4 KKP, serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM dan pelaksana di lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, Direktorat PBM.

- Tujuan Kegiatan:

Dalam rangka koordinasi untuk percepatan penyaluran BP SPP MP Korporasi

- Pembahasan :

- a. Dalam rangka. Untuk memastikan kegiatan pengadaan BP SPP berjalan sesuai dengan mekanisme, maka dilakukan kegiatan Probity Audit oleh Auditor Itjen KKP terhadap kegiatan tersebut. Probity audit adalah audit yang memastikan bahwa semua proses dan keputusan yang dibuat dalam suatu proyek mematuhi prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan keadilan. Probity audit penting terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan dana publik atau kepentingan publik seperti BP SPP.
- b. Terkait dengan rencana probity audit tersebut, Itjen KKP telah menerbitkan Surat tugas Inspektur Jenderal KKP.
- c. Disamping penelaahan di Pusat, untuk probity audit ini Pihak Itjen juga merencanakan kunjungan lapang ke beberapa lokasi. Terkait hal ini, pihak Itjen meminta agar ada pendamping dari Dit. Pengolahan dan Bina Mutu.
- d. Dalam rangka mendukung kegiatan probity Audit dimaksud, Itjen juga meminta dilakukan peminjaman dokumen.
- e. Probity audit SPP mencakup 17 lokasi SPP, termasuk untuk BP SPP MP Korporasi.
- f. Perlu ada informasi mengenai prosedur pemilihan penyedia barang dan cara mengetahui spek barang dari penyedia dengan Dok Spek PPK.

- Kesimpulan:

- a. Dit. Pengolahan akan melengkapi dokumen untuk semua lokasi BP SPP

- b. Terkait dengan Sounding market di ecatalog dan chating melalui ecatalog, akan diberikan bukti – bukti, karena pada saat rapat website e katalog sedang error. Bukti akan diupload ke dokumen data dukung
- c. Demikian juga bukti penawaran dan negosiasi dari penyedia di ecatalog belum bisa ditampilkan karena tidak bisa masuk akun PPK. Bukti akan diupload ke dokumen data dukung.



Gambar 39. Rapat Koordinasi Probyty Audit Pelaksanaan BP Sarana Pasca Panen MP Korporasi

### 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP PP

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Monitoring kegiatan dilaksanakan di beberapa daerah, diantaranya di Kota Padang, Kab. Purwakarta, Kab. Tasikmalaya, Kab. Situbondo, dan Kab. Gunung Kidul pada bulan Agustus dan September 2024.

- Peserta:

Monitoring dilaksanakan oleh Tim dari Dit. Pengolahan didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat dan penyuluh perikanan.

- Tujuan Kegiatan:

Untuk memastikan kegiatan pengadaan BP SPP berjalan baik dan melakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan BP SPP di lapang dan pembinaan ke kelompok penerima bantuan BP SPP.

- Pembahasan :

- a. Kegiatan monitoring BP SPP dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten /Kota dan melakukan kunjungan lapang ke kelompok.

- b. Koordinasi dengan Dinas, penyuluh dan kelompok terkait kelengkapan administrasi dan verifikasi.
  - c. Pada saat kunjungan ke lapangan, Tim Dit. Pengolahan juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap BP SPP yang sudah dikerjakan oleh penyedia.
  - d. Selanjutnya Tim Dit. Pengolahan melakukan pembinaan kepada kelompok mengenai GMP SSOP dan nilai tambah.
- Kesimpulan:
- a. Kegiatan pengadaan BP SPP secara umum telah berjalan dengan baik. Para kelompok penerima telah melengkapi persyaratan yang diminta. Dinas dan penyuluh juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para kelompok penerima SPP.
  - b. Penyedia telah melakukan kegiatan pengadaan sesuai dengan surat pesanan.



Gambar 40. Monitoring pelaksanaan kegiatan BP PP

### Kegiatan 10. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan

#### **IK 13. Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)**

Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina merupakan bentuk usaha pembinaan

terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan sebanyak 1.800 UMKM.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)	1.360	820	-	1.800	1.430	820		1.430	105,15	79,44	-	-

Pada triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) adalah 1.430 UMKM. Capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) sampai dengan triwulan III adalah sebesar 1.430 UMKM atau meningkat sebesar 74,39% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 820 UMKM. Capaian ini setara dengan 105,15% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 1.360 UMKM atau setara 9,16% terhadap capaian triwulan III tahun 2023 yakni 1.310 produk, yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2023. Jika

dibandingkan terhadap capaian triwulan III tahun 2023 yakni 1.310 UMKM, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 9,16%. Dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 1.800 UMKM, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 79,44%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) sebesar Rp1.021.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 904.974.433,- atau sebesar 88,64 % dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (UMKM) yaitu pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan UPI skala mikro dan kecil belum ditemukan kendala pada TW III. Kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Rekomendasi/ tindak lanjut untuk mengatasi kendala adalah dengan melaksanakan pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil secara remote atau online.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pada indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (UMKM), yaitu:

- a. Koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kab./Kota dan *stakeholder* berjalan dengan baik.
- b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang terkait kelayakan dasar dan pemenuhan legalitas
- c. Pelaku usaha menerapkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- d. Pelaku usaha bisa memiliki SKP dan HACCP.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah rekomendasi yang dapat dilakukan pada kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan UPI skala mikro dan kecil yaitu peningkatan peran serta anggota tim klinik mutu dalam penyampaian informasi terkait mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina

Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM), yaitu:

1. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Sentra Pemindangan

• Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Kegiatan dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2024 di Kabupaten Klungkung dan Badung – Bali.

• Peserta:

Kegiatan dihadiri oleh 30 pelaku usaha di sentra pemindangan Klungkung dan 30 pengolah pindang di sentra pemindangan Badung - Bali

• Tujuan Kegiatan:

Tujuan pembinaan terhadap pengolah pindang di Sentra Pemindangan di Klungkung dan Badung yaitu dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan.

• Pembahasan

a. Pembinaan pelaku usaha dilaksanakan dalam rangka optimalisasi operasional Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (Sentra PHP) melalui penerapan teknik penanganan dan pengolahan ikan yang baik dan hygiene pangan, serta pendampingan untuk mendapatkan SKP. Sentra PHP selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan sebagai pusat produk perikanan bermutu, berdaya saing, dan menjadi sentra produk unggulan di daerah melalui modeling Sentra PHP dengan penguatan ekosistem bisnis hulu-hilir.

b. Materi edukasi pembinaan kepada pelaku usaha di Kab. Klungkung antara lain:

- Profiling dan pengembangan Modeling Sentra Pengolahan
- Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik,
- Pengenalan Good Manufacturing Practice (GMP) pada Unit Pengolahan Ikan
- Sosialisasi akses pembiayaan bagi UPI Mikro Kecil dari BRI Cabang Kusamba

c. Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan di Kab. Klungkung sebagai berikut:

- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang cara

penanganan dan pengolahan ikan yang baik, yang pada tahap selanjutnya mampu menerapkan kelayakan dasar pengolahan (Good Manufacturing Practices).

- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang cara penanganan dan pengolahan ikan yang baik, yang pada tahap selanjutnya mampu menerapkan kelayakan dasar pengolahan (Good Manufacturing Practices).
- Pelaku usaha Sentra Pemindangan Ikan Klungkung berkomitmen melakukan transformasi penggunaan bahan kayu bakar menjadi kompor gas elpiji secara bertahap (berdasarkan surat edaran BUPDA Desa Adat Kusamba), dan menjaga kebersihan lingkungan tempat pengolahan pindang.
- Dukungan fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan BRI cabang Kusamba
- Rencana program magang pengabdian masyarakat Taruna/i Poltek Jembrana di Sentra Pengolahan Pindang Klungkung (Oktober – November 2024) untuk pendampingan penerapan kelayakan dasar pengolahan.
- Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan peralatan pengolahan dan monitoring pekerjaan fisik rehabilitasi 6 unit bangsal Sentra PHP yang bersumber dari alokasi program DAK 2024

d. Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan di Kab. Badung sebagai berikut:

- Pembinaan dilakukan di Poklahsar Merta Segara di Dusun Br. Pande Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pengolahan, Kepala Dinas Perikanan KAbupaten Badung, Penyuluh dan Pembina Mutu Kabupaten Badung
- Poklahsar Merta Segara dikukuhkan pada tanggal 20 Februari 2017 dengan no. sertifikat pengukuhan 41 Tahun 2017 (Pemula) dan mendapatkan peningkatan kelas kelompok menjadi madya tanggal 31 Oktober 2022
- Poklahsar Merta Segara memiliki jumlah anggota sebanyak 48 orang dengan ketua Ni Md Sumudri

- Saat ini pelaku usaha memperoleh bahan baku dari supplier di Desa tersebut dan pindang yang dihasilkan dipasarkan hanya di wilayah Kabupaten Badung
- Semua pelaku usaha di sentra pemindangan Kab. Badung belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan ada kesalahan KBLI yaitu pemasaran hasil perikanan yang seharusnya adalah pemindangan

•Kesimpulan:

- Koordinasi lanjutan dalam rangka sinergi program dan implementasi modeling Sentra Pengolahan Hasil Perikanan bersama Pemda dan K/L terkait (Kemendes PDT, Kemenpar, Bapenas, Bapanas, Pertamina, Bank BRI, dll)
- Koordinasi lanjutan dalam rangka sinergi program dan implementasi modeling Sentra
- Pengolahan Hasil Perikanan bersama Pemda dan K/L terkait (Kemendes PDT, Kemenpar, Bapenas, Bapanas, Pertamina, Bank BRI, dll)
- Dinas Perikanan Kab. Badung berkomitmen untuk melakukan pembinaan kelayakan dasar pengolahan bagi pelaku usaha (pemindang) di sentra pemindangan badung serta melakukan pendampingan pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.



Gambar 41. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Sentra Pemindangan

## 2. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Kab. Purwakarta, Jawa Barat / 13-15 Agustus 2024
- b. Kab. Bogor, Jawa Barat / 29 Agustus 2024
- c. Kab. Kendal, Jawa Tengah / 6 September 2024
- d. Kab. Karawang, Jawa Barat / 25-26 September 2024

- Peserta:

- a. Kab. Bogor yaitu 25 UPI MK yaitu Bunda Kitchen, Kedai Bu Ebet, Pempek Pangsit Gio, SAG Karya Anak Bangsa, Pempek Lepeden Raya, Pempek Gkiro, Petani Bertopi, RM Bu Lela, Maksim, Atiak, Imelda, Moda, Dapur Endang, Gurame Buhun, Dina Wahyu, Kop. Sumber Risky, Esi Endang, Gizi Permai, Rinuka, Erni, Gita, Bakulan Si Bungsu, PKK, Culinary dan Bursa Catering Aqikah.
- b. Kab. Purwakarta yaitu 2 UPI MK penerima DAK 2022 yaitu Koperasi Produsen Jaya Barokah dan Mina Makmur Jati Mekar
- c. Kab. Kendal yaitu 30 pelaku usaha diantaranya adalah anggota Poklahsar Sumber Laut, Poklahsar Empuk Saji Citroboni, Poklahsar Putri Mina Mandiri dan Poklahsar Mina Bangun Mandiri yang mendapatkan bantuan DAK Bedah UPI Tahun 2024
- d. Kab. Karawang yaitu 1 UPI MK yaitu Poklahsar Raosna.

- Tujuan Kegiatan:

Tujuan kegiatan yaitu memberikan pemahaman dan pembinaan agar pelaku usaha dapat menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dengan baik serta produk yang dihasilkan berdaya saing dan memenuhi legalitas usaha dan ijin edar.

- Pembahasan:

- a. Kab. Bogor
  - Telah dilakukan pembinaan kelayakan dasar pengolahan terhadap 25 UMKM pemula
  - Pembinaan dalam bentuk pemberian materi, paparan dan diskusi. Pembinaan dilakukan di Gedung Aula A, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupatrn Bogor

- Pemberian materi tersebut antara lain adalah
  - a) Sosialisasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
  - b) Tata cara pengolahan pengolahan Ikan yang baik (GMP)
  - c) Prosedur Operasi Standar untuk Sanitasi (SSOP)
  - d) Tata cara untuk mendapatkan SKP
- Dari paparan dan diskusi Nampak peserta dapat memahami materi yang diberikan terutama mengenai:
  - a) Kelayakan bangunan dan layout yang sesuai dengan kondisi bangunan UKM yang umumnya masih terdiri satu ruangan saja. Diantara UKM tersebut bangunannya ada yang masih menyatu dengan aktifitas rumah tangga
  - b) Teknik pengolahan produk dan distribusinya yang harus memperhatikan rantai dingin terutama untuk produk olahan yang berbasis lumatan ikan seperti, pempek, nungget, otak2 sioamy dan marinasi ikan.
  - c) Aspek sanitasi terutama budaya kerja yang bersih untuk karyawan dan sanitasi peralatan
  - d) Penggunaan bahan tambahan dan kepedulian terhadap tidak digunakannya bahan berbahaya untuk pangan
  - e) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengemasan dan pelabelan



Gambar 42. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Bogor

b. Kab. Purwakarta

- Koperasi Produsen Jaya Barokah Bersama Purwakarta beralamat di Kampung Cidangeur , Desa Lingarsari, Kec. Plered. Purwakarta. Kelompok ini baru didirikan pada awal tahun 2024. Disamping memiliki basis usaha budidaya ikan lele (pendederan, pembesaran, penjualan dan pembuatan pakan mandiri dan pakan alternatif) kelompok ini juga telah memanfaatkan hasil budidaya untuk dijadikan produk olahan lele bumbu (marinasi). Dalam bentuk bahan baku segar, ikan yang dibeli seharga Rp 19.000. Dari bahan baku ini bila dilakukan pengolahan dengan marinasi (lele bumbu), dan beberapa cost diluar bahan baku, didapatkan ongkos produksi Rp. 9.000 sehingga dengan total biaya produksi adalah Rp. 28.000. dengan rendemen sekitar 80%. Maka dengan harga jual Rp. 40.000/kg dapat diperoleh margin sekitar Rp8000/kg. Untuk menjadi olahan marinasi ini, ikan lele segar mendapat perlakuan penyiangan, dengan pembuangan isi perut dan insang, pencucian, pembumbuan dan selanjunya dikemas dan dibekukan. Dari proses ini didapatkan rendemen maksimum 70-80%. Pencapaian rendemen ini perlu ditrial terus ke pengolah pemula. Dengan kondisi seperti ini keuntungan ini nilai tambah

yang diperoleh masih kecil atau sekitar 28%. Kondisi fisik dari UPI UMK Koperasi Produsen Jaya Barokah:

- a) Locket penerimaan bahan baku dan pintu masuk yang dilengkapi dan dengan tirai plastik namun kondisi lembaran susunan tirai plastic yang masih terdapat celah masuk kontaminan dari luar
  - b) Penempatan kasa nyamuk pada jendela sehingga saat dibuka masih bisa menghambat kontaminan berupa serangga atau bintang pengelat.
  - c) Penempatan pembatas (partisi sederhana) untuk membatasi pergerakan peralatan/orang dari area basah (cuci bilas) ke area kering (pengemasan)
  - d) Penambahan kelengkapan peralatan : Tempat sampah, tempat penyimpanan; bumbu, bahan kemasan dan bahan sanitasi/kimia
  - e) Pengaturan kembali posisi, rak sepatu dan gantungan pakaian kerja disekitar pintu masuk dan area pembersihan.
- UPI MK Mina Makmur Jati Mekar, beralamat pada Kp Tegal Buah Rt 16/05 Desa Jati Mekar. Kec. Jatiluhur. Merupakan UPI penerima bantuan DAK tahun 2022. Beberapa hal yang perlu pembenahan terkait sarpars di UPI adalah sebagai berikut:
- a) Ruang ganti belum dilengkapi loker
  - b) Belum tersedia rak atau tempat penyimpanan bahan dan peralatan
  - c) Toilet perlu pembersihan dan dilengkapi sarana sanitasinya
  - d) Perlu pembenahan terhadap barang-barang yang tidak terpakai di UPI
  - e) Penyedia lampu di UPI sesuai persyaratan
  - f) Perlu penyediaan septic tank sebagai kelengkapan dari penggunaan toilet.



Gambar 43. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Purwakarta

#### c. Kab. Kendal

- Bantuan DAK Bedah UPI ini merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen PDSPKP dalam peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Tahun 2024 bantuan Bedah UPI sebanyak 244 unit di 97 Kab/Kota termasuk Kab. Kendal.
- Penerima Bedah UPI Tahun 2024 di Kab. Kendal yaitu 4 Poklhasar antara lain Poklhasar Sumber Laut, Poklhasar Empuk Saji Citroboni, Poklhasar Putri Mina Mandiri dan Poklhasar Mina Bangun Mandiri.
- Diharapkan dengan bantuan ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan omset poklhasar, sekaligus menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya dalam memproduksi olahan ikan bandeng yg sesuai dengan standar kelayakan pengolahan.
- Saat ini poklhasar tersebut tergabung di dalam Koperasi Upik Ngrejekeni Bersama untuk meningkatkan produksi dan pemasaran.



Gambar 44. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Kendal

#### d. Kab. Karawang

- Poklhasra Raosna di Karawang memproduksi dan bandeng presto bandeng kaleng telah memperoleh SKP dan mengikuti Kurasi UKM Naik Kelas.
- Berdasarkan hasil kegiatan Kurasi, Poklhasra Raosna di rekomendasikan untuk mengurus Izin Edar (MD) dan HACCP sehubungan telah adanya permintaan bandeng kaleng ke Uganda.
- UKM telah melakukan proses pengurusan izin MD untuk bandeng presto dan sedang melakukan tindakan perbaikan atas temuan inspeksi BPOM.
- Sebagai tindak lanjut hasil kurasi pembinaan penerapan kelayakan dasar maka dilaksanakan pembinaan terhadap penerapan HACCP, Ketertelusuran dan Pendampingan penusunan 64 dokumen Pra HACCP yang diselaraskan dengan dokumen persyaratan MD



Gambar 45. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Karawang

### 3. Webinar Cara Mudah Mendapatkan Legalitas Merek dan Ijin Edar MD

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan secara live youtube Ditjen PDSPKP.

- Peserta:

Peserta yang hadir pada kegiatan Webinar Cara Mudah Mendapatkan Legalitas Merek dan Ijin Edar MD sebanyak 728 orang yang terdiri dari UMKM, pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, pemerintah dan penyuluh kelautan dan perikanan.

- Tujuan Kegiatan:

- a. Memberikan pemahaman secara mendalam kepada UMKM tentang peran merek dan izin edar MD sebagai faktor penentu daya saing produk kelautan dan perikanan.
- b. Memberikan pedoman langkah demi langkah yang praktis dan mudah dipahami bagi UMKM dalam proses pengurusan merek dan izin edar MD.

- Pembahasan

- a. Narasumber yang menyampaikan materi pada sosialisasi ini yaitu Direktorat Merek dan Indikasi Geografis - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan materi "Pelindungan Merek di Indonesia" serta Direktorat Registrasi Pangan Olahan - Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan materi "Persyaratan dan Mekanisme Pengurusan Izin Edar MD".

- b. Proses pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencakup beberapa tahap, yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, publikasi di berita resmi merek, hingga penerbitan sertifikat merek. Dengan merek yang sudah terdaftar, produk usaha terlindungi dari ancaman pemalsuan dan penyalahgunaan.
  - c. Tips pendaftaran merek seperti unik, mudah diucapkan, ajukan hanya jenis barang/jasa yang memang ingin diproduksi/ diperdagangkan, serta memastikan kesesuaian tampilan merek, dengan tipe merek yang dipilih dan nama merek yang diinput pada sistem.
  - d. Izin MD wajib dimiliki oleh produk-produk pangan yang diproduksi secara lokal maupun impor sebelum beredar di pasar. Tujuan utama dari Izin MD adalah memastikan bahwa produk yang diperdagangkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat.
  - e. Kewajiban pemenuhan komitmen pelaku usaha dalam mendapatkan MD adalah persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB); persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya; persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta persyaratan label pangan olahan.
- **Kesimpulan:**

Pelaksanaan Webinar Cara Mudah Mendapatkan Legalitas Merek dan Ijin Edar MD telah meningkatkan pemahaman UMKM dan stakeholder terkait mekanisme pengurusan merek dan ijin edar MD sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.



Gambar 46. Webinar Cara Mudah Mendapatkan Legalitas Merek dan Ijin Edar MD

#### 4. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Kegiatan Klinik Mutu pada kegiatan bazar bulanan produk kelautan dan perikanan dilaksanakan pada setiap bulan (Juli, Agustus, September) di Gedung Parkir GMB 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Pameran Seafood Skala International pada tanggal 18-19 Juli 2024 di Jakarta Convencion Center.
- c. Kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 31 tanggal 26 Juli 2024 di Jakarta
- d. Gelar Akbar Gemar Ikan tanggal 10-11 Agustus 2024 di Cirebon

- Peserta:

Peserta yang mengikuti kegiatan klinik mutu terdiri dari seluruh kalangan masyarakat yang mengikuti bazar/expo termasuk UPI skala mikro dan kecil.

- Tujuan Kegiatan:

Tujuan adanya klinik mutu memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana terkait jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat baik secara online (Instagram) maupun offline.

- Pembahasan:

- a. Kegiatan Klinik Mutu pada kegiatan bazar bulanan produk kelautan dan perikanan

Bazar Perikanan dilaksanakan setiap bulan di GMB III, Jakarta. Bazar bertujuan yaitu memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana terkait jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat yang hadir dalam acara bazar. Bazar dihadiri oleh UKM Perikanan dari berbagai daerah, Klinik mutu dapat menjadi solusi bagi UKM yang memiliki permasalahan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. UKM yang melakukan konsultasi dengan tim klinik mutu, selanjutnya akan menjadi target pembinaan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

b. Pameran Seafood Skala International

Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Napindo. Pameran tidak hanya menghadirkan pelaku usaha perikanan tetapi ada dari pertanian, dan peternakan. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ikut berpartisipasi dengan 2 booth, Booth PDSPKP memperkenalkan berbagai produk UMKM Binaan dan juga produk produk hasil pengembanan diversifikasi. Tim klinik mutu juga ikut serta dalam pameran ini dengan memberikan edukasi terkait mutu produk dan kandungan didalamnya kepada masyarakat yang mengunjungi Booth PDSPKP. Pengunjung Booth terdiri dari masyarakat sekitar Jakarta dan anak sekolah (SD, SMP dan SMA). Bazar dihadiri juga oleh UKM Perikanan dari berbagai daerah, Klinik mutu dapat menjadi solusi bagi UKM yang memiliki permasalahan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. UKM yang melakukan konsultasi dengan tim klinik mutu, selanjutnya akan menjadi target pembinaan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Gambar 47. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan di Pameran Seafood Skala International

### c. Kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)

Dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 31, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKK) mengundang perwakilan siswa SMP dan SMA di DKI Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Bersama dengan seluruh perwakilan eselon II lingkup PDSPKP. Pada acara dimaksud dilakukan sosialisasi terkait dengan manfaat protein ikan untuk generasi emas dan edukasi kesehatan reproduksi di Ballroom Gedung Mina Bahari 3, DKI Jakarta.

PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada acara Harganas ke 31 dengan Tema “ Bersama Protein Ikan Wujudkan Generasi Emas” dengan tujuan asupan protein ikan akan menciptakan “Keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas”.dalam Kegiatan ini juga dilaksanakan Bazar produk kelautan dan perikanan dengan menampilkan produk perikanan dan jajanan sehat yang mengandung fortifikasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI) seperti cilok HPI dan wafel HPI. Selain itu, beberapa Pelaku Usaha ikut hadir untuk promosi produk dan edukasi perikanan yaitu booth Klinik Mutu.

Hidrolisat Protein ikan merupakan produk utama yang ditampilkan dengan jajanan sehat yang mengandung fortifikasi Hidrolisat Protein Ikan. Jajanan sehat diberikan kepada siswa yang hadir. Antusias pengunjung sangat tinggi untuk mencoba produk perikanan dan jajanan pasar yang disajikan. Selain itu ada kegiatan klinik mutu dengan memberikan doorprize apabila

siswa hadir ke booth dan dapat menjawab pertanyaan terkait perikanan. Klinik mutu memberikan edukasi kepada para pengunjung terkait dengan kesegaran ikan, kandungan gizi ikan, tips memilih ikan segar dan pentingnya makan ikan dengan membagikan leaflet.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan perjanjian Kerjasama antara PDSPKP dan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN tentang peningkatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga melalui konsumsi ikan dalam rangka percepatan penurunan stunting.



Gambar 48. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan di Kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)

#### **IK 14. Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)**

Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan ragam produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan Unit Pengolah Ikan Skala Mikro dan Kecil. Pada tahun 2024, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk sebanyak 875 UMKM.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)	600	375	-	875	600	375		600	100,00	68,57	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan III tahun 2024 capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) adalah 600 UMKM. Capaian indikator Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) sampai dengan triwulan III adalah sebesar 600 UMKM atau meningkat sebesar 62,50% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 375 UMKM.

Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 600 UMKM. atau setara 4% terhadap capaian triwulan III tahun 2023 yakni 625 UMKM, yang berarti mengalami penurunan

. Capaian ini setara dengan 105,15% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 1.360 UMKM atau setara 9,16% terhadap capaian triwulan III tahun 2023 yakni 1.310 produk, yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2023

Jika dibandingkan terhadap capaian triwulan III tahun 2023 yakni 625 UMKM, yang berarti mengalami penurunan sebesar 4%. Dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 875 UMKM, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 68,57%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) sebesar Rp7.348.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 5.957.017.400,- atau sebesar 81,07% dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk (UMKM) adalah:

- a. Dampak dari kegiatan Sosialisasi Mutu & Nilai Tambah Produk Perikanan dan kegiatan Bimtek Ragam Produk belum dapat diukur secara langsung termasuk dampak multi yang ditimbulkan terhadap UMKM yang dibina. Dalam pengukuran dampak tersebut membutuhkan *effort* yang besar dan akan dapat diukur pada jangka waktu yang relatif panjang, sedangkan ketersediaan anggaran dan SDM terbatas di Direktorat Pengolahan.
- b. Dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk melalui fortifikasi HPI pada produk olahan membutuhkan uji coba dan formulasi yang tepat sehingga menghasilkan produk yang disukai konsumen, kaya gizi dan bernilai tinggi. Tidak semua UMKM dapat menghasilkan produk tersebut sehingga membutuhkan ketrampilan dan dana yang tidak sedikit untuk melakukan beberapa uji coba sehingga diperoleh formulasi yang tepat.
- c. Ketersediaan HPI yang terbatas sehingga tidak semua ragam produk dapat difortifikasi dengan HPI. Untuk itu, praktikum pada kegiatan Bimtek Ragam Produk dapat mengganti HPI dengan lumatan daging ikan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

- a. Bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk memperoleh informasi terkait dampak multi dari penyelenggaraan kegiatan peningkatan ragam dan diversifikasi produk.

- b. Bekerja sama dengan tenaga ahli dan BBP3KP dalam uji coba fortifikasi HPI ke produk olahan pangan agar diperoleh formulasi yang tepat.
- c. Bekerja sama dengan produsen dalam penyediaan HPI dan melakukan pengembangan HPI dengan tenaga ahli dan akademisi.

Faktor keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) adalah:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Anggaran
- c. Teknologi
- d. Lingkungan kerja
- e. Koordinasi dan kerja sama lintas instansi terkait.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk (UMKM), yaitu:

#### 1. Mendukung kampanye protein ikan

- Dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2024, di Keraton Kasepuhan Cirebon.
- Merupakan kampanye dalam rangka peningkatan asupan protein ikan yang saat ini digaungkan oleh Ditjen PDSPKP. Peningkatan asupan protein ikan tersebut salah satunya dilakukan melalui ragam dan diversifikasi produk yang diolah oleh UMKM. Dalam kegiatan diperkenalkan ragam produk yang telah difortifikasi oleh hidrolisat protein ikan (HPI) hasil pengembangan dari pihak swasta.
- Ragam produk yang diperkenalkan adalah Bandeng isi, peyek ikan, keripik kulit ikan remang, keripik kulit ikan cucut, keripik kulit ikan patin, pempek, siomay ikan, abon lele, stik ikan, otak-otak, bakso ikan, kukis rebon, peyek rebon, brownis ikan tuna, pai tuna dan pai rumput laut.
- Dalam kegiatan mengundang 26 UMKM yang akan dilibatkan dalam uji coba produk dengan fortifikasi HPI. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan ragam produk, juga dilakukan pengayaan kandungan protein melalui HPI. UMKM yang dilibatkan yaitu: (1) Poklahsar Caruban, (2) Poklahsar Terasi

Sari Kejaksaan, (3) Poklahsar Putra Rosses, (4) Poklahsar Sumber Rejeki Sejahtera, (5) Poklahsar Srikandi, (6) Poklahsar Semboja Putih, (7) Poklahsar A5 Barokah, (8) Poklahsar AJT, (9) Poklahsar Siska Amelia, (10) Poklahsar Munding Agung, (11) Poklahsar Umay, (12) Poklahsar lin, (13) Poklahsar Ngedani, (14) Poklahsar Bina Sari Bahari, (15) Poklahsar Khodijah, (16) Poklahsar Mutiara, (17) Poklahsar Torani Sumber Makmur, (18) Poklahsar Kanebo, (19) DJN Cookies, (20) Poklahsar Maju Bersama, (21) Poklahsar Mina Saluyu, (22) Poklahsar Cimisbon, (23) UKM Pempek Hoki, (24) UKM Cisaloeng, (25) UKM Anis Napisah, dan (26) Cidea.



Gambar 49. Mendukung kampanye protein ikan

## 2. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan

- Merupakan program kerja sama dengan Komisi IV DPR RI dalam rangka sosialisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan. Kegiatan melibatkan 100 peserta yang terdiri dari pelaku UMK, pembudidaya ikan dan pemasar.
- Dalam pelaksanaannya dilakukan praktikum produk olahan berbasis bahan baku ikan yang memiliki potensi ketersediaan bahan baku di daerah sekitar dan merupakan produk kearifan lokal. Kegiatan ini bertujuan salah satunya memperkenalkan ragam produk dan diversifikasi olahan lokal supaya dapat dikembangkan oleh kelompok pengolah lainnya. Kegiatan ini dilakukan selama triwulan III pada daerah berikut:
  - a. Kab. Temanggung – Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli 2024 (Dimsum ikan lele)
  - b. Kab. Lampung Timur – Lampung pada tanggal 8 Juli 2024 (Kaki naga dan rollade ikan tuna)

- c. Kab. Sikka – NTT pada tanggal 23 Juli 2024 (Bakso ikan tuna dan nugget ikan tuna)
- d. Kota Bantaeng – Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 2024 (kerupuk kaktus rumput laut)
- e. Kab. Bima – NTB pada tanggal 24 Juli 2024 (Bakso ikan tuna)
- f. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) – Sumatera Selatan pada tanggal 29 Juli 2024 (Kerupuk kulit ikan lele dan abon ikan lele)
- g. Kab. Pangandaran – Jawa Barat pada tanggal 31 Juli 2024 (keripik tulang ikan jambal)
- h. Kota Samarinda – Kalimantan Timur pada tanggal 6 Agustus 2024 (pempek belida)
- i. Kab. Mamuju – Sulawesi Barat pada tanggal 8 Agustus 2024 (kerupuk ikan bandeng)
- j. Kab. Batubara – Sumatera Utara pada tanggal 8 Agustus 2024 (Abon ikan lele)
- k. Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara pada tanggal 4 September 2024 (nugget ikan tuna dan kaki naga ikan tuna)
- l. Kab. Blora – Jawa Tengah pada tanggal 21 September 2024 (Bakso ikan lele)
- m. Kab. Bone – Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September 2024 (Kaki naga)



Gambar 50. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan



Gambar 51. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan di berbagai daerah

### 3. Rapat Pendampingan UNDIP Dalam Rangka Fortifikasi Pangan Olahan Dengan HPI dan Perumusan *Draft* Kerja Sama

- Pendampingan instansi yang terkait yaitu pendampingan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Fakultas Kedokteran UNDIP dalam rangka fortifikasi HPI ke produk pangan olahan. Dalam hal ini telah disepakati produk pangan

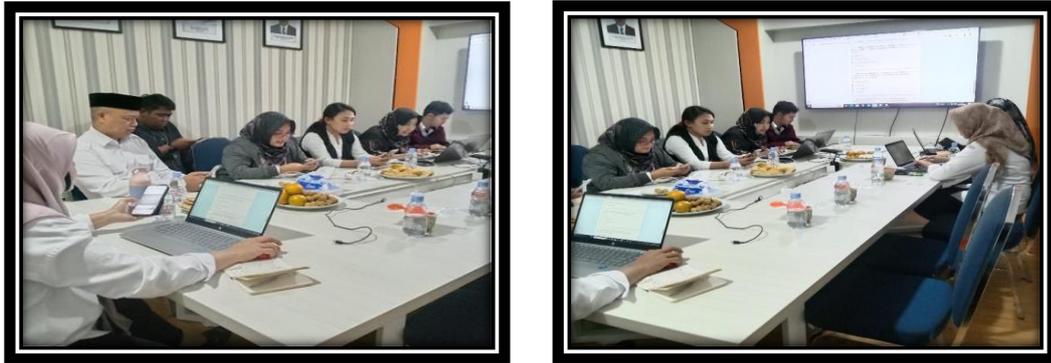
olahan yang difortifikasi HPI adalah telur gabus asin, snack bar, sereal flakes, cheese stik dan biskuit seduh. Produk – produk tersebut akan diperkenalkan kepada UMK di sekitar Semarang guna mendapatkan ragam baru yaitu berupa produk pangan olahan berbasis HPI. Terkait kegiatan ini telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 4 Oktober 2024 antara Ditjen PDSPKP dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas nama Fakultas Kedokteran UNDIP.



Gambar 52. Rapat Pendampingan UNDIP Dalam Rangka Fortifikasi Pangan Olahan Dengan HPI dan Perumusan *Draft* Kerja Sama

#### 4. Pembahasan Juknis Lomba Inovasi pada tanggal 20 Agustus 2024

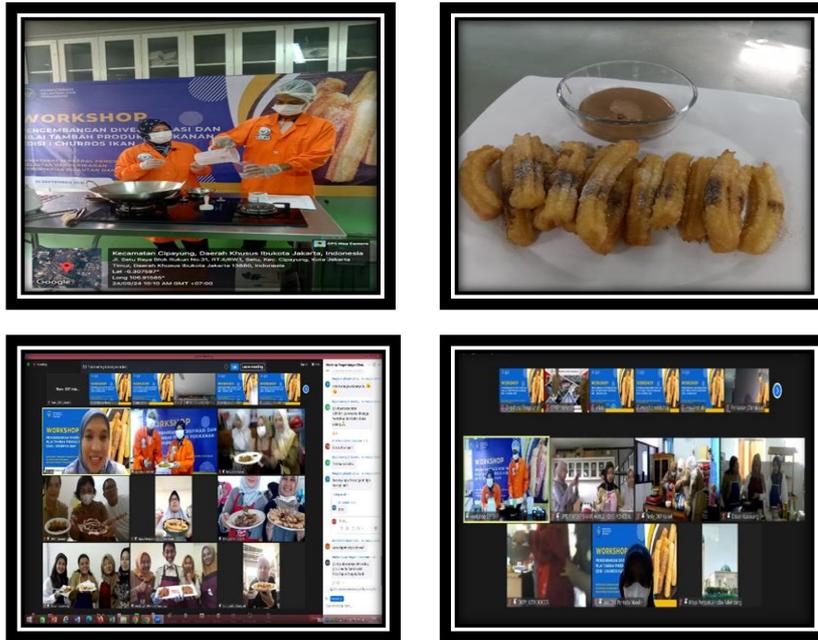
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024.
- Lomba inovasi merupakan ajang lomba yang melibatkan *stakeholder* dalam rangka menjaring ragam dan diversifikasi produk baru yang inovatif. Untuk pelaksanaannya memerlukan Juknis sebagai pedoman yang akan didistribusikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia.
- Saat ini lomba inovasi bertema “Produk Perikanan Berbasis HPI Sehat, Inovatif, dan Mendunia”. Sasaran peserta adalah mahasiswa dan pelaku usaha umum. Dari kegiatan tersebut diharapkan muncul ragam dan diversifikasi produk baru yang inovatif termasuk penggunaan HPI dalam fortifikasi ke produk olahan pangan.



Gambar 53. Pembahasan Juknis Lomba Inovasi pada tanggal 20 Agustus 2024

5. Bimbingan Teknis (Bimtek) ragam produk untuk UMKM naik kelas bekerja sama dengan BBP3KP

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024.
- Merupakan kegiatan Bimtek sebagai tindak lanjut dari hasil kurasi UMKM. Hasil kurasi terhadap UMKM diperoleh kebutuhan pembinaan berupa:
  - a. Pendampingan SKP
  - b. Pendampingan sertifikasi HC dan HACCP
  - c. Bimtek peningkatan nilai tambah
  - d. Pendampingan sertifikasi MD
  - e. Pendampingan registrasi merk
  - f. Bimtek jaminan mutu dan keamanan pangan.
- Untuk yang berkaitan dengan pembinaan UPI skala UMKM, dilaksanakan bimtek peningkatan nilai tambah yang bekerja sama dengan BBP3KP. Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan secara ber-seri berdasarkan kebutuhan pembinaan. Dalam bimtek juga terdapat praktikum pembuatan produk olahan yang difortifikasi HPI diantaranya churros ikan, wonton tuna, odeng, luncheon, stik ikan dan sirup rumput laut.
- Kegiatan bimtek ragam produk yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 diberikan materi tentang pengemasan dan pelabelan sekaligus praktikum pembuatan churros ikan yang difortifikasi HPI.



Gambar 54. Bimbingan Teknis (Bimtek) ragam produk untuk UMKM naik kelas bekerja sama dengan BBP3KP

## IK 15. Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)

Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) adalah jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina dalam satu periode waktu.

Sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang dapat bersaing di pasar regional maupun global maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan kinerjanya. Pada tahun 2024, target Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina sebanyak 500 industri.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)	200	180	-	500	200	220		460	100,00	40,00	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan III tahun 2024 capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) adalah 200 Industri. Capaian indikator Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) sampai dengan triwulan III adalah sebesar 460 Industri atau meningkat sebesar 22,67% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 375 Industri. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 200 Industri atau setara 6,98% terhadap capaian triwulan III tahun 2024 yakni 430 Industri, yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 500 Industri, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 40%,

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 649.405.109,- atau sebesar 64,94 % dari pagu anggaran.

Faktor kendala yang dihadapi dalam pencapaian output pada triwulan III adalah jumlah output yang cukup besar dalam satu triwulan dan perolehan data kondisi riil UPI yang diusulkan pada kegiatan lomba UPI skala besar terbaik.

Faktor keberhasilan yang telah dilaksanakan agar tercapainya target pada triwulan III yaitu, telah tersosialisasikannya kegiatan lomba UPI skala besar terbaik, dan telah dilaksanakannya pembinaan baik melalui FGD ataupun

kunjungan langsung ke beberapa UPI.

Rekomendasi yang akan dilakukan untuk tercapainya target pada triwulan berikutnya adalah melakukan kegiatan pembinaan melalui webinar, adapun terkait lomba UPI skala besar terbaik adalah melakukan koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dan melakukan penilaian melalui verifikasi lapang untuk UPI terpilih yang diusulkan Dinas KP Provinsi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri), yaitu :

#### 1. Rapat Persiapan SRG, 3 Juli 2024

Dalam rangka mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, bersama Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Ibu Siane Indriasari telah melaksanakan kegiatan identifikasi usaha mendukung pengembangan hilirisasi komoditas rumput laut, ubur-ubur, udang dan bandeng di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 3-5 Juni 2024. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil kegiatan tersebut sebagai berikut:

##### a. Hilirisasi Rumput Laut

1. Luas lahan budidaya rumput laut di Kota Tarakan sebesar 20.360.000 m<sup>2</sup> dengan jumlah rumah tangga pembudidaya sebanyak 1.053 KK dan pada tahun 2023 menghasilkan rumput laut jenis *Euchema Cottoni* sebanyak 98.727,7 ton dan *Euchema Spinosum* sebanyak 103.270,4 ton. Rantai tata niaga rumput laut mulai pembudidaya, peluncur/pengepul, dan pedagang besar/eksportir dari luar daerah. Menurut catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, jumlah pelaku usaha yang bertindak sebagai pengepul/peluncur rumput laut sebanyak 599 orang atau unit usaha.
2. Dari sisi harga jual di tingkat pembudidaya masih sangat rendah sekitar Rp6.000 per kg rumput laut kering, di tingkat pengepul/peluncur sekitar Rp8.000 per kg rumput laut kering dan di tingkat pedagang besar sekitar Rp10.000 - Rp12.000 per kg rumput laut kering dengan tingkat kekeringan yang bervariasi.

3. Gudang rumput laut kering yang dimiliki pedagang besar sebagian besar belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Dari sisi mutu rumput laut, bibit rumput laut yang digunakan telah mengalami penurunan kualitas dan pembudidaya banyak yang belum menerapkan cara penanganan rumput laut yang baik. Selain itu, banyak ditemukan sampah botol plastik bekas budidaya rumput laut yang berserakan di sepanjang pantai. Bahkan area budidaya terkadang mengganggu jalur pelayaran, karena telah melewati batas yang ditentukan.
4. Pedagang besar mengeluhkan rendahnya harga rumput laut kering dan tingginya biaya logistik. Mereka menyampaikan terdapat monopoli armada distribusi kapal antar pulau, disamping tol laut dan kapal PELNI yang sangat terbatas. Pengakuan salah satu pedagang besar, buyer China tidak bersedia jika rumput laut kering diangkut menggunakan kapal kayu tanpa asuransi resmi. Perkiraan biaya angkut per kontainer sekitar Rp 6.000.000,-.
5. Untuk mengatur tata kelola pemasaran rumput laut di Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan sedang menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang stabilitas harga, standar mutu rumput laut dan sistem budidaya rumput laut.
6. Kota Tarakan memiliki pabrik rumput laut ATC yang dibangun Ditjen PDSPKP pada tahun 2016 dan telah diserahkan asetnya kepada Pemkot Tarakan, kemudian aset dihibahkan kepada Perumda Tarakan untuk dikelola. Kondisi saat ini, pabrik rumput laut ATC dalam keadaan tidak beroperasi namun difungsikan sebagai gudang dan penjemuran rumput laut oleh pengelola. Rencana kedepan, akan difungsikan sebagai Sistem Resi Gudang, kemudian akan dikembangkan fungsinya sebagai pabrik ekstraksi rumput laut atau pengolahan biostimulan.
7. Pengolahan ekstraksi rumput laut skala kecil di Kota Tarakan telah dilakukan oleh PT. Sea Six Energy Tarakan, cabang perusahaan yang di Buleleng Bali yang merupakan PMA dari India. Perusahaan ini membutuhkan sekitar 1,6 ton rumput laut basah per hari dengan harga beli sekitar Rp1.500 per kg kepada pembudidaya mitra binaannya. Hasil

ekstraksi rumput laut dan hasil sampingnya berupa chips akan dikirim ke PT. Sea Six Energy di Buleleng, kemudian dikirim ke India (PT Sea Six Energy pusat) untuk diproses lebih lanjut menjadi pupuk cair atau biostimulan, karagenan dan biofuel.

8. Proses ekstraksi rumput laut yang dilakukan, yaitu pertama pemotongan, setelah dipotong dilakukan pengepresan yang kemudian menghasilkan cairan rumput laut dan hasil samping cacahan rumput laut. Cairan rumput laut selanjutnya dilakukan pemurnian, sedangkan cacahannya dijemur/dikeringkan untuk menjadi karagenan kering. Pengolahan rumput laut menjadi pupuk cair atau biostimulan merupakan pengolahan tanpa limbah (*zero waste*).

b. Pengolahan Ubur-Ubur

1. CV. Mitra Nelayan Abadi adalah unit pengolahan ubur-ubur yang berdiri sejak tahun 2014. Dan merupakan anak perusahaan PT. Sumber Kalimantan Abadi, unit pengolahan ikan skala besar yang mengolah komoditas udang yang berdiri sejak tahun 1986. Seluruh bahan baku ubur-ubur berasal dari laut Tarakan, sekitar 3 mil dari pertemuan antara Laut Tarakan dan Laut Sulawesi.
2. Produksi olahan ubur-ubur dalam 5 bulan terakhir tidak sebaik 3 – 4 tahun terakhir yang biasanya bisa mencapai 30 ton perbulan, bahkan pada musim-musim puncak tertentu bisa mencapai 45 ton perbulan (*finished goods*). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi angin, perolehan bahan baku akan maksimal jika terjadi angin selatan karena angin selatan membawa arus masuk menuju perairan tarakan dan ubur-ubur termasuk jenis mengikuti arus.
3. Dalam proses pengolahan ubur-ubur ini membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 6 hari mulai dari penerimaan, pencucian, pemotongan yang memisahkan antara tentakel dan umbrela, perendaman, pengeringan hingga penirisan. Bentuk produk akhir yang dihasilkan menyerupai krecek (kulit sapi), dan produk ini kaya akan kolagen sehingga sangat bermanfaat untuk kecantikan. Rendemen olahan ubur-ubur ini cukup rendah yaitu sekitar 10%, yang artinya untuk memproduksi 1 ton produk jadi diperlukan bahan baku sebesar 10 ton.

4. Bahan baku ubur-ubur diperoleh dari nelayan binaan yang melaut kurang lebih 26 hari di laut, sehingga menggunakan kapal penjemput untuk mengambil hasil tangkapan ubur-ubur. Hal ini dilakukan karena nelayan tidak membawa es, sedangkan ubur-ubur bisa bertahan maksimal 6 jam tanpa es.
  5. Perusahaan ini secara keseluruhan hampir mempekerjakan 100 orang, sedangkan untuk pengolahan sekitar 5-7 orang per shift dan setiap harinya terdapat 3 shift. Kapasitas terpasang di ruang produksi sekitar 50 ton bahan baku atau setara 5 ton produk jadi perhari dan perusahaan aktif beroperasi selama 20 hari dalam satu bulan, jika dengan asumsi kapasitas efektif sekitar 80% maka utilitas UPI sekitar 37,5% - 56,25% dalam kondisi optimal.
  6. Seluruh produk yang dihasilkan dipasarkan ekspor, dengan komposisi tertinggi yaitu ke negara China dan Taiwan dikirim melalui Surabaya namun sebentar lagi akan dibangun pelabuhan internasional di Tarakan sehingga pengiriman akan dilakukan melalui pelabuhan tersebut. Nilai ekspor saat ini per kontainer sekitar 10.000 USD (dengan volume sekitar 15 ton), sehingga jika dihitung per kilogram harga produk jadi masih dibawah 1 USD.
- c. Pengolahan Udang di PT. Mustika Minannusa Aurora
1. Unit pengolahan ini berdiri sejak tahun 1998, merupakan perusahaan eksportir udang dengan volume terbesar pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data lalu lintas BKIPM. Namun pada tahun ini, kegiatan ekspor cenderung menurun, hal itu dikarenakan tidak stabilnya ekonomi global akibat konflik dan perang yang menyebabkan permintaan pasar dan daya beli negara tujuan stagnan khususnya pasar Amerika dan Uni Eropa. Jenis udang yang dijual beragam dan berbagai size, namun saat ini yang banyak permintaan adalah kondisi *Headless* dan *Head-on* dengan size 13.
  2. Sebagai perusahaan pengolahan yang melakukan ekspor ke Eropa, unit pengolahan ini telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, HACCP dan *approval number* yang berlaku. Namun saat ini masih belum bisa masuk ke dalam pasar Rusia, dikarenakan adanya regulasi khusus

terkait bebas radiasi pada produk yang dikirim, dan untuk melakukan uji tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Sampai saat ini produk PT. Mustika Minanusa Aurora belum pernah mengalami penolakan dari buyer bahkan saat covid hingga saat ini belum pernah terdeteksi adanya logam berat, serta cemaran lainnya walaupun saat musim covid dilakukan pengecekan dan pengawasan lebih ketat.

d. Pengolahan Bandeng di PT. Tarakan Fisherindo Sipatuo

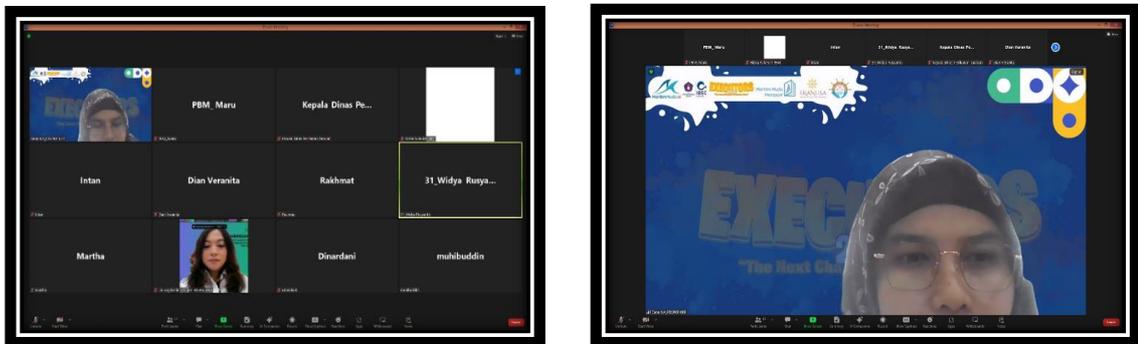
1. Unit pengolahan ini merupakan unit pengolah bandeng terbesar di Tarakan yang memiliki cold storage berkapasitas 400 ton dan ABF kapasitas 4 ton sebanyak 8 unit. Saat ini tercatat produksi perbulan mencapai 400-500 ton atau sekitar 25-30 kontainer. Dari total yang diproduksi 90 persen diantaranya dipasarkan ke Jakarta dan sisanya ke wilayah Papua dan ekspor. Selain memproduksi bandeng utuh beku, juga diproduksi bandeng tanpa duri beku dengan produksi mencapai 300 kg per hari. Seluruh bahan baku bandeng diperoleh dari tambak daerah Tarakan dan sudah memiliki sertifikat CBIB. Luasan tambak yang digunakan mencapai 10 hektare untuk satu tambak, dan untuk pembesarannya tidak menggunakan pakan.
2. Perusahaan menerima bahan baku bandeng semua ukuran, untuk ukuran 500 gram kebawah dipasarkan di Jakarta sedangkan untuk ukuran 500 gram keatas dipasarkan ekspor. Harga bandeng bahan baku untuk size 1 kilogram berisi 4 ekor sekitar Rp4.000 – Rp7.000, dan dijual ke Jakarta dengan harga Rp11.000 – Rp12.000 per kilogram.
3. Unit pengolahan ini mempekerjakan total 100 orang, dan tidak ada pergantian shift selama proses pengolahan. Dalam satu bulan hanya melakukan pengolahan sekitar 20 hari dikarenakan kondisi perairan yang mengalami air mati dua kali setiap bulannya sekitar 10 hari. Secara keseluruhan perusahaan telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan standar sanitasi higiene, hal itu dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat kelayakan pengolahan.

e. Tindak Lanjut

1. Ditjen PDSPKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan serta Perumda Tarakan akan

berkolaborasi dalam mewujudkan Sistem Resi Gudang dan pengembangan pabrik rumput laut pengolahan ekstraksi dan biostimulan dengan memanfaatkan bangunan pemerintah pabrik rumput laut yang belum beroperasi.

2. Ditjen PDSPKP turut mengawal penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dalam mengatur tata kelola rumput laut di provinsi tersebut.
3. Perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan permasalahan logistik pendistribusian rumput laut kering.
4. Perlu dilakukan diversifikasi produk ubur-ubur untuk wisata kuliner.



Gambar 55. Rapat Persiapan SRG

## 2. Rapat Verifikasi Penetapan 10 UPI Terbaik, 5 Juli 2024

Dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Unit Pengolahan Ikan skala besar terbaik tahun 2024. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah melaksanakan verifikasi penetapan 10 nominasi UPI skala besar terbaik tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut dilaporkan hasil kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilaksanakan 5 Juli 2024 di ruang rapat SKP Lt. 13 GMB 3 dan dihadiri perwakilan Setditjen PDSPKP, BBP2MHKP, perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP, dan pelaksana Tim Kerja Pembinaan Unit P2MB.
- b. Pengantar  
Mengawali pertemuan, Ketua Tim Kerja PUP2MB menyampaikan pertemuan ini sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya untuk melakukan verifikasi usulan UPI terbaik masing-masing daerah yang telah dilengkapi dengan data dukungannya untuk ditetapkan sebagai nominasi

calon UPI terbaik tahun 2024. Dari target 16 provinsi yang memiliki UPI skala besar, usulan dan data dukung yang telah masuk, saat ini sudah dilakukan verifikasi dan penilaian atas 3 provinsi yakni Bali, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada pertemuan ini akan dilanjutkan verifikasi penilaian atas usulan dan data dukung yang telah dikirim DKP provinsi yang belum diverifikasi. Selanjutnya agar masing-masing PIC segera menindaklanjuti untuk konfirmasi ulang ke DKP provinsi pengusul untuk melengkapi kekurangan sesuai hasil verifikasi yang telah dilakukan.

c. Hasil:

1) Jawa Tengah:

- PT Dua Putra Utama Makmur  
Memiliki Sertifikat Halal, SKP dan HACCP grade A, FDA surat keterangan traceability, rekaman SSOP, belum melampirkan program pelatihan. Perlu dilakukan konfirmasi ulang untuk kelengkapan data dukung yang belum ada dan negara tujuan ekspor, bukti kontrak penjualan dengan pihak ketiga, konfirmasi data dukung fasilitas kesehatan. Skor 811,5
- PT Misaja  
Memiliki SKP dan HACCP grade A, BRC, FSMA, BAP, dokumen traceability belum dilengkapi surat keterangan, tidak melampirkan struktur organisasi, semua untuk ekspor namun tidak dilengkapi dengan data dukung tren ekspor, tidak dilengkapi data dukung penjualan produk sisa ke pihak ketiga. Skor 678,5.
- PT Sumber Mina Bahari  
SKP, HACCP, FDA, tidak dilengkapi data dukung program pelatihan karyawan. Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada. Skor 620.

2) Jawa Timur:

- PT Aneka Tuna Indonesia  
PMA, 3 SKP grade A dan 1 grade B, HACCP grade A, Kosher, ISSF.  
Skor 940
- PT Panca Mitra Multi Perdana

SKP, HACCP grade A, perlu konfirmasi data dukung traceability, memiliki 6 penghargaan dan 3 sertifikat penghargaan terbaik bidang penerapan mutu. Skor 925,5

- PT Sekar Bumi  
Memiliki sertifikat SKP, HACCP, traceability, Halal, BRC, Trend ekspor menurun, telah mengolah limbah sebagian yaitu kepala udang.
- BMI (Bumi Menara Internusa)  
Memiliki sertifikat SKP, HACCP grade A, surat traceability. Trend ekspor cenderung meningkat. Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada.

### 3) Kalimantan Utara:

- PT Sumber Kalimantan Abadi  
Memiliki sertifikat traceability, HACCP. Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada.

### 4) Lampung

- PT Phillips Seafood  
Memiliki sertifikat SKP, HACCP grade A, BRC, traceability, MSC. Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada.
- PT Central Pertiwi Bahari  
Memiliki sertifikat SKP, Haccp grade A, traceability, BRC, SMETA, Fair trade, ASC. Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada.

### 5) Sulawesi Selatan

- PT Bogatama Marinusa  
Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada. Skor 625.
- PT Biota Laut Ganggang  
Memiliki sertifikat HACCP, FSSC 22000, halal, London beth din. Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim

beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada. Skor 760,5.

- PT Wahyu Pradana Binamulia

Memiliki SKP, HACCP dan Sertifikat Halal. Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada. Skor 720.

d. Penutupan dan Tindak Lanjut

Pada sesi penutupan Ketua Tim Kerja PUP2MB menyampaikan bahwa hingga saat ini verifikasi usulan UPI terbaik baru dilakukan atas 8 provinsi dari 16 provinsi yang telah mengusulkan, mengingat batas waktu yang sudah dekat, verifikasi oleh tim pusat atas usulan UPI dari provinsi yang belum diverifikasi akan dilakukan secara maraton. Selanjutnya diharapkan para PIC agar berkoordinasi dengan DKP untuk menyampaikan data dukung yang masih belum lengkap hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Untuk memvalidasi lebih lanjut atas hasil verifikasi akan dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang masuk dalam nominasi.

### 3. Sulawesi Utara, 11-13 Juli 2024

Dalam rangka pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari Prestasi Kategori Pengolahan dan Bina Mutu bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Besar Terbaik Tahun 2024, telah dilaksanakan serangkaian penilaian dari Tim Penilai Daerah dan verifikasi penilaian secara administratif oleh Tim Penilai Pusat. Sehubungan hal tersebut, sesuai penugasan dari Direktorat PBM dengan surat tugas nomor B. 2146/DJPDSPKP.4/KP.440/VII/2024 telah dilakukan penilaian terhadap 2 UPI Besar di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu PT Nutrindo Fresfood Internasional dan PT Samudera Mandiri Sentosa tanggal 12 Juli 2023.

Kunjungan dilakukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan verifikasi lapang penilaian UPI skala Besar Terbaik tahun 2024. Dalam kunjungan ini Tim Pusat didampingi oleh Bapak Reagan selaku Tim Daerah yang ditunjuk. Kunjungan ke PT Nutrindo Fresfood Internasional Tim Penilai Pusat dan Daerah bertemu dengan General Manager Bp Tedy Harmoko didampingi Tim Kerja di UPI. Tim Pusat menjelaskan progres penilaian yang telah dilakukan, tujuan kunjungan ke PT Nutrindo Fresfood Internasional, aspek penilaian UPI Besar Terbaik dan dokumen yang perlu di lengkap.

- **PT Nutrindo Fresfood Internasional**

Tahun 2024 PT NFI menargetkan volume produk tuna sebesar 1008 ton/tahun, marlin 72 ton per tahun dan swordfish 36 ton per tahun. Kebutuhan bahan baku tahun 2024 untuk tuna 1800 ton per tahun, marlin 120 ton per tahun, swordfish 60 ton per tahun, sehingga total kebutuhan bahan baku 2024 sebesar 1980 ton yang bersumber dari lokal saja. Target utilitas tahun 2024 adalah sebesar 80%. Fasilitas yang dimiliki perusahaan yaitu cold storage 4 unit kapasitas 700 ton, ABF 2 unit kapasitas 20 ton, Emulsioner Alcohol Freezing 4 unit kapasitas 15 ton, dan Chiller 3 unit kapasitas 55 ton.

UPI dengan Manajemen Terbaik Aspek penerapan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. NFI telah menerapkan GMP SSOP dengan baik, prosedur penanganan dan pengolahan ikan diterapkan secara baik. Untuk HACCP, ada 3 yang menjadi CCP yaitu di penerimaan bahan baku, packaging dan metal detecting. Dalam hal ini semua prosedur diterapkan secara baik.

Produk NFI terbagi 2, yaitu produk dengan penerapan MSC dan Non MSC. Untuk itu di ruang proses PT NFI menempatkan petugas yang menginput langsung data produksi secara digital setiap kali produksi. Data tersebut terhubung langsung dengan sistem pengendalian pemasok bahan baku yaitu ikan, packaging dan bahan lainnya dan langsung dapat diawasi oleh Manajemen. Sistem ketertelusuran PT NFI juga sudah terhubung dengan aplikasi Stelina Ditjen PDSPKP.

Sumberdaya manusia yang memadai. UPI Dengan Kinerja Terbaik Kontinuitas produksi dan penyerapan bahan baku. PT NFI menyatakan tidak mengalami kasus penolakan pada 2-3 tahun terakhir terkait food safety. Tren ekspor untuk 5 tahun terakhir cenderung turun.

Pemasaran dalam negeri lebih dari 20%. Dan jumlah akses pasar lebih dari 7 negara dalam setahun. Total Nilai PT NFI adalah sebesar 943,5 Kunjungan ke PT Samudera Mandiri Sentosa, Bitung Tim Penilai Pusat dan Daerah bertemu dengan Quality Assurance Ibu Christine dan Pemasaran Ibu Ani Febrianti.

- **Profil PT Samudera Mandiri Sentosa**

Tahun 2024 PT SMS menargetkan produk tuna kaleng sebesar 9.248 ton per tahun, tuna pouched sebesar 4.624 ton per tahun, preecooked tuna 4.624 ton per tahun, dan ikan asap 10.000 ton per tahun. Total target produksi tahun 2024 sebesar 28.495 ton per tahun. Fasilitas yang dimiliki perusahaan yaitu preecooking chamber 5 unit dengan kapasitas terpasang 40.950 ton per tahun per unit, pack shaper sebanyak 3 unit dengan kapasitas terpasang 40.950 ton per tahun per unit, seamer sebanyak 5 unit dengan kapasitas terpasang 40.950 ton per tahun per unit, pouched sealing sebanyak 2 unit dengan kapasitas terpasang 20.500 ton per tahun per unit dan retort sebanyak 10 unit dengan kapasitas terpasang 40.950 ton per tahun per unit. SMS telah menerapkan GMP SSOP dengan baik, prosedur penanganan dan pengolahan ikan diterapkan secara baik. Untuk HACCP, pada produk tuna kaleng ada 4 yang menjadi CCP yaitu di penerimaan bahan baku, metal detecting, seaming dan retorting. Untuk penerapan ketertelusuran, PT SMS telah menerapkan sistem ketertelusuran secara baik dibuktikan dengan dokumen mock recall test report dan surat keterangan ketertelusuran dan dikeluarkan oleh BKIPM. Produk yang dihasilkan PT SMS terbagi 2, yaitu produk dengan penerapan MSC dan Non MSC.

Dalam hal ini bahan baku yang diolah PT SMS berasal dari PT Bintang Mandiri Bersaudara yang merupakan perusahaan penangkapan ikan dan company sister dari PT Samudera Mandiri Sentosa. Sertifikat yang dimiliki PT SMS antara lain sertifikat BRC, MSC, US FDA, Dolphin Safe, Gluten Free dan lain-lain. Berdasarkan data, pemanfaatan kapasitas terpasang dalam tiga tahun terakhir antara 41-50%, dan penyerapan bahan baku lokal rata-rata diatas 60%. PT SMS tidak mengalami kasus penolakan pada 2-3 tahun terakhir terkait food safety. Tren ekspor untuk 5 tahun terakhir cenderung naik.

#### **4. Bali, 11-13 Juli 2024**

Verifikasi dilakukan atas 2 perusahaan yang masuk dalam 10 nominasi urutan nilai terbaik sesuai dengan penilaian sementara tim penilai pusat yang telah dilakukan sebelumnya. Menghasilkan produk fresh dan frozen pelagis fish, fresh dan frozen demersal fish, frozen cephalopods dan frozen cooket octopus dengan total kapasitas produksi 5 ton perhari. Verifikasi pada perusahaan ini dilakukan bersama dengan tim penilai lomba UPI skala besar terbaik daerah dan difokuskan

untuk konfirmasi kelengkapan dan validitas hasil penilaian tim penilai pusat yang telah dilakukan sebelumnya terkait asal trainer pelatihan karyawan perusahaan, konfirmasi konsep zero waste, konfirmasi divisi riset dan development dalam struktur organisasi perusahaan, data lalu lintas ekspor, serta pengecekan ruang klinik atau ruang kesehatan karyawan. Selain pelatihan internal, perusahaan ini juga melakukan pelatihan eksternal yang dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan BRCGS dengan trainer dari badan konsultan sertifikasi REI System Indonesia, bersertifikat.

Komitmen dalam mendukung konsep zero waste, dibuktikan dengan adanya PKS pembelian sampah ikan dengan pihak ketiga. Perusahaan ini memiliki klinik atau ruang khusus pemeriksaan kesehatan pegawai yang dilengkapi dengan 1 bed, bantal dan selimut, obat-obatan P3K, 1 meja dan kursi, namun tidak memiliki kerjasama dengan RS atau tenaga medis. Perusahaan hanya mengikutkan karyawan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mitra PMI dengan materi pertolongan pertama basic level, bersertifikat. Setelah dilakukan pengecekan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan ruang pengolahan dan areal sekitarnya.

Ikan Tuna Benoa Denpasar Bali, berdiri tahun 2009 dan memproduksi tuna beku potongan dengan produk fresh loin, frozen, yellowfin tuna, ground meat, loin/steak/saku, daging giling, beku dengan tujuan pasar Amerika Serikat.

#### 5. Kalimantan Utara,

Menurut catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, jumlah pelaku usaha yang bertindak sebagai pengepul/peluncur rumput laut sebanyak 599 orang atau unit usaha. Dari sisi harga jual di tingkat pembudidaya masih sangat rendah sekitar Rp6.000 per kg rumput laut kering, di tingkat pengepul/peluncur sekitar Rp8.000 per kg rumput laut kering dan di tingkat pedagang besar sekitar Rp10.000 - Rp12.000 per kg rumput laut kering dengan tingkat kekeringan yang bervariasi. Gudang rumput laut kering yang dimiliki pedagang besar sebagian besar belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Dari sisi mutu rumput laut, bibit rumput laut yang digunakan telah mengalami penurunan kualitas dan pembudidaya banyak yang belum menerapkan cara penanganan rumput laut yang baik.

Selain itu, banyak ditemukan sampah botol plastik bekas budidaya rumput laut yang berserakan di sepanjang pantai. Bahkan area budidaya terkadang mengganggu jalur pelayaran, karena telah melewati batas yang ditentukan. Mereka menyampaikan terdapat monopoli armada distribusi kapal antar pulau, disamping tol laut dan kapal PELNI yang sangat terbatas. Untuk mengatur tata kelola pemasaran rumput laut di Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan sedang menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang stabilitas harga, standar mutu rumput laut dan sistem budidaya rumput laut.

Kota Tarakan memiliki pabrik rumput laut ATC yang dibangun Ditjen PDSPKP pada tahun 2016 dan telah diserahkan asetnya kepada Pemkot Tarakan, kemudian aset dihibahkan kepada Perumda Tarakan untuk dikelola. Sea Six Energy Tarakan, cabang perusahaan yang di Buleleng Bali yang merupakan PMA dari India. Proses ekstraksi rumput laut yang dilakukan, yaitu pertama pemotongan, setelah dipotong dilakukan pengepresan yang kemudian menghasilkan cairan rumput laut dan hasil samping cacahan rumput laut. Mitra Nelayan Abadi adalah unit pengolahan ubur-ubur yang berdiri sejak tahun 2014.

Sumber Kalimantan Abadi, unit pengolahan ikan skala besar yang mengolah komoditas udang yang berdiri sejak tahun 1986. Produksi olahan ubur-ubur dalam 5 bulan terakhir tidak sebaik 3 – 4 tahun terakhir yang biasanya bisa mencapai 30 ton perbulan, bahkan pada musim-musim puncak tertentu bisa mencapai 45 ton perbulan . Dalam proses pengolahan ubur-ubur ini membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 6 hari mulai dari penerimaan, pencucian, pemotongan yang memisahkan antara tentakel dan umbrela, perendaman, pengeringan hingga penirisan. Bentuk produk akhir yang dihasilkan menyerupai krecek , dan produk ini kaya akan kolagen sehingga sangat bermanfaat untuk kecantikan.

Rendemen olahan ubur-ubur ini cukup rendah yaitu sekitar 10%, yang artinya untuk memproduksi 1 ton produk jadi diperlukan bahan baku sebesar 10 ton. Bahan baku ubur-ubur diperoleh dari nelayan binaan yang melaut kurang lebih 26 hari di laut, sehingga menggunakan kapal penjemput untuk mengambil hasil tangkapan ubur-ubur. Seluruh produk yang dihasilkan dipasarkan ekspor, dengan komposisi tertinggi yaitu ke negara China dan Taiwan dikirim melalui Surabaya namun sebentar lagi akan dibangun pelabuhan internasional di Tarakan sehingga

pengiriman akan dilakukan melalui pelabuhan tersebut. Namun pada tahun ini, kegiatan ekspor cenderung menurun, hal itu dikarenakan tidak stabilnya ekonomi global akibat konflik dan perang yang menyebabkan permintaan pasar dan daya beli negara tujuan stagnan khususnya pasar Amerika dan Uni Eropa.

Jenis udang yang dijual beragam dan berbagai size, namun saat ini yang banyak permintaan adalah kondisi Headless dan Head-on dengan size 13. Sebagai perusahaan pengolahan yang melakukan ekspor ke Eropa, unit pengolahan ini telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, HACCP dan approval number yang berlaku. Namun saat ini masih belum bisa masuk ke dalam pasar Rusia, dikarenakan adanya regulasi khusus terkait bebas radiasi pada produk yang dikirim, dan untuk melakukan uji tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Tarakan Fisherindo Sipatuo Unit pengolahan ini merupakan unit pengolah bandeng terbesar di Tarakan yang memiliki cold storage berkapasitas 400 ton dan ABF kapasitas 4 ton sebanyak 8 unit.

Dari total yang diproduksi 90 persen diantaranya dipasarkan ke Jakarta dan sisanya ke wilayah Papua dan ekspor. Luasan tambak yang digunakan mencapai 10 hektare untuk satu tambak, dan untuk pembesarannya tidak menggunakan pakan. Dalam satu bulan hanya melakukan pengolahan sekitar 20 hari dikarenakan kondisi perairan yang mengalami air mati dua kali setiap bulannya sekitar 10 hari. Secara keseluruhan perusahaan telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan standar sanitasi higiene, hal itu dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat kelayakan pengolahan.

Tindak Lanjut Ditjen PDSPKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan serta Perumda Tarakan akan berkolaborasi dalam mewujudkan Sistem Resi Gudang dan pengembangan pabrik rumput laut pengolahan ekstraksi dan biostimulan dengan memanfaatkan bangunan pemerintah pabrik rumput laut yang belum beroperasi.

- PT. Dua Putra Utama Makmur

Perlu dilakukan konfirmasi ulang untuk kelengkapan data dukung yang belum ada dan negara tujuan ekspor, bukti kontrak penjualan dengan pihak ketiga, konfirmasi data dukung fasilitas kesehatan.

- PT Sumber Mina Bahari

Perlu dilakukan konfirmasi ulang ke DKP provinsi untuk mengirim beberapa kelengkapan data dukung yang belum ada.

## 6. Rapat Penentuan Pemenang Lomba UPI Terbaik, 15 Juli 2024

Mengawali pertemuan, Ketua Tim Kerja PUP2MB menyampaikan bahwa setelah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka penilaian UPI terbaik skala besar tahun 2024 yang diawali dari koordinasi dengan DKP provinsi penunjukan anggota tim penilai, penyusunan dan sosialisasi juknis penilaian UPI terbaik skala besar tahun 2024, penentuan usulan calon peserta, verifikasi lapang oleh tim penilai daerah, pengunggahan dokumen dan data dukung usulan peserta lomba oleh UPI atau penilai daerah dalam google drive, verifikasi dan penentuan 10 UPI dan lokasi yang masuk dalam 10 nominasi UPI terbaik, serta verifikasi atau kunjungan lapangan yang dilaksanakan oleh tim penilai pusat. Hasil penilaian akhir ini akan dilaporkan ke pimpinan untuk diteruskan ke Setjen KKP untuk diproses lebih lanjut. Diharapkan juara 1 sampai 3 dapat diwakili dari provinsi yang berbeda.



Gambar 56. Rapat Penentuan Pemenang UPI Terbaik

## 7. Courtesy Meeting Ditjen PDSPKP dengan UNIDO, 19 Juli 2024

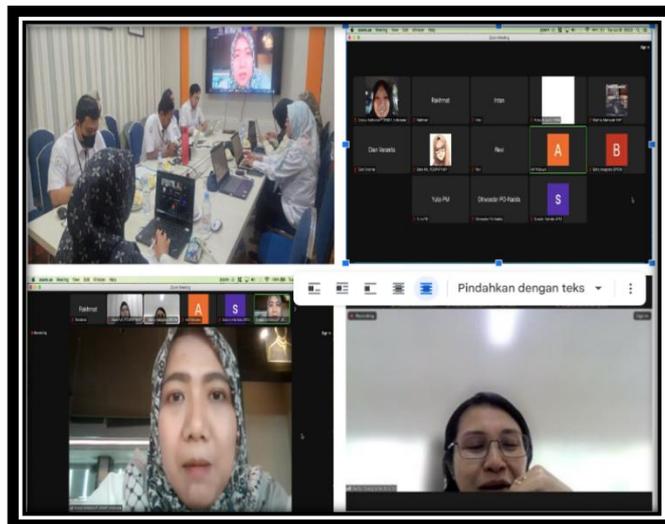
Tujuan pertemuan adalah sebagai audiensi dalam rangka peninjauan sinergi kegiatan antara Ditjen PDSPKP dengan UNIDO. Marco Kamiya untuk Indonesia dan Timor Leste beserta jajarannya. Apabila ada usulan atau masukan untuk framework tersebut dapat disampaikan kepada perwakilan UNIDO.

## 8. Saat ini telah terdapat beberapa sinergi kegiatan antara UNIDO dengan Ditjen PDSPKP dan KKP pada umumnya diantaranya

Beberepa produk-produk tersebut, khususnya yang berbahan dasar bandeng, telah dipromosikan di Swiss melalui kemitraan dengan eksportir PT. Perbaikan teknologi budidaya Udang yang masih tradisional agar lebih produktif dengan menerapkan konsep blue economy di beberapa lokasi seperti Lampung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

### 9. Hilirisasi Patin, 30 Juli 2024

Rapat dilaksanakan di ruang rapat SKP, lantai 13, Gedung Mina Bahari 3. Rapat dipimpin oleh Katimja PUP2MB dan dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia. Proses untuk mendapatkan Approval Number dari SFDA memiliki beberapa tahapan dan memiliki waktu yang cukup panjang.



Gambar 57. Rapat Hilirisasi Patin

### 10. Sibolga, 26-27 Agustus 2024

KKP melakukan pembinaan UPI menengah besar pada 26-27 Agustus 2024 di PT Asahi. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke PPN Sibolga.

#### • Profil produksi PT Asahi

Sertifikasi yang dimiliki, SKP A, HACCP A, Kosher, BRC. Spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan UPI adalah ikan cakalang ukuran 10 kg down dilengkapi dengan sertifikat Dolphin Safe. Kendala yang dihadapi PT Asahi terkait pasokan bahan baku di Sibolga yang sebagian besar tidak memenuhi spesifikasi UPI terutama

kepemilikan sertifikat Dolphin Safe, sehingga pasokan bahan baku dipenuhi dari suplier Jakarta.

#### **11. Rapat Pertemuan dengan Asosiasi Surimi, 1 September 2024**

Tujuan pertemuan adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri surimi serta alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut.

#### **12. Webinar Pembinaan UPI Skala Menengah dan Besar, 20 September 2024**

Webinar dilaksanakan secara hybrid 20 Agustus 2024 di Hotel Aryaduta Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan DKP provinsi seluruh Indonesia, pelaku usaha skala menengah dan besar seluruh DKP provinsi undangan, Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Asosiasi Surimi Indonesia, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI), Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), Tim Humas Setditjen PDSPKP, penyuluh, Enumerator DKI, BPPMHKP, BPPSDMKP, Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan, Ketua Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar (PUP2MB) dan pelaksana Tim Kerja Pembinaan Unit P2MB. Webinar diselenggarakan dengan tujuan Menambah wawasan bagi pelaku usaha/stakeholder, antara lain UPI (QA/QC), pembina mutu, perguruan tinggi, terkait Prinsip Umum Higiene Pangan SNI/CXC 1 : 1969/2021, dan memantapkan implementasi Prinsip Umum Higiene Pangan SNI/CXC 1:1969/2021 pada UPI skala MB.

#### **13. Jawa Tengah, 16-22 September 2024**

Dalam rangka Pembinaan Mutu UPI Skala Menengah dan Besar telah dilakukan perjalanan dinas ke Kab. Pemalang dan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18-20 September 2024. Berikut disampaikan hasil dari perjalanan dinas dimaksud:

##### **a. Kab. Pemalang**

Kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk pelatihan bagi calon operator sarana pasca panen/miniplant rajungan di Kab. Jepara yang daiadakan oleh

Direktorat Pengolahan pada tahun 2024 ini. Miniplant rajungan merupakan supplier bahan baku bagi UPI rajungan pasteurisasi sehingga kualitas produk yang dihasilkannya sangat penting untuk menjaga mutu produk rajungan pasteurisasi.

Pelatihan dilakukan dalam bentuk magang di di Miniplant Rajungan RYS yang berlokasi di Bungin Pecarakan, Danasari, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 16 – 22 September 2024 dengan calon operator yang mengikuti magang sebanyak 6 (enam) orang. Pelatihan ini dilakukan sebagai hasil tindaklanjut pertemuan sebelumnya dengan Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara (Forkom Nelangsa) sebagai penerima bantuan Miniplant pada tanggal 14 Agustus 2024. Miniplant RYS yang dijadikan lokasi magang merupakan salah satu supplier rajungan beku binaan dari PT. Philips Seafood Indonesia. Miniplant ini dalam satu hari mampu memproduksi bahan baku 6 kuintal rajungan segar/ beku menjadi 150 kg daging rajungan kupas rebus. Bahan baku rajungan diperoleh dari nelayan sekitar di mana antara miniplant dan nelayan terdapat ikatan tidak resmi, dimana miniplant memberikan modal terlebih dahulu kepada nelayan untuk menangkap rajungan. Selain bahan baku rajungan dari nelayan, Miniplant RYS juga mendapatkan bahan baku dari PT. Philips Seafood Indonesia yang diimpor dari negara Tunisia, dan sebagainya.

#### b. Kota Tegal

Kegiatan dilakukan melalui kunjungan lapangan ke salah satu industri surimi yang berlokasi di Kota Tegal, yaitu CV. Ocean Marine Indonesia yang beralamat di Kawasan Pelabuhan PPP Blok A2/8B, Kota, Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal.

Kunjungan dilakukan melalui diskusi dengan manajemen UPI mengenai permasalahan yang dihadapi industri surimi serta kesiapan jika dilibatkan dalam program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah yang baru.

CV. Ocean Marine Indonesia merupakan UPI surimi yang telah beroperasi sejak tahun 2021 dengan kapasitas produksi 50 ton bahan baku per hari dengan rendemen 25 – 28%, Saat ini CV. Ocean Marine Indonesia memiliki 2 line

produksi. Namun yang aktif memproduksi hanya 1 line dengan jumlah tenaga kerja 200 orang

Bahan baku yang digunakan yaitu ikan kurisi, mata goyang yang diperoleh dari nelayan sekitar Tegal, Rembang, dan Juwana; Sementara surimi yang dihasilkan sebagian besar dipasarkan kepada UPI pengolah Value Added Product yaitu PT. Citra Dimensi Arthali (Cedea) dan sebagian kecil diekspor ke Malaysia, dan Cina.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah harga bahan baku dari nelayan yang tinggi, sementara harga jual produk cenderung stagnan sehingga UPI cenderung menahan produksi dan penjualan. Saat ini, CV. Ocean Marine Indonesia memiliki stock produk surimi yang belum terjual sebanyak 150-200 ton. UPI surimi juga menghadapi persaingan dari produk impor yang menggunakan bahan baku ikan pollack, di mana ikan jenis ini harganya lebih murah dibandingkan ikan lokal bahan baku surimi dan kualitasnya (*gel strength*) lebih baik.

Tindak lanjut: Dit. Pengolahan akan melakukan kajian terkait kondisi dan potensi industri surimi agar daya saing industri sutrimi dalam negeri dapat meningkat.



Gambar 58. Kunjungan Lapang UPI di Kota Tegal

## IK 16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikarenakan tugas pokok dan fungsi baru di lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu yang tengah disusun tidak terdapat lagi pelayanan publik, sehingga tidak adanya anggaran dan kegiatan pendukung Wilayah Bebas

Dari Korupsi (WBK).

## **IK 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2024 ditargetkan sebesar 87 sedangkan target semester I adalah sebesar 75. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah semesteran, capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada semester I tahun 2024 adalah 86,44. Capaian ini setara dengan 110,82% terhadap target semester I tahun 2024 yakni 78 atau setara 10,26% terhadap capaian semester I tahun 2023 yakni 78,09. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 87, maka capaian semester I tahun 2024 telah mencapai 99,36%.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	-	78	-	87	-	86,44		86,44	-	-	-	

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada semester I antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

Kendala yang dihadapi pada triwulan III untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya:

1. Pegawai masih jarang mengikuti diklat ataupun pelatihan yang bernilai 20JP pada semester I;
2. Pegawai yang masih sering tidak melakukan update diklat/pelatihan yang diikuti pada aplikasi e-pegawai.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya mengingatkan kembali secara rutin kepada pegawai untuk melakukan update data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai.

### **IK 18. Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)**

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat PBM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP,

yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Pengolahan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan III dengan target Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sebesar 84, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode triwulan II. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,5 poin atau meningkat 4,3% dari target tahun 2023.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan III antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
2. Menyiapkan data dukung terkait perencanaan kegiatan serta capaian realisasi kegiatan.

### **IK 19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Pengolahan dan

Bina Mutu atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah ditindak lanjuti.

Formulasi :

$$X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100$$

X : Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat PBM (%)

$\Sigma a$  : Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Direktorat PBM Tahun 2023

$\Sigma b$  : Jumlah temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat PBM atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya persamaan antara target tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 100.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada triwulan III antara lain:

1. Melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## **IK 20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Indikator ini ditargetkan sebesar 80. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) tahun 2024 ditargetkan sebesar 80% sedangkan target triwulan II adalah sebesar 80%. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah triwulanan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) pada triwulan III tahun 2024 adalah 100%. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 80 atau setara 120% terhadap capaian triwulan III tahun 2023 yakni 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 80, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 120%.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	80	80	75	100	100	100	100	100	125,00	100,00	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada triwulan III, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

### **IK 21. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Formula yang digunakan untuk aspek penilaian didasarkan pada Keputusan

Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022.

Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi) tahun 2024 ditargetkan sebesar 1 Inovasi. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Indikator tersebut perhitungannya adalah tahunan, sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian dan dapat dilihat pada triwulan IV tahun 2024.

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

## IK 22. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office.

Indikator kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) tahun 2024 ditargetkan sebesar 94 sedangkan target triwulan III adalah sebesar 94. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Perhitungannya adalah triwulanan, capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) pada triwulan III tahun 2024 adalah 133,33. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target triwulan III tahun 2024 yakni 94 atau setara 33,33% terhadap capaian triwulan III tahun 2023 yakni 100. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 94, maka capaian triwulan III tahun 2024 telah mencapai 120%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III ini adalah saat penginputan dokumentasi harus dilakukan pemotongan atau cropping sesuai dengan aturan, sehingga dokumentasi menjadi terpotong. Adapun faktor keberhasilan adalah telah terpublikasikanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu.

Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	92	94	133,33	133,33	133,33	133,33	141,84	141,84	-	-

### IK 23. Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam satu tahun anggaran. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% atau sama dengan target tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Penilaian indikator ini dilakukan pada triwulan IV sehingga pada triwulan II belum terdapat penilaian.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada triwulan II yaitu rutin melakukan penginputan transaksi keuangan di aplikasi SAKTI.

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2024, capaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada, sama dengan capaian pada triwulan III tahun 2023. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada triwulan IV tahun 2024.

Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 16.780.637.237,- atau sebesar 27,96% dari pagu anggaran setelah terjadi AA. Dimana capaian realisasi ini lebih kecil dari realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar 35.739.605.794,- atau 62,19% dari pagu anggaran. Sehingga mengalami penurunan serapan sebesar 55,04%.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	170.000.000	70.741.200	41,61
2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	1.198.191.000	1.080.433.260	90,17
3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP) (Produk)	1.500.000.000	1.039.236.824	69,28
4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	170.000.000	101.110.010	59,48
5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	10.700.000.000	959.897.060	8,97
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	—	—	—
7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	170.000.000	114.633.700	67,43
8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	20.200.000.000	952.069.155	4,71
9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	2.890.100.000	1.485.462.027	51,40
10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	5.032.500.000	1.275.553.000	25,27
11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	7.120.000.000	1.112.591.959	15,66
12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	1.500.000.000	1.077.512.100	71,83
13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam	1.021.000.000	904.974.433	88,64

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)			
14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	7.348.000.000	5.957.017.400	81,07
15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	1.000.000.000	649.405.109	64,94

#### **IK 24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)**

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d. TW III Tahun 2024			TW II 2024	TW III 2023
Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari Juli sampai dengan September 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan triwulan III sebesar 105,25. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan Triwulan III sebesar 105,25. Adanya penurunan 5,69 poin atau 5,13% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2024, dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 5,21 poin atau 4,72%. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan triwulan III diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Perhitungan Utilitas UPI (%); target 68%; capaian 68,26% atau 100,38%.
- IKK Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP); target 478 Produk; capaian 478 Produk atau 100% dari target.
- IKK *Chest Freezer* Yang Disediakan (Unit); target 271 unit; capaian 311 unit atau 114,76% dari target.
- IKK Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang Disediakan (Unit); target 8 unit; capaian 8 unit atau 100%.
- IKK Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM); target 1.360 UMKM; capaian 1.430 UMKM atau 105,15% dari target.
- IKK Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM); target 600 UMKM; capaian 600 atau 100% dari target.

- IKK Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri); target 200 industri; capaian 200 industri atau 100%.
- IKK Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (IKU); target 19.080 orang; capaian 19.466 orang atau sebesar 102,02%.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%); target 80; capaian 100 atau sebesar 120%.
- IKK Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar; target 94; capaian 133,33% atau 120%.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

#### **4.2. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada triwulan III, yaitu:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	<p>a. Kendala yang dihadapi pada triwulan III, enumerator belum seluruhnya melakukan pendataan dan penginputan data.</p> <p>b. Raw Data Lalin Ekspor dan Domestik baru diperoleh pada bulan Oktober 2024, sehingga penghitungan VPO tidak dapat dilakukan dengan cepat</p>	Meningkatkan monitoring terhadap kinerja enumerator dan meningkatkan koordinasi dengan Badan Mutu

### 4.3.Rekomendasi Tindak Lanjut

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2024	Tindak Lanjut
<p>a. Menetapkan tim analisis data dan melakukan monitoring terhadap data sarana prasarana yang diinput enumerator;</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil secara remote/online</p>	<p>a. Melaksanakan rapat monitoring kegiatan pendataan dan penginputan sarana prasarana dan menetapkan SK Dirjen PDSPKP Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tim Analisa Data Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar;</p> <p>b. Melaksanakan Rapat Pembinaan HACCP UPI Nilai Tambah</p>

	Gresik
--	--------

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM (<https://drive.google.com/drive/folders/1OWWOo734wkKcjdzckgQ8audJWnW94WHX>).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP. Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terka hit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: [direktoratpbm@gmail.com](mailto:direktoratpbm@gmail.com). Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

## 4.4.Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**  
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
**Direktur Jenderal Penguatan Daya**  
**Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

**Budi Sulistiyo**

**Pihak Pertama,**  
**Direktur Pengolahan dan**  
**Bina Mutu**

**Widya Rusyanto**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2.	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/ sertifikat <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> (Produk)	10.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4.	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3
5.	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5.	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (Unit)	1
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	38.159
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es portable yang dibangun (Unit)	11
9.	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	Chest freezer yang disediakan (Unit)	311
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270
		11.	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9
		12.	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8
13.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		14.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
		15.	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	16.	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		17.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87
		18.	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84
		19.	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100
		20.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80
		21.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		22.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94
		23.	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		24.	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80